

Penjaminan untuk Pertumbuhan Guarantees for Growth

LAPORAN TAHUNAN 2010 ANNUAL REPORT



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

Daftar Isi Contents

Prakata Foreword	1
---------------------	---

Sekilas PII IIGF at a Glance	8
---------------------------------	---

Visi dan Misi, Tujuan Vision and Mission, Objective	10
--	----

Arah Pertumbuhan dan Strategi Roadmap and Strategy	12
---	----

Jejak Langkah Milestones	14
-----------------------------	----

Peristiwa Penting Tahun 2010 Events Highlight in 2010	16
--	----

Ikhtisar Keuangan 2010 2010 Financial Highlights	17
---	----

Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners	18
---	----

Laporan Direksi Report from the Board of Directors	22
---	----

Kebijakan & Prosedur Policies & Procedures	52
---	----

Kebijakan Perusahaan Company Policies	54
--	----

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	56
--	----

Manajemen Risiko Risk Management	64
-------------------------------------	----

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility	84
---	----

Laporan Keuangan Financial Report	96
--------------------------------------	----

27 Kerangka Regulasi Regulatory Framework

Infrastruktur di Indonesia | Infrastructure in Indonesia

Ketenagalistrikan | Electricity

Sistem Penyediaan Air Minum | Water Supply System

Jembatan dan Jalan Tol | Toll Roads and Bridges

Transportasi | Transportation

Air Limbah dan Persampahan |

Waste Water and Waste Disposal

Pengairan | Irrigation

Minyak dan Gas Bumi | Oil and Gas

Telekomunikasi dan Informasi |
Information and Technology

44 Peningkatan Kapasitas Capacity Building

46	Permodalan & Peningkatan Kapasitas Institusi Capitalization & Institutional Capacity Building
----	--

47	Sumber Daya Manusia Human Resources
----	--

48	Proses Pemberian Jaminan Guarantee Provision Process
----	---

51	Kerjasama Internasional International Cooperation
----	--

74 Proyek Berjalan Projects in the Pipeline

76	Proyek PLTU Jawa Tengah (Proyek CJPP) Coal-fired Central Java Power Plant Project (CJPP Project)
----	---

80	Kegiatan Lainnya di Tahun 2010 Other Activities in 2010
----	--

88 Analisa dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

124 Profil Manajemen Management Profile



Prakata

Foreword

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas Pemerintah Indonesia, yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan umum baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga ketersediaannya yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan daya saing industri, dan pemerataan pembangunan. Pemerintah menyadari adanya berbagai hambatan, tantangan dan keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur dari aspek sumber daya manusia maupun kemampuan pendanaan.

Guna mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional diperlukan infrastruktur yang memadai yang didukung oleh pengerahan dan pengelolaan sumber pembiayaan. Selain pembiayaan konvensional melalui APBN untuk penyediaan proyek infrastruktur, salah satu alternatif adalah melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Dalam suatu skema KPS, risiko-risiko proyek yang teridentifikasi dialokasikan sesuai prinsip alokasi risiko antara sektor publik dan swasta. Dengan demikian, terdapat risiko-risiko yang merupakan tanggung jawab sektor publik dan tidak dapat dialokasikan kepada sektor swasta. Untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan investasi jangka panjang terhadap penanganan risiko-risiko tersebut, sektor swasta seringkali memerlukan adanya suatu penjaminan dari pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan penjaminan tersebut agar proyek KPS dapat berjalan, maka dibentuklah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang diberi tugas untuk menyediakan penjaminan terhadap risiko proyek infrastruktur dimaksud, yang umumnya merupakan risiko-risiko yang dipicu oleh adanya atau tiadanya tindakan Pemerintah, yang berdampak pada penurunan nilai keekonomian proyek KPS infrastruktur.

Infrastructure development is one of the priorities of the Government of Indonesia, which is undertaken to provide public service facilities, both in terms of quality and quantity, so that the availability of adequate facilities, will enhance public welfare and support economic growth.

Infrastructure plays a key role in stimulating economic growth, providing job opportunities, alleviating poverty, enriching human resources, increasing industrial competitiveness and promulgating development. The government is keenly aware of the obstacles, challenges and limitations facing infrastructure development from the aspects of expertise and funding.

In order to accelerate national economic growth, there needs to be adequate infrastructure that is supported by the ability to harness and manage funding resources. In addition to conventional funding sources from the government budget, an alternative is the Public-Private Partnership (PPP).

In a PPP scheme, the identified project risks are allocated according to the principles of risk allocation between the public and private sectors. Thus, there are risks that are the responsibility of the public sector and cannot be allocated to the private sector. To provide protection and security for long-term investments in managing those risks, the private sector often request guarantees from the government.

To fulfil such guarantee requirement in order to ensure delivery of the PPP projects, the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) is established, whose mandate is to provide guarantees against infrastructure risks caused by the government's actions or inactions, which negatively affects the economic viability of PPP projects.



Infrastructure



Drawing Benefits for Decades to Come

Selama masa operasional proyek infrastruktur, masyarakat dan generasi berikutnya akan mendapatkan manfaat ekonomis dari kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur untuk aktifitas dan kehidupan mereka sehari-hari.

Long after an infrastructure project has been commissioned, people and the following generations will still be able to draw economic benefits from the infrastructure for their daily activity and life



**Public Private
Partnership**



Tapping into Private Sector Funding and Expertise

Selain untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, partisipasi pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) diharapkan dapat meringankan beban pembiayaan infrastruktur dari anggaran negara. Selain itu, semakin banyak investasi dan keahlian dari pihak swasta diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas dari proyek infrastruktur tersebut.

Aside from expediting the development of infrastructure in Indonesia, the participation of the private sector through the Public-Private Partnerships (PPPs) is expected to lessen the burden of infrastructure funding from the State Budget. Additionally, greater investment and expertise from the private sector is also expected to enhance the quality of infrastructure projects.



Guarantee



Providing Confidence for Investors

Jaminan atas risiko politik dan ketidakpastian tindakan pemerintah yang berada diluar kendali pihak swasta akan dapat meningkatkan rasa aman bagi Investor untuk berinvestasi sehingga diharapkan mampu menarik lebih banyak partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Guarantees against political risks and uncertainties of government's action beyond private sector's control can increase investor's confidence to invest in order to attract more private participation in infrastructure development in Indonesia.

Sekilas PII

IIGF at a Glance

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PII didirikan sebagai respon Pemerintah Indonesia terhadap kebutuhan akan adanya penjaminan terhadap risiko politik yang melekat pada investasi di bidang infrastruktur. Melalui penjaminan tersebut, diharapkan akan mendorong keikutsertaan pihak swasta yang lebih luas dalam pembangunan infrastruktur khususnya melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS (*Public Private Partnership*, PPP).

Sebagai dasar pelaksanaan KPS, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 67/2005 tentang KPS dalam Penyediaan Infrastruktur, yang diubah dengan Perpres 13/2010. Perpres 13/2010 menyebutkan adanya dukungan kontingen berupa Jaminan Pemerintah yang akan diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) kepada proyek KPS. Dukungan kontingen atau jaminan tersebut diberikan Menkeu melalui suatu Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI).

Untuk itu, PII yang merupakan BUPI dibentuk pada tanggal 30 Desember 2009 sebagai salah satu upaya Pemerintah mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, melalui penyediaan jaminan yang dilakukan dengan proses yang akuntabel, transparan dan kredibel. Disamping itu, kehadiran PII sebagai BUPI diharapkan akan mendorong masuknya pendanaan dari swasta untuk sektor infrastruktur di Indonesia melalui peningkatan kelayakan kredit (*creditworthiness*) proyek KPS yang dapat berdampak pada penurunan *cost of fund* dari proyek-proyek infrastruktur.

Secara ringkas, tujuan pembentukan PII adalah untuk:

- Meningkatkan kelayakan kredit atas proyek-proyek KPS infrastruktur melalui pemberian penjaminan atas risiko infrastruktur.
- Meningkatkan tata kelola dan proses yang transparan dalam pemberian penjaminan atas risiko proyek infrastruktur yang terkait dengan tindakan dan tidak adanya tindakan pemerintah.
- Memfasilitasi keberhasilan transaksi bagi PJP (Kementerian, BUMN, Pemda) melalui penyediaan penjaminan bagi proyek KPS yang telah distruktur dengan baik.

“IIGF was established on December 30, 2009, as an effort of the government to expedite the construction of infrastructure in Indonesia, providing guarantees accountably, transparently and credibly.”

The Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, or IIGF, was established as the response of the Government of Indonesia to the need for adequate assurance against the political risks inherent in infrastructure investments. This assurance is expected to increase the participation of private sector in developing infrastructure through Public-Private Partnership (PPP).

As the basis for PPP execution, the government issued Presidential Regulation Number 67/2005 concerning PPP in Infrastructure Development, which was amended by Presidential Regulation No. 13/2010. The latter regulation states the existence of contingent support in the form of Government Guarantee, which will be granted by the Minister of Finance to PPP projects. This contingent support or guarantee is given by the Finance Minister through an Infrastructure Guarantee Business Entity.

For that reason, IIGF was established on December 30, 2009, as an effort of the government to expedite the development of infrastructure in Indonesia by providing guarantees in accountable, transparent and credible manner. In addition, the presence of IIGF as the Infrastructure Guarantee Company is also expected to encourage the entry of private funds for the infrastructure sector in Indonesia by increasing creditworthiness of PPP projects which may decrease the cost of fund of infrastructure projects.

- Memagari (*ring-fence*) kewajiban kontinjensi Pemerintah dan meminimalkan kejutan langsung (*'sudden shock'*) kepada APBN.

PII bertindak sebagai Penjamin bagi sektor swasta atas berbagai risiko infrastruktur yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan atau tidak adanya tindakan Pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi proyek KPS infrastruktur, seperti keterlambatan pengurusan perijinan, lisensi, perubahan peraturan perundangan-undangan, ketiadaan penyesuaian tarif, kegagalan pengintegrasian jaringan/fasilitas dan risiko-risiko lainnya yang ditanggung atau dialokasikan ke pemerintah dalam masing-masing kontrak KPS.

Permodalan dan Kapasitas Penjaminan

Pemerintah telah melakukan penyertaan modal ke PII sebesar Rp2 triliun melalui APBN 2009 dan 2010, dan telah merencanakan akan menambah penyertaan sebesar Rp1,5 triliun dari APBN 2011. Seiring dengan berjalannya waktu, PII secara bertahap akan mengurangi ketergantungan pada APBN, dan akan meningkatkan kapasitas penjaminannya melalui kerjasama dengan institusi penyedia jaminan sejenis, seperti institusi multilateral (Bank Dunia, ADB, MIGA, dsb.), institusi bilateral (lembaga pembiayaan ekspor) atau institusi sejenis lainnya.

“PII dibentuk pada tanggal 30 Desember 2009 sebagai salah satu upaya Pemerintah mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, melalui penyediaan jaminan yang dilakukan dengan proses yang akuntabel, transparan dan kredibel.”

In summary, IIGF was established for the following purposes:

- To improve the creditworthiness of the PPP infrastructure projects by giving guarantees against infrastructure risks.
- To improve the governance and the transparency of the guarantee process to the infrastructure PPP Projects related to the government actions or inactions.
- To facilitate deal flow for Contracting Agencies (ministries, state-owned enterprises, local government) by providing guarantees to well-structured PPP projects.
- To ring-fence government contingent liability and minimize sudden shock to government budget.

IIGF acts as the Guarantee Provider to the private sector for various infrastructure risks that may occur because of the government's actions or inactions, which may result in financial losses to the PPP infrastructure projects, such as delays in the processing of permits and licenses, changes of rules and regulations, lack of tariff adjustment, failure to integrate the network/facilities and other risks that are borne or allocated to the government in each PPP contract.

Capital Provision and Guarantee Capacity

The government has made capital contribution to IIGF in the amount of Rp2 trillion through the State Budget for the years 2009 and 2010, with an additional Rp1.5 trillion allocated from the 2011 State Budget. As time goes by, IIGF will gradually reduce its dependency on the State Budget, and will increase its loan capacity by cooperating with similar guarantee provider institutions, such as multilateral institutions (i.e. the World Bank, ADB, MIGA, etc.), bilateral institutions (export credit agencies) or other similar institutions.

Visi
Vision

Menjadi penyedia penjaminan yang memainkan peran penting dalam menarik modal swasta untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

To be a guarantee provider that plays a pivotal role in attracting private capital for infrastructure development to accelerate Indonesia's economic growth.

Misi
Mission

- Menyediakan produk-produk penjaminan melalui proses bisnis yang transparan dan baik.
 - Melaksanakan kebijakan satu pelaksana dalam proses pemberian jaminan dengan modal yang kuat dan manajemen yang profesional.
 - Meningkatkan kelayakan kredit proyek infrastruktur Indonesia.
-
- To provide guarantee products through transparent and robust business processes.
 - To implement a “Single Window” policy in guarantee provision through a solid capital base and professional management.
 - To improve the creditworthiness of infrastructure projects in Indonesia.

Tujuan Objectives

- Meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek-proyek infrastruktur KPS melalui kerangka evaluasi dan pengelolaan klaim atas penjaminan.
 - Meningkatkan tata kelola dan transparansi pelaksanaan penyediaan penjaminan.
 - Memfasilitasi keberhasilan transaksi bagi PJP (Kementerian, BUMN, Pemda) melalui penyediaan penjaminan bagi proyek KPS yang distruktur dengan baik.
 - Memagari kewajiban kontinjen Pemerintah dan meminimalkan kejutan langsung kepada APBN.
-
- To improve creditworthiness and quality of PPPs in infrastructure projects by establishing a clear and consistent appraisal and claim framework for guarantees.
 - To improve the governance and transparency of guarantee provision.
 - To facilitate the deal flow for Contracting Agencies (i.e. Ministries, SOEs, Regional Governments) by providing guarantees to well-structured PPPs.
 - To ring-fence Government contingent liability and minimize sudden shock to State Budget.

Arah Pertumbuhan Road-map

Agar dapat merealisasikan visi perusahaan, PII telah merumuskan suatu *road-map* yang membagi rencana pengembangan PII dalam empat tahapan utama. Pada setiap tahap pengembangan, PII memiliki peran yang berbeda, dirancang sedemikian rupa agar PII dapat melangkah pasti secara bertahap ke jenjang yang lebih tinggi.

In order to actualize its corporate vision, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund has formulated a Road-map that divides the IIGF development plan into four principal stages. At each stage of development, IIGF has a different role, designed as such so that IIGF can move confidently but gradually to a higher level.

Agar dapat merealisasikan visi perusahaan, PII telah merumuskan suatu *road-map* yang membagi rencana pengembangan PII dalam empat tahapan utama. Keempat tahapan pengembangan PII sesuai *Road-map* perusahaan, adalah sebagai berikut:

- Tahap Persiapan, yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dimana PII akan meletakkan landasan serta dasar-dasar proses penjaminan, sekaligus memastikan *good governance* dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan suatu proyek yang akan diberikan penjaminan.
- Tahap Pertumbuhan, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dimana pada tahap ini Perusahaan akan berusaha mendapatkan kepercayaan publik dan sektor swasta atas perannya, memperluas jenis risiko yang dapat dijamin Perusahaan serta meningkatkan kapasitas penjaminan.
- Tahap Pemantapan, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dimana PII akan melakukan ekspansi penjaminan di luar proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta.
- Tahap Perubahan, yaitu setelah tahun 2018, dimana PII akan melakukan ekspansi penjaminan diluar proyek infrastruktur ekonomik.

The four stages of IIGF development, according to its Road-map, are as follows:

- Set-up Stage: From 2010 until 2012, where the Company will lay the foundation and the basic principles of the underwriting process, while ensuring good governance in assessing the feasibility of a project which will receive underwriting.
- Growth Stage: From 2013 until 2015, at which stage the Company will strive to earn the trust of the public and private sector on its role, expand the types of risks that the Company can underwrite and improve underwriting capacity.
- Stabilization Stage: From 2016 until 2018, in which the Company will expand its underwriting beyond Public-Private Partnership projects.
- Stage of Change: Beyond 2018, when the Company will expand its underwriting beyond economic infrastructure projects.

Strategi Strategy

Eksekusi strategi tahun 2010 untuk mencapai visi dan misi Perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut:

Pada Tahap Persiapan, yang telah dimasuki sejak tahun 2010, Perusahaan fokus pada Orientasi Pelanggan, serta pengembangan sumber-sumber daya internal melalui Orientasi Internal, Orientasi Pembelajaran dan Orientasi Pertumbuhan. Pada tahap ini, Perusahaan juga memperhatikan aspek kapasitas penjaminan, terutama modal penjaminan, yang tengah digalang bersama pemegang saham, dengan turut melibatkan dukungan dari berbagai badan multilateral, dan institusi finansial terkemuka dunia.

Untuk Orientasi Pembelajaran dan Pertumbuhan, strategi utama yang dilakukan antara lain berupa pengembangan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, termasuk penyiapan **Key Performance Indicator (KPI)** untuk masing-masing individu, dan pengembangan Sistem Informasi untuk mendukung proses bisnis.

Strategi dalam lingkup Orientasi Internal antara lain adalah peningkatan kapasitas Perusahaan, proses appraisal yang transparan dan tepat waktu, penetapan kebijakan fee penjaminan, pengelolaan dana yang optimal dan penyelesaian kewajiban kepada para pemangku kepentingan, seperti pembuatan laporan secara tepat waktu dan pembuatan matriks alokasi risiko.

Sedangkan strategi dalam lingkup Orientasi Pelanggan antara lain berupa penjaminan yang dapat menjadikan proyek infrastruktur yang lebih **bankable**. Selain itu, Perusahaan juga secara proaktif berupaya mengembangkan portofolio penjaminan proyek, melakukan eksekusi penjaminan yang handal, memberi konsultasi dan edukasi kepada pihak terkait, serta memberi masukan terhadap berbagai regulasi terkait.

The execution of the 2010 strategy to achieve the Company's vision and mission may be described in the following:

In the Set-up Stage, already begun since 2010, the Company will focus on Customer Orientation, as well as the development of internal resources through Internal Orientation, Learning Orientation and Growth Orientation.

In this stage, the Company also pays attention to the aspect of guarantee capacity, primarily underwriting capital, which is being raised together with the shareholders, by involving the support of various world-renowned multilateral agencies and financial institutions.

For learning and Growth Orientation, the principal strategies that will be implemented, among others, are to improve the capability of human resources, including the formulation of Key Performance Indicators for each individual, and to develop an Information System to support business process.

The strategies within the scope of Internal Orientation, among others, are building the Company's capacity, an appraisal process that is transparent and timely, setting an underwriting fee policy, optimal funds management and meeting obligations to the stakeholders, such as timely reporting and the creation of a risk allocation matrix.

Strategies within the scope of Customer Orientation include, among others, underwriting that ensures the customers' projects are more bankable. Moreover, the Company also proactively seeks to develop its project underwriting portfolio, execute reliable underwriting, give consultation and education to related parties, and provide input on various related regulations.

Jejak Langkah Milestones

30 Desember 2009, Pendirian PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Pada tanggal 30 Desember 2009 Pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan penjaminan yang diberi nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII. Pendirian PII dilaksanakan dengan penandatanganan akte pendirian oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Bapak Hadiyanto pada tanggal 30 Desember 2009. Pendirian perusahaan ini merupakan bagian dari implementasi komitmen percepatan pembangunan infrastruktur yang juga menjadi salah satu pelaksanaan program 100 hari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. PII didirikan sebagai sebuah BUMN dan dijalankan secara independen serta dikelola secara profesional untuk menjadi penyedia penjaminan yang kredibel yang mampu meningkatkan kelayakan kredit bagi proyek infrastruktur KPS.

December 30, 2009, Establishment of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

On December 30, 2009, the government of Indonesia established a guarantee provider company, called the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) or PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII). This was executed through the signing of the deed of establishment by the Director General of State Assets, Mr. Hadiyanto, on that date. The establishment of the company is part of the implementation of the commitment to expedite infrastructure development, which is also part of the 100-day program of the 2nd Indonesia United Cabinet. IIGF was established as a State-Owned Enterprise (BUMN), which is run independently and managed professionally to become a credible guarantee provider, which can improve the creditworthiness of PPP Projects in infrastructure.

11 Mei 2010, Peluncuran

Setelah pendirian PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) pada bulan Desember 2009, operasional perseroan secara resmi diluncurkan pada tanggal 11 Mei 2010. Kehadiran PII diharapkan akan mendorong masuknya pendanaan dari swasta untuk sektor infrastruktur di Indonesia melalui peningkatan kelayakan kredit (*creditworthiness*) proyek yang dapat berdampak pada penurunan *cost of fund* terhadap proyek infrastruktur tersebut. PII diharapkan dapat menjawab salah satu kekhawatiran swasta atas risiko berinvestasi pada proyek infrastruktur publik yang umumnya memiliki jangka waktu 15 hingga 25 tahun, khususnya yang terkait dengan risiko yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah. Peluncuran PII dilakukan secara resmi oleh Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani Indrawati dan disaksikan oleh berbagai pihak dari dalam dan luar negeri.

May 11, 2010, Grand Launching

After the establishment of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund in December 2009, the company's operations were formally launched on May 11, 2010. The presence of IIGF is expected to encourage the entry of private funding into the infrastructure sector in Indonesia by improving projects' creditworthiness, which in turn will reduce the cost of fund of the infrastructure projects. IIGF is expected to be able to respond to one of the concerns of private parties towards investment risks in public infrastructure projects, which generally have a time frame of 15 to 25 years, particularly regarding risks that occur due to changes in governmental policies. The grand launching of IIGF was inaugurated by the then Minister of Finance, Dr. Sri Mulyani Indrawati, witnessed by many important parties from Indonesia and abroad.

21 Desember 2010, Terbitnya Peraturan Presiden No.78/2010

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur menandakan dimulainya era baru proses penjaminan infrastruktur di Indonesia. Perpres ini ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Desember 2010 dan merupakan salah satu regulasi kunci sebagai pelengkap dari Perpres No. 13 tahun 2010 jo Perpres No. 67 tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Perpres ini mengokohkan status dan keberadaan PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 13 Tahun 2010 jo Perpres No. 67 tahun 2010 tersebut.

December 21, 2010, Issuance of Presidential Regulation No. 78/2010

A new era in infrastructure guarantees in Indonesia began with the issuance of Presidential Regulation No. 78/2010, regarding Infrastructure Guarantee in Public-Private Partnership Projects (PPP) between the Government and Business Entities, executed through Infrastructure Guarantee Business Entity. The presidential regulation, signed by President Susilo Bambang Yudhoyono on December 21, 2010, is one of the key regulations that complement Presidential Regulation No. 13/2010, in conjunction with Presidential Regulation No. 67/2010, concerning PPP. The issuance of these regulations validates the status and existence of IIGF as an Infrastructure Guarantee Business Entity, as defined in Presidential Regulation No. 78/2010.

31 Desember 2010, Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2010 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 78 tahun 2010.

December 31, 2010, Issuance of the Regulation of the Minister of Finance No. 260/2010

On December 31, 2010, the Minister of Finance issued Minister of Finance Regulation No. 260/PMK.011/2010 concerning Operational Guidelines in the Guaranteeing of Infrastructures in Public-Private Partnership Projects, between the Government and Business Entities as the implementing regulation for the Presidential Regulation No. 78/2010.

15 Maret 2011, Terbitnya Pernyataan Kesediaan Penjaminan dan Penyerahan Draft Final Perjanjian Penjaminan Proyek PLTU Jawa Tengah

PII menyampaikan Pernyataan Kesediaan Penjaminan dan draft final *Guarantee Agreement* kepada PLN pada tanggal 15 Maret 2011, yang kemudian oleh PLN disampaikan kepada para Peserta Lelang sebagai bagian dari dokumen tender final. Penyampaian draft final *Guarantee Agreement* oleh PII kepada PLN sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam proyek CJPP menandakan efektifnya model bisnis penjaminan Pemerintah yang baru, yaitu melalui PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur berdasarkan Perpres No.78 tahun 2010. Konsep *Guarantee Agreement* ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penjaminan lainnya di masa depan yang akan diberikan oleh PII.

March 15, 2011, Issuance of In-Principle Approval for Guarantee and Submission of Final Draft Guarantee Agreement of the Central Java Power Plant Project (CJPP)

IIGF submitted the 'In-Principles' Approval for Guarantee and the final draft of the Guarantee Agreement to PLN on March 15, 2011, which in turn is distributed by PLN to the Bid Participants as part of the final tender document. IIGF's submission of the final draft of the Guarantee Agreement to PLN as the Contracting Agency of the CJPP Public-Private Partnership Project marks the effectiveness of the new government guarantee business model, i.e. through IIGF as the Infrastructure Guarantee Business Entity in accordance with the Presidential Regulation No. 78/2010. The Guarantee Agreement concept will be a reference for other guarantees provided by IIGF in the future.

31 Maret 2011, Terbitnya Acuan Alokasi Risiko dan Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010 yang mengamanatkan PII untuk menerbitkan acuan mengenai Kategori dan Distribusi Risiko Infrastruktur yang akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Proyek infrastruktur Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), PII meluncurkan Acuan Alokasi Risiko (*Risk Allocation Guideline*) pada tanggal 31 Maret 2011. Dalam proses penyusunannya, Acuan Alokasi Risiko ini telah melalui proses konsultasi publik dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan yang terkait, antara lain Kementerian Keuangan, Bappenas, BKPM, PJP (Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah), investor/ pengembang, perbankan/ lembaga keuangan, lembaga multilateral, dan pihak-pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang Risiko Infrastruktur. Bersamaan dengan itu, PII juga meluncurkan Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur yang bertujuan untuk memberikan ilustrasi langkah-langkah dalam proses pemberian penjaminan infrastruktur oleh PII.

31 March 2011, Publication of Risk Allocation Guideline and Infrastructure Guarantee Provision Guideline

In accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 260/PMK.011/2010, which mandates IIGF to issue a reference concerning Infrastructure Risk Categories and Distributions for parties that are involved in Public-Private Partnerships (PPP), IIGF launched the Risk Allocation Guideline on March 31, 2011. In the process of its creation, the Risk Allocation Guideline has undergone the process of public consultancy through engaging various relevant stakeholders in discussions; such as Ministry of Finance, National Development Planning Agency (Bappenas), Indonesia Investment Coordinating Board (BPKM), Contracting Agencies (Ministries and Local Government), investors/developer, banks/financial institutions, Multilateral Development Agencies, and other parties with competence in infrastructure risks. At the same time, IIGF also launched Infrastructure Guarantee Provision Guideline, in order to provide a step-by-step illustration of the infrastructure guarantee provision process by IIGF.

Peristiwa Penting

Important Events in 2010

Melakukan konsultasi dengan PJKP (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama / *Contracting Agency*), antara lain dengan Dinas Pemukiman dan Persampahan Jawa Barat, Walikota Bandung, Pemkot Bandar Lampung, BPPSPAM, Ditjen Kereta Api, Ditjen Cipta Karya, Pemprov Jatim, Pemprov DKI, Pemkab Maros, Pemkot Tangerang.

Consulting with Contracting Agencies including Office of Settlements and Waste Management of West Java, Mayor of Bandung, Bandar Lampung City Government, National Water Regulatory Agency (BPPSPAM), Director General of Railways, Directorate General of Public Works, Provincial Government of East Java, Government of Special District of Jakarta, Maros Regency, Tangerang City Government.



Melakukan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk instansi pemerintah, lembaga donor dan multilateral yang relevan. Instansi/lembaga tersebut antara lain Bappenas, BKPM, Indll, *Japan International for Cooperation Agency* (JICA), *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA), *Asian Development Bank* (ADB) dan *World Bank*.

Consulting with various stakeholders, including Government Institutions, Donor Agencies and relevant Multilateral Development Agencies. They include the National Development Planning Agency (Bappenas), Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), Indll, Japan International for Cooperation Agency (JICA), Multilateral Investment Agency (MIGA), Asian Development Bank (ADB) and the World Bank.



Fasilitasi penandatanganan MOU antara Pemkot Bandar Lampung, PDAM Bandar Lampung, BPPSPAM, *World Bank* dan *Singapore Cooperation Enterprise* terkait implementasi proyek Penyediaan Air Bersih Way Rilau, kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, di *World Bank Asia Infrastructure Summit* (Singapura).

Facilitating MOU signing between Bandar Lampung City Government, PDAM Bandar Lampung, BPPSPAM, World Bank and Singapore Cooperation Enterprise on the implementation of Way Rilau Clean Water Project, Bandar Lampung, Lampung Province, at the World Bank Asia Infrastructure Summit (Singapore).

Melakukan *Screening* proyek, yaitu untuk proyek air bersih kota Bandar Lampung dan proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

Undertake Project Screening, i.e. drinking water project in Bandar Lampung and toll-road project linking Medan, Kualanamu-Tebing Tinggi.



Ikhtisar Keuangan 2010

2010 Financial Highlights

Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik dalam Laporan Tahunan ini menggunakan notasi Bahasa Inggris
Numerical notations in all tables and graphs in this Annual Report are in English

Financial Highlights		Rp000
Pendapatan	Operating Revenue	61,685,663
Beban	Expenses	16,220,264
Laba Usaha	Operating Income	45,465,399
Laba Bersih	Net Income	46,597,011
Neraca		Balance Sheet
Aset	Assets	2,052,921,455
Kewajiban	Liabilities	6,324,444
Ekuitas	Equity	2,046,597,011
Laporan Arus Kas		Cash Flow Statement
Arus Kas Operasi	Cash Flow from Operations	38,707,348
Arus Kas Investasi	Cash Flow from Investments	1,034,564,063
Arus Kas Pembiayaan	Cash Flow from Financing	2,000,000,000
Investasi Pengelolaan Dana	Investment Fund Placements	1,031,853,846
Ratio		Ratio
Marjin Laba Usaha	Operating Profit Margin	73.7%
Marjin Laba Bersih	Net Profit Margin	75.5%
ROE	ROE	4.2%

Laporan Dewan Komisaris

Report from the Board of Commissioners



Freddy Rikson Saragih

President Commissioner | Komisaris Utama

Laporan ini merupakan laporan tahunan pertama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PII. Kami bersyukur dapat melaporkan kepada segenap pemangku kepentingan bahwa PII berhasil mencapai kemajuan yang menggembirakan dalam tahun operasionalnya yang pertama.

This is the first annual report presented by PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), or the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF). I am pleased to report to the stakeholders that IIGF has made encouraging progress in its first year of operations.

PII merupakan badan usaha yang memiliki misi dan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan Indonesia ke depannya. PII merupakan instrumen fiskal dari Pemerintah Indonesia untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang merupakan kunci pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran.

Di Indonesia, pembangunan dan peningkatan infrastruktur seperti penyediaan listrik, air bersih, sarana dan prasarana transportasi, jaringan telekomunikasi, dan sebagainya merupakan kunci utama penunjang pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai menjadi kunci kemajuan dan kesejahteraan sosial suatu bangsa melalui peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Pemerintah Indonesia telah memperkirakan bahwa dari tahun 2010 hingga 2014, investasi pembangunan infrastruktur dapat mencapai Rp1.924 triliun (sekitar US\$214 miliar). Dari jumlah tersebut, Pemerintah hanya dapat menyediakan sekitar Rp560 triliun. Anggaran belanja daerah dan BUMN diperkirakan dapat menyisihkan sekitar Rp700 triliun. Oleh karenanya masih tersisa sekitar Rp700 triliun lagi yang kiranya hanya dapat diperoleh melalui partisipasi sektor swasta.

Satu skema untuk menarik modal swasta ke investasi di bidang infrastruktur adalah melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Sesungguhnya konsep KPS telah dikenal selama beberapa dasawarsa, dan hingga kini masih diandalkan oleh berbagai negara dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di seluruh dunia. Namun demikian, skema KPS atau yang juga dikenal sebagai *Public-Private Partnership* (PPP) bukan tanpa tantangan maupun hambatan.

Salah satu tantangan tersebut, sejauh pengalaman di negara lain telah menunjukkan, adalah bagaimana mengubah paradigma penyediaan layanan infrastruktur secara konvensional melalui anggaran belanja negara menjadi paradigma kemitraan (*partnership*) antara sektor publik dan sektor swasta serta memahami proses penyiapan dan transaksi proyek untuk dapat memperoleh struktur proyek yang *bankable*. Hal ini bukan suatu hal yang mudah dan tentunya membutuhkan waktu dan kerja keras dari berbagai pihak, karena merupakan kunci utama keberhasilan implementasi skema KPS untuk penyediaan infrastruktur.

Dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi KPS infrastruktur, PII didirikan untuk memberi penjaminan terhadap risiko yang terkait dengan tindakan pemerintah atau risiko politik yang terdapat pada proyek infrastruktur dengan skema KPS. Diharapkan kelayakan kredit dari proyek yang memperoleh penjaminan dari PII akan meningkat sejalan dengan menurunnya persepsi

IIGF is an institution whose mission and roles are extremely important for the future growth of Indonesia. IIGF is a fiscal instrument of Government of Indonesia to support the acceleration of infrastructure development in Indonesia which is a key to economic growth and prosperity.

In Indonesia, the development and improvement of infrastructure, such as power plants, clean water, transportation, telecommunications networks and others are critical to sustainable economic growth and national development. Proper basic infrastructure is a key of a nation's development and social welfare to improve the quality of life of the people.

The Government of Indonesia estimates that between 2010 and 2014, investments in infrastructure-related developments could reach Rp1.924 trillion (approximately US\$214 billion). Of that amount, the national budget could cover approximately Rp560 trillion. Provincial budgets and state-owned companies could be expected to contribute some Rp700 trillion. That still leaves a requirement for roughly Rp700 trillion of investment that could only be met through private participation.

One scheme in attracting private capital to infrastructure investments is through Public-Private Partnership (PPP). Indeed, the concept of PPP in infrastructure development has been around for decades, and remains a major initiative in many countries in promoting development and social welfare around the world. But PPP is not without its hurdles and challenges.

One of these challenges, as far as other countries' experience is concerned, is how to change the paradigm of conventional provision of infrastructure services through the State Budget to become the paradigm of partnership between public and private sector. It also needs an understanding of the process of project preparation and transaction to make the project structure bankable. This is not something easy and certainly takes time and requires hard work from various parties, as this is the key to successful implementation of PPP schemes for infrastructure provision.

In order to support the implementation of Public Private Partnership in infrastructure, IIGF has been established to provide guarantees against risks that are related to government's action or political risks that are associated with the infrastructure projects under PPP scheme. It is expected that the creditworthiness of the guaranteed projects will increase and the uncertainty perception of

ketidakpastian proyek terhadap risiko politik tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, PII harus melaksanakan proses penyediaan penjaminan secara independen dan profesional. Karenanya, PII dibentuk sebagai suatu perseroan terbatas yang dipimpin dan dikelola oleh eksekutif bisnis yang berpengalaman dan sebagian besar berasal dari sektor swasta, dengan mandat untuk mengedepankan sikap yang lebih profesional disertai oleh pola pikir pemodal swasta dalam penanganan proyek infrastruktur.

Sesuai dengan amanat regulasi, PII sebagai BUPI merupakan pelaksana tunggal dalam penyediaan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur KPS di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, PII telah menetapkan kriteria utama bahwa proyek yang dapat dijamin harus memiliki struktur proyek yang baik. Dilihat dalam konteks tersebut, mengacu kepada tujuan pendiriannya, diharapkan PII dapat menawarkan nilai tambah melalui penjaminan risiko proyek infrastruktur yang diberikan.

Sebagai institusi yang baru didirikan, memenuhi harapan di atas tentunya tidak mudah; sehingga Dewan Komisaris sangat menghargai kemajuan yang berhasil dicapai PII dalam tahun pertamanya beroperasi. Dalam waktu singkat sejak pendiriannya, beberapa capaian yang penting yang patut dicatat dari Direksi dan seluruh jajaran PII antara lain:

1. Menyediakan penjaminan untuk sebuah transaksi penting yaitu proyek PLTU Jawa Tengah ("proyek CJPP"), yang merupakan proyek KPS sektor listrik yang terbesar di Asia Tenggara (dengan kapasitas 2x1000MW) dan menjadi pionir dalam penggunaan skema penjaminan yang baru.
2. Membuat model Perjanjian Penjaminan, Perjanjian Regres dan proses penstrukturan proyek yang dapat diterapkan pada proyek KPS lainnya, termasuk struktur penjaminan bersama dengan Pemerintah.
3. Dalam satu tahun operasi, PII telah menjajaki kemungkinan penyediaan penjaminan untuk setidaknya 9 (sembilan) proyek infrastruktur.
4. Berhasil menerbitkan kebijakan dan model untuk mendukung proses penjaminan antara lain: *Pricing & Risk Exposure Assessment*, *Guarantee Provision* dan *Corporate Operational Policies* termasuk *Operations Manual*, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Kebijakan Pengadaan, serta Kebijakan SDM.
5. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Multilateral.
6. Berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk Laporan Keuangan 2010 dari Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi internasional; dan PII dianggap memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dihasilkan dari audit kepatuhan oleh Kantor Akuntan Publik yang sama.

Dewan Komisaris mengucapkan selamat kepada Manajemen beserta segenap staf PII atas pencapaian yang luar biasa

the project's political risks decrease. To meet the desired objective, IIGF shall carry out the guarantee provision process independently and professionally. It is the reason why IIGF is established as a limited-liability business entity, led and managed by experienced business executives mostly from the private sector, with the mandate to introduce greater professionalism as well as private business insights in undertaking infrastructure projects.

As mandated by regulation, IIGF as Infrastructure Guarantee Business Entity serves as a single window processor in the provision of government guarantees for PPP projects in infrastructure in Indonesia. In performing this duty, IIGF has set the main criteria that a project qualified to be guaranteed is one with good project structure. In that context, referring to the purpose of its establishment, IIGF is expected to offer added value through the infrastructure project guarantee it provides.

As a new institution, to meet those expectations is not easy, but the Board of Commissioners is delighted by IIGF's progress in its first year of operations. In the short period of time since its establishment, various key achievements of the Board of Directors and IIGF's staff include:

1. Provide guarantee for a high profile transaction, i.e. the CJPP Project, the biggest IPP under the PPP scheme in Southeast Asia (Capacity 2 x 1000 MW) and the pioneer in the new guarantee scheme.
2. Provide model of Guarantee Agreement, Recourse Agreement and structuring process for projects that can be replicated in other PPP projects, including the co-guarantee structure with the government.
3. At least nine (9) projects in the pipeline within a year.

"IIGF has set the main criteria that a project qualified to be guaranteed is one with a good project structure."

“PIL menetapkan kriteria utama bahwa proyek yang dapat dijamin harus memiliki struktur proyek yang baik.”

tersebut, dan bahwasanya hanya selang setahun sejak didirikannya, PIL telah melangkah cepat serta berhasil menyelesaikan sasaran yang dicanangkan untuk tahun 2010.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pemangku kepentingan Perseroan, terutama Dewan Perwakilan Rakyat RI yang telah mendukung pembentukan dan misi PIL. PIL saat ini merupakan organisasi yang masih berkembang. Namun demikian kami meyakini secara penuh kemampuan PIL untuk dapat mengemban misinya secara efektif dengan penuh integritas. Untuk itu, dukungan maupun kepercayaan segenap pihak akan sangat membantu langkah PIL di masa depan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemajuan serta kemakmuran bangsa Indonesia.

4. Successfully establish policy and model to support robustness of the guarantee provision process, among other achievements: Pricing & Risk Exposure Assessment, Guarantee Provision Policy and Corporate Operational Guidelines which include Operation Manual, Corporate Governance Policy, Procurement Policy, as well as HR and Office Policy.
5. Expand possible leverage with Multilateral Agencies.
6. Acquire an unqualified opinion for the 2010 Financial Statement by a reputable international Accounting Firm; and IIGF is deemed to be in full compliance with all regulations as stipulated in the result of the Compliance Audit by the same Accounting Firm.

The Board of Commissioners congratulates IIGF's management and all staff for their remarkable achievements in successfully achieving all the targets set for 2010.

Finally, I would like to thank all of the stakeholders, especially the House of Representatives of the Republic of Indonesia, who has been instrumental and supportive of IIGF's mission and goals. IIGF is currently an organization still in its infancy. However, we have every confidence in its ability to carry out its mission with integrity and in an exemplary manner. All of your supports are crucial for IIGF's further steps in backing up the acceleration of infrastructure development as the key of the economic growth and the prosperity of Indonesia.

Laporan Direksi

Report from the Board of Directors



Sinthya Roesly

President Director | Direktur Utama

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII), didirikan pada 30 Desember 2009 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan mandat sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk memberikan penjaminan atas Risiko Infrastruktur yang terdapat pada proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Kami berupaya keras agar PII dapat melaksanakan mandatnya dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memberi manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi infrastruktur dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), founded on December 30, 2009, by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, with mandate as a fiscal instrument to provide guarantee against political risks for infrastructure projects under the Public Private Partnership (PPP) scheme. We strive to ensure that IIGF is able to fulfil its mandate as best as possible and will serve the interests of many parties who are involved in infrastructure investments and ultimately support the economic growth of Indonesia.

Tahun 2010 merupakan tahun yang sangat padat bagi organisasi baru seperti PII. Di akhir tahun 2010, total karyawan PII berjumlah 16 orang, dengan dua komisaris dan tiga direktur eksekutif. Secara perlahan dan pasti kami telah membangun landasan operasional perusahaan dan telah siap untuk melaksanakan tugas dan mandat yang diemban.

Hingga Akhir 2010 kami telah menyusun rencana strategik perusahaan, menetapkan panduan operasi PII, tata kelola perusahaan, indikator kinerja manajemen, jenjang otoritas, kebijakan investasi, kebijakan pengadaan maupun kebijakan dan acuan operasional lainnya yang dibutuhkan perusahaan sejenis.

Kami telah berhasil merumuskan arah strategik perusahaan secara jelas – sebuah peta yang memandu arah pertumbuhan ke dalam empat fase hingga lebih dari lima tahun berikutnya.

Terkait dengan panduan dan acuan operasional, penyusunan dilakukan dengan kerjasama serta bantuan teknis dari institusi terkemuka serta konsultasi dengan pasar dan pemangku kepentingan utama untuk memastikan terciptanya tata kelola dan proses bisnis yang kredibel, transparan dengan kaidah-kaidah yang dapat diterima oleh pasar.

Dalam mengarungi tahun pertama operasional perseroan, disamping tantangan untuk membangun fondasi bisnis dan kapasitas institusi, tantangan utama lainnya yang dihadapi Perseroan adalah meyakinkan para pemangku kepentingan, khususnya PJPK dan investor/penyedia dana, akan peran dan fungsi PII dalam mendukung keberhasilan proyek KPS infrastruktur sehubungan dengan adanya konsep dan mekanisme penjaminan yang sama sekali baru dengan keberadaan PII.

Namun demikian, tantangan ini dapat diatasi secara bertahap melalui komunikasi dan interaksi yang cukup intensif dengan berbagai pihak terkait.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menguraikan beberapa capaian utama Perseroan selama tahun 2010 hingga penulisan laporan tahunan ini, yaitu sebagai berikut:

- Kami telah menerbitkan Pernyataan Kesediaan Penjaminan Proyek PLTU Jawa Tengah (Proyek CJPP) dan telah menyampaikan draft final Perjanjian Penjaminan kepada PLN pada tanggal 15 Maret 2011. Kami harapkan bahwa Perjanjian Penjaminan untuk Proyek CJPP dapat ditandatangani pada pertengahan tahun 2011.

It was an extremely busy year for IIGF as a start-up organization. By year-end 2010, total Company head count was 16, with two commissioners and three executive directors. Slowly but surely, we managed to undertake our operational groundwork and ready to execute our duty and mandate.

Until the end of 2010, we have laid down our corporate strategic plan, established our operations manual, corporate governance guidelines, performance indicators for management, lines of authority, investment policy and procurement policy, and other policies and operational standards required by similar company.

We have charted a clear course of corporate strategic plan - a road-map that envisages development over four phases through to more than five years to come.

On the operational guidelines, the preparation was done with the cooperation and technical assistance from leading institutions and with the market as well as key stakeholders' consultation to ensure having credible and transparent governance and business processes with market accepted norms.

In the first year of operations, in addition to the challenge of building business foundation and institutional capacity, another major challenge faced by IIGF is to convince the stakeholders, mostly the Contracting Agencies and investors/lenders, on the role and function of IIGF in supporting the PPP infrastructure project delivery due to an entirely new mechanism with the presence of IIGF.

However, the challenge can be overcome gradually through intensive communication and interaction with the various related parties.

In this precious moment, I would like to highlight company's achievements in 2010 up until the publication of this annual report, they are:

- We have issued the In-Principle Approval for the CJPP Project and has submitted the final draft of the Guarantee Agreement to PLN on March 15, 2011. We expect that the Guarantee Agreement can be signed in mid 2011.

- Dengan pengalaman proses penjaminan Proyek CJPP, kami dapat menyajikan suatu model proses penjaminan dan penstrukturan yang dapat direplikasi untuk diterapkan pada proyek KPS lainnya.
- Saat ini, PII juga telah memulai persiapan dengan para PJPk proyek-proyek infrastruktur dari berbagai sektor, dimana koordinasi secara intensif tengah dilaksanakan sehingga para PJPk dapat mempersiapkan Usulan Penjaminan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Beberapa kebijakan dan panduan penting juga sudah kami selesaikan, seperti: *Pricing & Risk Exposure Assessment* dan berbagai *Corporate Operational Policies*, termasuk *Operations Manual*, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Kebijakan Pengadaan, serta Kebijakan SDM dan Kantor, disamping diterbitkannya Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur dan Acuan Alokasi Risiko.
- Selama tahun 2010, pendekatan yang intensif juga dilakukan terhadap berbagai lembaga multilateral dan institusi internasional relevan lainnya termasuk Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, *Temasek Foundation/Singapore Cooperation Enterprise* (SCE), *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA), *Partnership Victoria* (PV), *Infrastructure Australia* (IA), *University New South Wales* (UNSW) dan lain-lain. Bank Dunia dan juga SCE, telah memberikan bantuan teknis dalam pengembangan prosedur appraisal, tata kelola perusahaan dan fungsi penting lainnya di PII.
- Laporan Keuangan PII untuk tahun buku 2010 juga telah menerima opini wajar tanpa pengecualian dari Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi internasional.
- With the experience of the guarantee provision process of the CJPP project, IIGF is able to provide a model of the guarantee agreement and structuring process that can be replicated into other PPP projects.
- IIGF has started preparations with the CAs of various infrastructure projects, in which intensive coordination is also underway to enable those CAs to prepare the Guarantee Proposal based on the requirements.
- Various key policies and guidelines have been completed, such as Pricing & Risk Exposure Assessment, and Corporate Operational Policies which includes Operations Manual, Corporate Governance Policy, Procurement Policy, as well as HR and Office Policy, in addition to the issuance of Guarantee Provision Guideline and Risk Allocation Guideline.
- Within the year of 2010, intensive engagement activities have been made with Multilateral Development Agencies and other relevant international institutions, such as the World Bank (WB), ADB, Temasek Foundation/Singapore Cooperation Enterprise (SCE), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Partnership Victoria (PV), Infrastructure Australia (IA), University of New South Wales (UNSW), and others. World Bank and Singapore Cooperation Enterprise have provided technical assistance in the development of the appraisal procedures, corporate governance and other critical functions of the IIGF.
- The IIGF Financial Statements for the year 2010 have received an unqualified opinion from an internationally reputable accounting firm.

Pada saat yang bersamaan, kami juga menyelenggarakan program *sustainable institutional capacity building* melalui kerjasama dan pelatihan dengan universitas dan berbagai pihak terkemuka, termasuk Bank Dunia, *Temasek Foundation/Singapore Cooperation Enterprise* (SCE), UNSW, *Partnership Victoria*, *Infrastructure Australia*, dan MIGA.

Pada akhir tahun 2010, Perseroan memiliki modal disetor sebesar Rp2,0 trilyun. Selain itu, Perseroan juga sedang memproses kerjasama Fasilitas Penjaminan dengan peringkat AAA dari Bank Dunia sebesar US\$480 juta, sebagai bagian dari operasionalisasi penjaminan PII.

Dengan basis kapasitas penjaminan saat ini, PII siap memasuki tahun 2011 untuk mengkaji dan mengevaluasi beberapa proyek potensial. Proyek-proyek tersebut antara lain dua proyek air minum kota Bandar Lampung dan di provinsi Jawa Timur, proyek kereta api yang melayani pusat kota Jakarta dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, proyek jalan raya bebas hambatan yang

At the same time, we also undertook the so-called sustainable institutional capacity building program through cooperation with leading global universities and other agencies, including the World Bank, Temasek Foundation/Singapore Cooperation Enterprise (SCE), UNSW, Partnership Victoria, Infrastructure Australia, and MIGA.

“At the same time, we also undertook the so-called sustainable institutional capacity building program through cooperation with leading global universities and other agencies”

“Pada saat yang bersamaan, kami juga menyelenggarakan program *sustainable institutional capacity building* melalui kerjasama dengan universitas dan berbagai pihak terkemuka”

menghubungkan Medan dengan bandara internasional terbarunya di Kuala Namu, dan beberapa proyek air minum lainnya, proyek jalan raya bebas hambatan, serta proyek sampah baik di Jawa maupun luar Jawa. Secara bersamaan, total investasi proyek-proyek tersebut diperkirakan bernilai lebih dari Rp50 triliun, atau kurang dari sepersepuluh dari perkiraan kebutuhan investasi Indonesia dari sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur selama beberapa tahun ke depan.

Kelanjutan pemrosesan proyek-proyek potensial tersebut akan sangat bergantung pada berbagai hal, utamanya komitmen PJPK selaku pemilik proyek. Beberapa diantara proyek-proyek yang telah memasuki tahap persiapan lebih lanjut menyusul adanya permintaan tertulis dari PJPK adalah proyek air minum di Jawa dan Sumatera, serta proyek jalan tol di Sumatera.

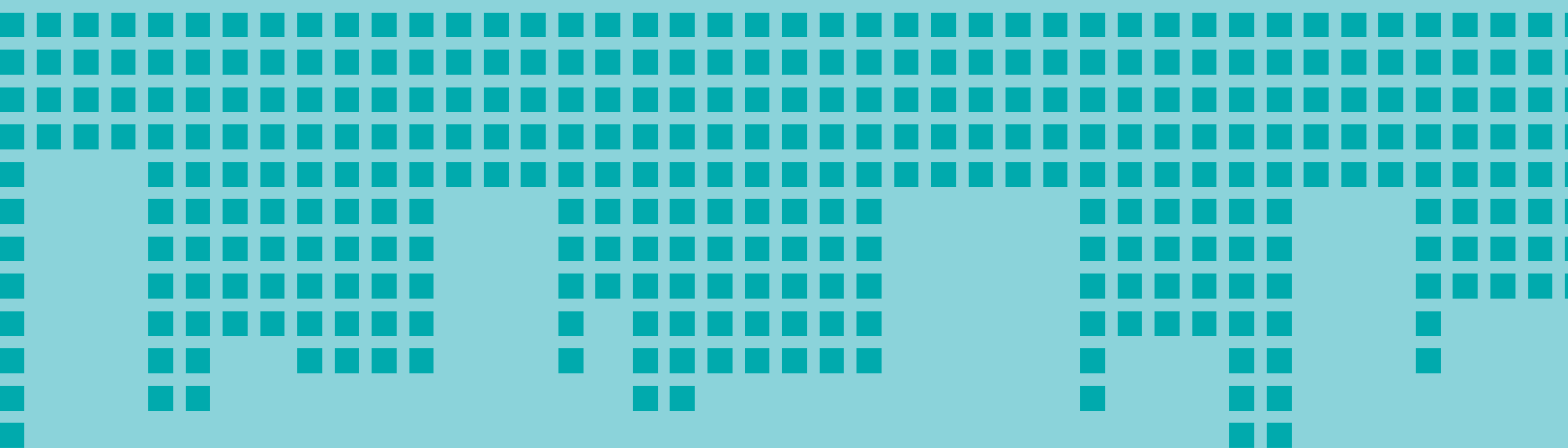
Setahun merupakan waktu yang sangat pendek untuk mengukur berbagai prestasi. Dalam setahun beroperasi, berbagai pencapaian dan kemajuan telah berhasil diraih. Meskipun berbagai hal telah dilakukan, masih banyak lagi yang perlu diupayakan oleh PII dan tentu saja membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Saya yakin dengan kerjasama yang baik dan semangat yang sama untuk kemajuan bersama, berbagai tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat diatasi. Pencapaian tersebut merupakan hasil profesionalisme dan dedikasi dari karyawan PII serta adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pemangku kepentingan. Atas nama PII, saya mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham untuk dukungan yang terus diberikan, kepada Dewan Komisaris atas bimbingannya, serta para mitra atas kerjasama dan komitmennya untuk bersama-sama dengan PII mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

At the end of year 2010, the Company had a total paid-in capital of approximately Rp2.0 trillion. In addition, IIGF is in the process of obtaining an AAA-rated guarantee facility from the World Bank in the amount of US\$480 million.

On the basis of our current guarantee capacity, IIGF looks ahead to 2011 and ready to review and appraise several potential projects. Those projects include two drinking water projects in Bandar Lampung and East Java Province, railway project between downtown Jakarta and the Soekarno-Hatta International Airport, toll road project linking Medan to its new international airport at Kualanamu and other water projects, toll-road projects, as well as waste water and waste disposal in Java and outside Java. Altogether, projects in the pipeline account for an estimated investment of more than Rp50 trillion, less than one-tenth of Indonesia's projected investment requirements from private sector for infrastructure development for the next several years.

Further processes of those potential projects depends very much on many conditions, mostly on the commitment of CA as the project owner. Several projects which have entered further preparation steps following the written request from the CAs, including water projects in Java and Sumatra, and a toll-road project in Sumatra.

One year is an extremely short period of time to measure achievements. We have managed to clinched many achievements within a year. Despite many things have been done, many more are still required to be done by IIGF and of course these need support from various stakeholders. I am confident that with a solid cooperation and having the same spirit for collective advancement, various challenges in infrastructure development in Indonesia can be tackled. Our few but meaningful achievements over the past year are owed to the professionalism and dedication of our staff, not to mention the cooperation and supports from our key stakeholders. On behalf of IIGF, I would also like to thank our shareholders for their continued support, the Board of Commissioners for their valuable guidance and also our many business partners for their engagement and commitment to move forward with IIGF in accelerating infrastructure development in Indonesia.



Kerangka Regulasi

Regulatory Framework

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) didirikan dan beroperasi dengan mengacu kepada berbagai Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur, serta penyediaan penjaminan bagi proyek pembangunan infrastruktur, yaitu:

- Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, serta Peraturan Presiden No. 13 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres No.67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Peraturan Presiden No. 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.
- Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.
- Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

The Indonesia Infrastructure Guarantee Fund is established and operates with reference to various government regulations which govern the implementation of a partnership undertaking between the government and the private sector in infrastructure development, as well as the provision of guarantees for infrastructure development projects, i.e.:

- Presidential Regulation No.67/2005 and its amendment, Presidential Regulation No.13/2010 on Public-Private Partnership in Infrastructure Development.
- Presidential Regulation No.78/2010 on Infrastructure Guarantee in Public-Private Partnership Provided Through Infrastructure Guarantee Fund.
- Finance Minister Regulation No.260/2010 on the Implementing Guideline for Infrastructure Guarantees in Public-Private Partnership.
- Government Regulation No.35/2009 on State Capital Injection for the Establishment of a State-Owned Enterprise Operating in Infrastructure Guarantee Provision.
- Government Regulation No. 88/2010 on Additional State Capital Injection for the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.



Infrastruktur di Indonesia

Infrastructure in Indonesia

Secara umum permasalahan infrastruktur di Indonesia adalah masih belum memadainya kondisi dan jumlah infrastruktur dibandingkan dengan cakupan luas wilayah yang harus dilayani, serta dalam mendukung tingkat daya saing global yang lebih tinggi. Berdasarkan laporan *World Economic Forum* tahun 2009 terjadi peningkatan peringkat daya saing infrastruktur Indonesia, dari peringkat 96 pada tahun 2008 menjadi peringkat ke 84 pada tahun 2009, namun peringkat tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang menempati peringkat ke 27, dan Thailand di peringkat ke 41.

Permasalahan dan tantangan lainnya adalah belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana di wilayah terpencil dan pedalaman. Upaya pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDG's) pada tahun 2015 masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi proporsi separuh penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang aman.

In general, Indonesia's infrastructure problems stem from the inadequate condition and insufficient amount of infrastructure compared to the area that needs to be serviced; thus, the current infrastructure is unable to support a higher global competitiveness. Based on the 2009 World Economic Forum report, Indonesia has improved its infrastructure competitiveness rank from 96th in 2008 to 84th in 2009. However, this is still far below the achievement of neighboring countries, such as Malaysia (27th) and Thailand (41st).

Other issues and challenges include inadequate accessibility and service coverage to infrastructure in remote areas. More efforts are needed to reach the Millennium Development Goals (MDGs), in which the proportion of the population who still have no access to clean water and sanitation should be halved by 2015.

Keterbatasan pendanaan pemerintah untuk membiayai infrastruktur yang diperkirakan sebesar Rp1.924 triliun dari tahun 2010 hingga 2014 menyebabkan pemerintah perlu mencari alternatif pendanaan proyek infrastruktur. Salah satu yang menjadi pilihan pemerintah adalah dengan melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta, dimana badan usaha swasta bertanggungjawab untuk mendisain, membangun, mengoperasikan dan mendanai fasilitas infrastruktur. Atas pelayanan infrastruktur tersebut pengguna atau Pemerintah akan membayar dalam bentuk tarif/ ongkos dan pada akhir masa konsesi asset dapat diserahkan kepada pemerintah.

Arah kebijakan infrastruktur Indonesia adalah untuk: meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung peningkatan daya saing sektor riil, dan meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

The government can only fund a limited part of the infrastructure needs estimated at Rp1,924 trillion by 2014, so alternatives to fund infrastructure projects are important. One of the options taken by the government is through collaboration with private corporations, which will be responsible for the design, construction, operation, and funding of infrastructure facilities. Users or government will pay in the form of tariffs/fees to use the infrastructure service, and at the end of the concession period, the assets can be handed over to the government.

Indonesia's infrastructure policy is aimed at: improving infrastructure service in line with the Minimum Service Standard (SPM), supporting the increase in real sector's competitiveness, and increasing the number of Public-Private Partnerships (KPS).

Ketenagalistrikan

Electricity



Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 % - 7 %, dan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia dari 65 % pada tahun 2010 menjadi 90 % pada tahun 2019, sesuai yang dicantumkan dalam rencana umum pembangunan tenaga listrik (RUPTL), diperlukan pertumbuhan ketenagalistrikan sebesar 8 % - 9%.

To support the national economic growth at the 6-7% level and to increase Indonesia's electrification level from 65% in 2010 to 90% in 2019, in line with the General Plan for Electricity Development (RUPTL), the amount of available electricity should grow at a rate of 8-9% per year.

Untuk mencapai target yang telah direncanakan tersebut, Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) /PLN telah meluncurkan program percepatan pembangunan ketenagalistrikan yang dikenal dengan pembangunan ketenagalistrikan 10.000 Megawatt (MW) tahap I dan Tahap II. Di luar program percepatan tersebut, pihak Pemerintah juga mendorong proyek-proyek pembangkit tenaga listrik berkapasitas besar untuk dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

To reach that goal, the government and the State Electricity Company (PLN) have launched an electricity development acceleration program, or better known as the 10,000 Megawatt program (phase I and II). Besides the acceleration program, the government has also pushed for major electricity generation projects to be developed under the Public-Private Partnership scheme.

Pada tahun 2010, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero/ PII) telah menstruktur penjaminan proyek untuk pembangkit tenaga listrik berkapasitas 2.000 MW di provinsi Jawa Tengah, tepatnya di kabupaten Pemalang. Proyek ini menjadi salah satu pencapaian yang berarti dari PII karena telah berhasil menyelesaikan proses penjaminan proyek ketenagalistrikan dengan kapasitas dan nilai investasi yang besar, senilai USD 3 miliar.

Pada saat ini, PT PLN telah menyusun dokumen untuk beberapa proyek ketenagalistrikan yang akan dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Diperkirakan proyek tersebut dapat mulai diproses penjaminan proyeknya pada tahun 2011 dan 2012.

In 2010, the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) has carried out a project guarantee structuring process for a 2000 MV power generation facility in Pemalang Regency, Central Java. This is one of IIGF's major accomplishments as the fund has been able to complete the guarantee process for a large capacity power generation project with an estimated investment value of up to US\$3 billion.

PT PLN is currently preparing the documents for several power projects to be developed through Public-Private Partnership scheme. The guarantee process for these projects is expected to begin in 2011 and 2012.



Sistem Penyediaan Air Minum

Water Supply System



Sebagai Negara yang telah menyetujui sasaran *Millennium Development Goals* (MDG) tahun 2015, Indonesia perlu meningkatkan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam MDG tersebut.

As a country that has agreed to reaching the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015, Indonesia needs to improve its Clean Water Provision System (SPAM) in accordance with the MDG's target.

SPAM merupakan salah satu infrastruktur yang telah diserahkan tanggungjawab penyediaannya kepada pemerintah daerah. Hingga saat ini lebih dari 300 SPAM telah diserahkan oleh pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi kepada badan usaha daerah, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Keterbatasan PDAM dalam keahlian aspek teknis maupun manajemen serta keterbatasan kemampuan keuangan, menjadi kendala utama dalam pengembangan pelayanan air minum oleh PDAM. Luas daerah (*coverage*) pelayanan yang rendah dan cenderung tidak bertambah, kurangnya kualitas, kuantitas maupun kontinuitas pelayanan air minum oleh PDAM serta tingginya kebocoran air minum telah menyebabkan banyak PDAM yang sulit untuk mandiri dan berkembang.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dapat menjadi

The Clean Water Provision System (SPAM) is one of the infrastructures that the regional government is responsible for providing. Today, more than 300 SPAM have been handed over by the regency, city or provincial governments to regional government-owned water utilities (PDAM).

As these regional utilities (PDAM) have limited management and technical capabilities, coupled with financial constraints, further development of water services has become a major problem. Many of the problems faced by the PDAM include small coverage areas that do not expand over time, low quality, quantity and continuity of water services by the PDAM, as well as high level of non-revenue water. These problems have hindered many PDAMs to grow and become independent.

alternatif untuk meningkatkan daerah pelayanan sesuai dengan target MDG yang telah disepakati oleh Pemerintah. Keterlibatan pihak swasta dalam mengembangkan pelayanan air minum tersebut dapat dilakukan dalam beberapa bentuk struktur KPS, diantaranya adalah kontrak servis, kontrak operasi dan pemeliharaan, kontrak bangun guna serah (BOT) maupun kontrak konsesi.

Pada tahun 2010 PII, bekerjasama dengan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum, telah melakukan persiapan penjaminan proyek KPS SPAM di kota Bandar Lampung, provinsi Lampung dan SPAM Umbulan, di provinsi Jawa Timur. Disamping kedua proyek tersebut, masih terdapat beberapa proyek KPS pada sektor air minum yang dalam waktu dekat akan dilakukan persiapan penjaminannya oleh PII.

Cooperation between Government and Private (PPP) can be an alternative to increase coverage in line with the MDG's target. Private involvement in developing water services can be structured in several ways, including service contract, operation and maintenance contract, build operate transfer (BOT) contract, and concession contract.

In 2010 IIGF, in collaboration with the Public Work Ministry's Supporting Agency for the Development of Clean Water Provision System (BPPSPAM), has conducted preparatory works for project guarantee provision for SPAM PPP projects at Bandar Lampung City in Lampung province and at Umbulan in East Java province. Besides these two projects, a number of PPP projects in the water sector are about to begin the guarantee preparation process by the IIGF.



Jembatan dan Jalan Tol

Toll Roads and Bridges



Salah satu moda transportasi barang maupun orang, baik antar pulau maupun antar kota, di dalam negeri adalah jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan merupakan salah satu moda transportasi yang sangat penting dan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Jalan dan jembatan akan membuka satu kawasan yang terisolir sehingga mampu memindahkan komoditi hasil bumi maupun hasil tambang, serta penduduk yang pada akhirnya akan meningkatkan dan meratakan pertumbuhan suatu wilayah, baik di perkotaan, perdesaan bahkan kawasan terpelosok.

Roads and bridges are one of the domestic transportation modes for goods and people, whether between islands or between cities. Roads and bridges are one of the vital transportation modes that directly contribute to economic growth. Roads and bridges can help open an isolated area to move its commodities, such as crops or mining products, and its people, which will ultimately improve and even out the growth of a region, whether in cities, villages or even in remote areas.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah dapat menyelenggarakan jalan maupun jembatan dengan menarik biaya kepada pengguna (tol). Namun demikian tidak semua jalan atau jembatan dapat dikembangkan menjadi jalan atau jembatan tol. Lalu lintas harian rata-rata kendaraan dari suatu daerah asal ke daerah tujuan perlu dipertimbangkan untuk menghitung kelayakan suatu proyek jalan maupun jembatan tol. Disamping itu, nilai investasi untuk penyediaan lahan dan konstruksi jalan juga sangat menentukan kelayakan suatu proyek jalan dan jembatan tol.

Berdasarkan pengalaman Pemerintah mengembangkan proyek jalan dan jembatan tol, permasalahan utama dalam proyek ini adalah pembebasan lahan. Dari sekian jumlah proyek jalan dan jembatan tol yang telah dilelang oleh Pemerintah, terdapat beberapa ruas jalan tol yang masih belum dapat diselesaikan pembangunannya karena permasalahan pembebasan tanah. Untuk itu, Pemerintah telah berupaya untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan dengan tujuan untuk memperlancar penyelenggaraan proyek infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan yang cukup luas.

Sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama proyek KPS, Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) telah mempersiapkan proses lelang beberapa proyek jalan tol yang akan ditawarkan kepada pihak swasta. Mengingat pentingnya pembangunan jalan tol terhadap pertumbuhan ekonomi di satu kawasan, Pemerintah bersedia untuk memberikan Dukungan Pemerintah secara langsung terhadap proyek jalan dan jembatan tol, berupa penyediaan tanah dan sebagian konstruksi agar proyek tersebut menjadi layak secara keuangan. Untuk meningkatkan kelayakan kredit (*bankability*) proyek jalan dan jembatan tol, penjaminan proyek sedang dikaji untuk beberapa proyek baru yang akan dilelang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Proyek tersebut adalah proyek jalan tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi di provinsi Sumatera Utara, Pandaan – Malang di provinsi Jawa Timur, Pasir Koja – Soreang dan Cileunyi – Sumedang di provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2010, proses penjaminan proyek yang telah dipersiapkan adalah untuk proyek Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi. Proyek ini juga menjadi proyek *showcase* pemerintah yang diharapkan dapat menjadi model proyek KPS yang diberikan penjaminan proyek oleh PII.

According to the regulations, the Government is permitted to provide road and bridge services by charging fees to users (a toll). However, not every road or bridge can be developed into a toll road or toll bridge. Average daily vehicle traffic from both directions should be considered when calculating the feasibility of a toll road or toll bridge project. Furthermore, the investment value for land acquisition and road construction is also crucial to determine toll road and bridge projects feasibility.

Based on the Government's experience in developing toll road and toll bridge projects, the main problem lies in the land acquisition. Among the various toll road and bridge projects tendered by the Government, some have been unable to complete construction because of land acquisition problems. Therefore, the Government has been trying to improve the law on land so infrastructure projects can be carried out much more easily since they require a large amount of land acquisition.

As the contracting agency responsible for PPP projects, the Toll Road Regulation Agency (BPJT) has prepared the tender process for several toll road projects to be offered to the private sector. Considering the importance of a toll road construction for the economic growth in the associated area, the Government is willing to provide direct Government Support in the form of land acquisition and partial construction, so the project can become financially viable. To improve bankability for toll road and toll bridge projects, project guarantees have been reviewed for several new projects, which will be tendered shortly. These projects include the Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi toll road in North Sumatra, Pandaan – Malang toll road in East Java, as well as Pasir Koja – Soreang and Cileunyi – Sumedang – Dawuan toll roads in West Java. In 2010, the guarantee process has been in progress for the Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi project. The project is a Government showcase, which is expected to be a model for PPP projects in toll road sector.

Transportasi

Transportation



Sesuai dengan Peraturan Presiden No.13/2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, jenis infrastruktur transportasi meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian .

In accordance with Presidential Regulation No. 13/2010 regarding Public-Private Partnerships in infrastructure, types of transportation infrastructure include airport services, provision of seaport and/or seaport services and rail transport.

Pembangunan pelabuhan sangat diperlukan untuk meningkatkan arus lalu lintas barang dari suatu pulau ke pulau lainnya dalam satu Negara, maupun dari suatu pulau ke suatu Negara di luar negeri. Biaya logistik untuk suatu produk maupun hasil bumi sangat tergantung dari pelayanan jasa transportasi suatu pelabuhan dalam proses bongkar dan muat barang. Pengembangan pelabuhan biasanya juga dikaitkan dengan pengembangan suatu kawasan untuk menjadi daerah andalan komoditas ekonomi, seperti kelapa sawit, batubara, kayu dan hasil bumi lainnya.

Sebelum mengembangkan suatu pelabuhan, diperlukan rencana induk dari pelabuhan tersebut agar pelaksanaan pembangunannya menjadi terintegrasi dan saling mendukung antara satu bagian pelabuhan dengan bagian lainnya, agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, dan pada akhirnya dapat menekan tariff pelayanan jasa pelabuhan menjadi lebih murah.

Seaport construction is urgently needed to increase goods traffic from one island to another within the country, as well as from islands to foreign countries. The logistics costs of products and produce depend on seaport transportation services during the loading and offloading process. Seaport construction is also associated with the development of a region to produce top commodities, such as palm oil, coal, wood, and other types of crops.

Before beginning seaport construction, a seaport master plan is required so that the construction can be integrated and parts of the port can support one another. If the built facilities can be used in an effective and efficient manner, seaport service tariffs can be reduced.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dapat dikembangkan dalam seluruh sistem pelabuhan atau masing-masing bagian dari pelabuhan tersebut.

Bandar Udara merupakan infrastruktur yang diperlukan oleh suatu negara dalam rangka memindahkan penumpang dan barang yang memerlukan waktu perjalanan yang cepat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat memerlukan fasilitas infrastruktur bandar udara. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa kawasan dalam negeri dan mancanegara, jasa transportasi pesawat udara dirasakan telah menjadi salah satu kebutuhan utama.

Pembangunan bandar udara melalui skema KPS umumnya dilakukan pada sisi darat, adapun sisi udara yang sangat terkait dengan keselamatan dan keamanan negara masih menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah.

Beberapa proyek bandar udara telah ditetapkan untuk dikembangkan melalui skema KPS, namun demikian masih belum ada proyek Bandar udara yang telah dipersiapkan proses penjaminannya oleh PII.

Jaringan rel dan stasiun kereta api menjadi moda transportasi darat yang paling efisien dalam memindahkan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain, namun demikian diperlukan batas minimum barang maupun penumpang yang akan dipindahkan agar mencapai skala ekonomi hingga moda transportasi ini dapat dikembangkan. Hambatan utama dalam moda transportasi kereta api adalah ketersediaan lahan untuk jalur kereta api dan stasiun pengoperasian termasuk depo perawatan.

Sebagai angkutan penumpang di perkotaan, kereta api menjadi pilihan karena jumlah penumpang yang diangkut cukup besar, menggunakan kereta api listrik akan mengurangi emisi gas buang dari angkutan di perkotaan. Untuk daerah perkotaan moda transportasi kereta api diatas permukaan tanah selain sulit untuk mendapatkan lahan untuk jalur kereta api, juga akan mengurangi keindahan kota, bila menggunakan jalur yang *elevated*. Mengatasi hal tersebut, beberapa kota telah menggunakan moda kereta api bawah tanah yang relatif lebih sulit dan mahal biaya konstruksinya.

Penyiapan proyek (KPS) pada moda kereta api telah dilakukan pada proyek angkutan batubara provinsi Kalimantan Tengah, proyek ini hingga sekarang belum dapat memastikan apakah akan mengajukan penjaminan proyek atau tidak. Proyek kereta api lainnya yang direncanakan untuk diproses dengan skema KPS adalah proyek kereta api Bandara yang menghubungkan Jakarta Kota dengan Bandara Soekarno Hatta. Konsultasi penyiapan proyek untuk memperoleh dukungan penjaminan dari PII saat ini sedang berjalan.

Pada sektor transportasi udara, laut dan perkeretaapian, PII telah melakukan konsultasi proyek KPS dengan Kementerian Perhubungan untuk membangun pengertian dan pemahaman akan proses penjaminan proyek KPS yang akan diberikan oleh PII.

A Public-Private Partnership (PPP) can be used to develop the whole seaport system, or just parts of the seaport.

Airports are infrastructure needed by countries to transport passengers and goods in a quick way. As an archipelago, airports are vital infrastructure for Indonesia. With the growing economy in several domestic regions and also foreign countries, air transportation has become a major demand.

Airport construction through PPP is generally done for the ground portion. The Government is still fully responsible for the air portion, which is related to safety and national security.

Some airport projects have been designated for development through PPP scheme, but none is currently being prepared for the guarantee process by the IIGF.

Rail networks and train stations are the most efficient ground transportation mode to move goods and passengers from one place to another. However, a minimum number of goods and passengers are needed to reach the scale of economy for the transportation mode to be developed. The main constraint in rail transportation is the availability of land for railways and stations, including maintenance depots.

Trains have become the transportation of choice in urban setting because the large number of passengers they carry, along with the use of electric trains, will ensure reduced emissions from other urban transportation modes. In the urban setting, above-ground rail transportation may find it difficult to acquire land for rail networks and also can be aesthetically unpleasant. Therefore, some cities have used underground rail networks, which are relatively more expensive and more complex to construct.

Preparation of PPP projects in rail transportation is being conducted in Central Kalimantan for coal transport, however there is no decision yet whether the project will apply for project guarantee or not. Another rail project planned to be processed under PPP scheme is the airport railway system that will link down-town Jakarta to the Soekarno Hatta International Airport. Consultation for acquiring guarantee support from IIGF for this project is undergoing.

In the air, sea, and rail transportation sectors, IIGF has conducted PPP projects consultation with the Transportation Ministry to build knowledge and understanding on IIGF's guarantee provision process for PPP projects.

Air Limbah dan Persampahan

Waste Water and Waste Disposal



Dalam Peraturan Presiden No.13/2010, infrastruktur air limbah yang dapat dikembangkan dengan skema KPS meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, sedangkan infrastruktur persampahan meliputi pengangkut dan tempat pembuangan.

Presidential Regulation No.13/2010, the infrastructures for waste water that can be developed under the PPP scheme comprise of waste water treatment installation, waste water collection network and primary network, whereas infrastructures for other waste disposal consist of waste transportation and disposal sites.

Sejauh ini, pengelolaan air limbah dilakukan dengan sistem individu dan hanya sedikit yang dilakukan secara terpusat. Khususnya di kawasan perkotaan, pengelolaan air limbah terpusat hanya dikembangkan di daerah dimana proyek tersebut dapat menerapkan pemulihan biaya (**full cost recovery**) dan dilakukan pada skala ekonomi tertentu. Di Jakarta, pengolahan air limbah yang terpusat di kawasan Kuningan dengan cakupan pelayanan untuk daerah Sudirman, Thamrin, Kuningan dan sekitarnya, dimana gedung perkantoran dan perhotelan banyak terdapat pada kawasan tersebut.

So far, the treatment for waste water is carried out by individual systems, and very few are centralized. In urban centers, waste water treatment under a centralized system is developed only in areas where the project could achieve full cost recovery and carried out under certain economies of scale. In Jakarta, a centralized waste water treatment facility is available in the Kuningan area, serving the nearby areas of Sudirman, Thamrin and Kuningan itself, in which most of the office towers and hotels are located.

Disamping pengolahan air limbah perkotaan, kawasan yang juga memungkinkan dilakukan pengolahan air limbah terpusat dan dapat menerapkan pemulihan biaya adalah kawasan industri. Beberapa pengolahan air limbah terpusat dilakukan secara bersama-sama, dimana pengelola jasa pelayanan air limbah tersebut akan menarik tarif untuk pemulihan biaya.

Pada infrastruktur persampahan, permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan lahan untuk tempat pengelolaan akhir (TPA) dengan akses yang terbuka untuk lalu lintas kendaraan pengangkut dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke TPA. Banyak daerah, khususnya diperkotaan kurang dapat menyediakan lahan dalam skala besar untuk pengolahan persampahan perkotaan yang semakin meningkat. Bahkan untuk pengelolaan TPA bersama, banyak daerah yang tidak ingin sampah tersebut dibuang pada wilayah mereka, atau sering disebut *Not In My Backyard* (NIMBY).

Sesungguhnya stigma bahwa TPA mengandung risiko pencemaran lingkungan baik udara tanah maupun air, tidaklah sepenuhnya benar. Melalui pengelolaan sampah yang baik, pencemaran lingkungan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Bahkan pada beberapa TPA yang dikelola secara modern, pengolahan sampah tersebut dapat menghasilkan pendapatan lain seperti tenaga listrik, maupun kompos yang berguna sebagai pupuk pertanian.

Seperti umumnya pengelolaan infrastruktur yang padat modal, pengelolaan TPA juga memerlukan biaya yang cukup besar dan perlu kepastian pasokan jumlah sampah minimal agar mencapai skala ekonomi. Pada sisi lain, pemerintah kota juga menghimbau masyarakat untuk melakukan 3 R dalam rangka mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, yaitu **Reduce**, **Reuse** dan **Recycle**. Kontradiksi tersebut tidak perlu dicemaskan, karena dengan perhitungan keuangan yang cermat dapat mendorong pengelolaan TPA dapat menerapkan **full cost recovery**.

PII telah melakukan konsultasi dengan beberapa Penanggung Jawab Proyek Kerjasama pada sektor persampahan, namun demikian untuk sektor air limbah belum ada proses persiapan penjaminan proyek yang telah dilakukan oleh PII.

In addition to waste water treatment in city centers, an area that is feasible to develop centralized waste water treatment facilities is the industrial estate. Several centralized waste water treatment systems have been undertaken jointly, in which the operator of the waste water system can extract fees for cost recovery.

In infrastructure for other waste disposal systems, the main issue is how to find a suitable site for end-processing (SEP) of the wastes, that provides convenient access to traffic lanes to transport waste from temporary terminals to the SEP. Many regions, especially in urban centers, lack the ability to provide a suitable site in a sizeable scale to accommodate city wastes that continue to increase in volume. Even for the joint operation of the SEP, many regions refuse to allow the dumping of wastes in their respective areas, citing the often heard remarks: *Not In My Backyard* (NIMBY).

In reality, the stigma that SEPs contain contamination risks to the environment, whether air, land or water, is not entirely true. Through various reliable waste management systems, the potential for environmental contamination can be mitigated to a minimum. In fact, in a number of advanced SEP systems, the treatment of wastes can produce side benefits in the form of electricity as well as compost for use as plant fertilizers.

As is common with the management of a capital intensive infrastructure, the management of an SEP also requires significant working capital that necessitates a certain minimum amount of wastes for processing in order to achieve economies of scale. On the other hand, municipal governments also encourage the public to exercise the 3R concept of Reduce, Reuse and Recycle in order to minimize wastes. This contradiction should not be of any concern, since with accurate financial simulation, SEP can always be operated on a scale that ensures full cost recovery.

IIGF has conducted consultation with several CAs in the waste disposal sector, however there has been no progress in the guarantee process that has been undertaken by IIGF in the waste water sector.

Pengairan

Irrigation



Ketersediaan air baku sangat penting bagi pelayanan infrastruktur air minum ataupun keperluan lain seperti pengairan, penggelontoran sungai untuk meningkatkan mutu air sungai. Ketersediaan air baku yang bersumber dari air permukaan sangat tergantung dari pengelolaan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya.

Availability of an adequate water supply is crucial for infrastructures of drinking water facilities or other purposes, such as irrigation and river drainage, to increase the quality of water. The availability of this water that is derived from surface water is highly dependent upon the management of dams, pools, lakes and other water reservoirs.

Untuk membangun waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya memerlukan biaya yang sangat besar. Disisi lain, pembiayaan yang sangat besar tersebut tidak dapat memulihkan biaya (*cost recovery*), sehingga tidak layak untuk dikembangkan dengan skema KPS, melainkan harus disediakan melalui pendanaan dari pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No.13/2010, bagian proyek yang dapat dikembangkan dengan skema KPS adalah saluran pembawa air baku (*water conveyance*). Air baku yang dibawa akan digunakan sebagai sumber air bagi instalasi pengolahan air minum atau proyek-proyek lainnya yang dapat membayar tarif untuk pemulihan biaya pembawa air baku.

The construction of these water reservoirs often requires large capital outlays, which are not always feasible in terms of their full cost recovery. This makes it often difficult to develop under the framework of PPP, and can only be undertaken through public funding.

Pursuant to Presidential Regulation No. 13/2010, the portion of projects that can be developed under the PPP scheme is the water conveyance network. The water debit that can be flowed through the network can be used to supply a drinking water installation system or other water-related projects that can generate the fees to recover the construction cost of the water conveyance system.

Di Indonesia masih belum terdapat proyek infrastruktur saluran pembawa air baku yang dikembangkan dengan skema KPS. Beberapa proyek telah dikaji dan diidentifikasi sebagai potensial proyek saluran pembawa air baku sebagai proyek KPS, namun demikian hingga saat ini belum ada yang mencapai tahap penandatanganan perjanjian KPS, bahkan dalam tahap yang lebih awal yaitu, proses pengadaan mitra swasta.

Walaupun telah diindikasikan beberapa proyek dapat dikembangkan melalui skema KPS, belum terdapat satupun proyek dalam sektor ini yang telah diproses untuk mendapatkan penjaminan proyek dari PII.

In Indonesia, there is as yet no infrastructure project relating to this water conveyance system that has been developed under the PPP scheme. A number of projects have been identified and reviewed as being potential for a PPP project undertaking in the development of a water conveyance system. However, there has not been any project that has reached an agreement for PPP, or even the earlier stage of finding potential private partners.

Although it has been indicated that certain projects of this nature can be developed through the PPP scheme, there has not been a single project in this sector that has been processed to receive a project guarantee from IIGF.



Minyak dan Gas Bumi

Oil and Gas



Sesuai dengan Peraturan Presiden No.13/2010, proyek yang memungkinkan untuk dikerjasamakan pada sektor minyak dan gas bumi adalah transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.

Pursuant to Presidential Regulation No. 13/2010, the types of projects that can be developed under a partnership scheme in the oil and gas sector are the transmission and/or distribution of oil and gas.

Infrastruktur sektor minyak dan gas bumi telah lama merupakan infrastruktur yang telah maju dibandingkan dengan beberapa infrastruktur lainnya. Sektor ini telah lama menjadi bagian infrastruktur yang menghasilkan devisa bagi Negara. Sejak lama sektor ini telah mengundang mitra swasta untuk bekerjasama dalam mengembangkan proyek.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pertamina tidak lagi menjadi regulator dalam industri minyak dan gas bumi melainkan menjadi operator yang siap bersaing dengan badan usaha lainnya dalam menyelenggarakan infrastruktur minyak dan gas bumi.

Hingga saat ini belum ada proyek pada sektor minyak dan gas bumi yang siap untuk dilelang dengan mendapatkan penjaminan dari PII.

Infrastructure of the oil and gas sector is well established in comparison to other sectors. This sector has long been a part of infrastructure projects that generate foreign-exchange earnings for the nation. It has attracted private partnership in the development of its projects for some time.

In the last few years, Pertamina, the state oil company, is no longer the regulator of the oil and gas industry, but simply one of the operators that is keen to compete with other operators in developing and managing infrastructures in oil and gas.

To date, there has not been a single project in the oil and gas sector that is ready for tender with a project guarantee from IIGF.

Telekomunikasi dan Informasi

Information and Technology



Salah satu jenis infrastruktur yang telah maju dalam tingkat kompetisi penyelenggaraannya adalah infrastruktur sektor telekomunikasi dan informasi. Pada saat ini diantara beberapa penyelenggara infrastruktur ini telah terjadi persaingan yang sehat, dimana Pemerintah bertindak sebagai pengatur atas pelayanan jasa telekomunikasi.

One of the infrastructures that is most advanced and has reached a level playing field in the competition among its players is telecommunications and information. Today, there exists healthy competition among several service providers, in which the Government simply acts as the regulator of the industry.

Dalam sektor ini, sesuai dengan Peraturan Presiden No.13/2010, bagian dari penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi yang dapat dikompetisikan melalui proyek KPS adalah penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur *e-government*.

Belum ada proyek pada sektor ini yang dipersiapkan untuk diproses mendapatkan penjaminan dari PII.

In this sector, pursuant to Presidential Regulation No. 13/2010, the part of telecommunications and information services that can be tendered through the PPP framework is the telecommunications network services and the e-Government infrastructure.

There has not been a single project in this sector that has been prepared to be processed for a guarantee from IIGF.



Peningkatan Kapasitas

Capacity Building

Sesuai dengan Peraturan Presiden 13/2010, terdapat delapan sektor infrastruktur yang terbuka untuk proyek KPS, yaitu: Transportasi (bandara, pelabuhan, transportasi kereta api); Jalan (jalan dan jembatan tol); Pengairan; Air minum (sistem pengadaan dan pengolahan air bersih); Air limbah (instalasi pengolahan air limbah); Informasi dan Telekomunikasi (jaringan telekomunikasi dan *e-Government*); Ketenagalistrikan (pembangkit listrik, pemanfaatan energi panas bumi, jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik) dan Minyak dan Gas Bumi.

Pada tahun 2010, PII mengambil langkah pasti untuk membangun landasan operasional Perusahaan, sekaligus mengupayakan penstrukturan beberapa program penjaminan yang dapat diberikan untuk proyek yang layak menerima penjaminan.

In accordance with Presidential Decree No.13/2010, there are eight sectors of infrastructure that are open for PPP projects, namely: Transportation (airports, ports, railway transportation); Roads (roads and toll bridges); Irrigation; Drinking water (supply systems and water treatment); Sewage (sewage treatment installations); Information and Telecommunications (telecommunication networks and e-Government); Electricity (power plants, geothermal energy utilization, electricity transmission and distribution networks) and Oil and Gas.

In 2010, IIGF took definitive steps to establish the basis for the Company's operations, and also sought to structure several guarantee programs that could be issued to projects eligible to receive guarantees.

Permodalan & Peningkatan Kapasitas Institusi

Capitalization & Institutional Capacity Building

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII didirikan dengan modal yang ditempatkan secara penuh sebesar Rp2,0 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009 dan 2010. Permodalan PII direncanakan untuk ditambah sebesar Rp1,5 triliun dari APBN 2011.

Selain mengandalkan dana modal disetor untuk program penjaminan PII, perusahaan juga dapat mengandalkan fasilitas penjaminan dari berbagai institusi multilateral seperti Bank Dunia, ADB, IDB, dan MIGA. Hingga saat ini fasilitas penjaminan senilai US\$480 juta dari Bank Dunia sedang dalam proses penyiapan dan, bila terealisasi, dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas penjaminan yang diharapkan terealisasi pada tahun 2011.

PII memanfaatkan dana yang terhimpun dari modal yang disetor dengan menempatkannya pada instrumen-instrumen investasi berperingkat *triple-A* (AAA), AA, dan A, guna memperoleh imbal hasil investasi yang menambah pendapatan perusahaan. Setelah program penjaminan PII bergulir, maka perusahaan pun akan memperoleh pendapatan dari jasa penjaminan yang diberikan.

Dari kedua sumber pendapatan tersebut, PII berharap dapat menjalankan program penjaminan pembangunan infrastruktur secara berkesinambungan.

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, or IIGF, was established with a paid-up capital of Rp2.0 trillion derived from the State Budget (APBN) for 2009 and 2010. An additional Rp1.5 trillion is planned to supplement the capitalization of IIGF from the 2011 State Budget.

Apart from relying on paid-up capital for IIGF guarantee programs, the Company can rely on guarantee facilities from various multilateral institutions, including the World Bank, ADB, IDB and MIGA. To date a Guarantee Facility amounting to US\$480 million from the World Bank is in the process of preparation and, when realized, can immediately be utilized to increase guarantee capacity expected to be effected in 2011.

PII utilizes funds collected from the paid-in capital by placing it in investment instruments that are rated triple-A (AAA), AA, and A, in order to obtain investment returns that augment the Company's revenues. Once the IIGF guarantee programs start rolling, the Company will earn revenue from its guarantee services.

From the two sources of revenues, IIGF expects to be able to continuously run its infrastructure development guarantee programs.

Sumber Daya Manusia

Human Resources

PII menyadari bahwa keberhasilannya menjadi penyedia jaminan untuk proyek infrastruktur bertumpu pada kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Untuk itu, PII melangkah secara hati-hati dan cermat dalam merekrut, melatih dan mengembangkan SDM sesuai dengan misi yang diemban Perseroan.

Dengan semakin bertambahnya fungsi baru dalam struktur organisasi PII seiring dengan peningkatan kegiatan usaha, maka diperlukan tambahan jumlah personil dari 16 orang di tahun 2010. Selain tambahan karyawan untuk posisi baru, juga terdapat tambahan personil pada fungsi-fungsi yang sudah ada seperti untuk posisi *Project Development, Project Monitoring, Project Appraisal & Underwriting, Legal, Treasury, Risk*, dan beberapa staf pendukung. Fungsi lainnya seperti *Internal Audit* serta Spesialis Sosial dan Lingkungan akan dilengkapi tahun 2011.

Selain penambahan jumlah personil, PII juga merumuskan program pelatihan dan pengembangan SDM.

IIGF understands that its success as a guarantee provider for infrastructure projects rests on the competence of its human resources (HR). Hence, IIGF is prudent and cautious in recruiting, training and developing its HR in accordance with the mission of the Company.

With the increasing number of new functions within IIGF's organizational structure, along with the increase in business activities, an additional number of personnel was needed, with the Company's workforce growing from 16 people in 2010. Besides additional personnel for new positions, there are also additional personnel for existing functions, such as Project Development, Project Monitoring, Project Appraisal & Underwriting, Legal, Treasury, Internal Auditor, Risk, Social and Environmental Specialist, as well as several support staff.

Besides the addition of personnel, IIGF has also formulated human resources training and development programs.

No	Daftar Pelatihan	Training Lists
1	Workshop Bank Pembangunan Asia, Jakarta	Asian Development Bank Workshop, Jakarta
2	Pelatihan APN – Jaringan KPS Global, Seoul	APN Training - Global PPP Network, Seoul
3	Program Benchmarking dengan MIGA, Washington DC	Benchmarking program at MIGA, Washington DC
4	Manajemen Pengelolaan Dana, Jakarta	Fund Management, Jakarta
5	Melakukan Perbandingan Nilai Uang Dan Sektor Publik Untuk Mendukung Teknik Analisis Risiko Untuk Proyek KPS, Bogor	Conducting Value for Money and Public Sector Comparator and Risk Analysis Techniques for PPP Projects, Bogor
6	Peningkatan Kelayakan Kredit dan Instrumen Mitigasi Risiko Untuk Mendukung Pembiayaan dan Penjaminan Proyek KPS, Lombok	Credit Enhancement and Risk Mitigation Instruments to Support PPP Infrastructure Financing and Guarantees, Lombok
7	Pelaporan Keuangan Standar Internasional, Jakarta	International Financial Reporting Standard, Jakarta
8	Investor Infrastruktur Asia, Singapura	Infrastructure Investor: Asia, Singapore
9	Workshop Manajemen Investasi dan Pembayaran, Jakarta	Investment & Payment Management Workshop
10	Workshop MIGA Tentang Risiko Politik dan Investasi Lintas Batas, Singapura	MIGA Workshop on Political risk and Cross Border Investments, Singapore
11	Pengadaan Barang dan Jasa Bank Dunia, Jakarta	Procurement World Bank Jakarta
12	Workshop Singapore Cooperation Enterprises Komponen 2A & 2C, Singapura	Singapore Cooperation Enterprise Workshop Component 2A & 2C, Singapore
13	Studi Perbandingan dan Studi Intensif dengan Public Utility Board (PUB) Singapura dan Kemitraan Victoria Australia	Benchmark & Intensive study with Public Utility Board (PUB) Singapore & Victoria Partnership Australia

Proses Pemberian Jaminan

Guarantee Provision Process

Proses pemberian jaminan terhadap suatu proyek oleh PII meliputi empat tahapan besar, yaitu:

The mechanism of IIGF in providing guarantees is as follows:

1

Bimbingan dan Konsultasi Consultation and Guidance

Memberikan informasi rinci tentang penjaminan oleh PII, seperti kriteria penjaminan, proses yang harus dilakukan untuk memperoleh jaminan, contoh perjanjian konsesi dan sebagainya.

To provide detailed information on IIGF's guarantee provision, such as the criteria for guarantee, the process in obtaining the guarantee, concession agreement, etc.

2

Penyaringan Screening

Mengevaluasi Formulir Penyaringan (*Screening Form*) yang disampaikan PJPK kepada PII untuk menentukan kualifikasi proyek atau eligibilitas dalam memperoleh jaminan berdasarkan regulasi atau ketentuan yang ada. Beberapa kriteria umum antara lain: termasuk sektor yang tercantum dalam Perpres 13/2010, proyek selaras dengan prioritas Pemerintah, dan dokumentasi proyek telah disiapkan oleh konsultan yang berpengalaman.

To evaluate the Screening Form submitted by CA to determine project qualification or eligibility in obtaining a guarantee based on existing regulations. The general criteria include, among other things, the sectors named in Presidential Regulation No. 13/2010, that the project is in line with the government's priority, and project documentation is prepared by a credible expert.

3

Penilaian Appraisal

Melakukan penilaian atas usulan penjaminan untuk melihat kelayakan proyek secara rinci dari aspek legal, finansial, teknis, serta lingkungan dan sosial, termasuk juga evaluasi terhadap kemampuan PJPK untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam perjanjian konsesi.

To conduct detailed assessment of Guarantee Application Package (GAP) on project feasibility based on legal, technical, economic and financial aspects, as well as the evaluation of CA's ability to meet its financial obligation under the concession agreement.

4

Penstrukturan Structuring

Menetapkan struktur penjaminan serta menyusun ketentuan dan kondisi penjaminan, misalnya jangka waktu, kewajiban finansial dan risiko yang dijamin, yang disesuaikan untuk masing-masing proyek KPS. Kegiatan ini meliputi juga penetapan *co-guarantor* yang ikut mendukung proyek.

To determine guarantee structure and terms and conditions, such as the guarantee period, financial obligation and risk of the guaranteed project, which is adjusted for each PPP project. This activity also includes determination of co-guarantor to support the project.

Bentuk dan tata cara pemberian jaminan serta mekanisme pengajuan dan penyelesaian klaim diatur secara spesifik dalam Perpres 78/2010 dan PMK 260/2010.

The form and mechanism for guarantee provision, as well as the procedure to submit and settle claims, are specifically governed by Presidential Regulation No. 78/2010 and the Ministry of Finance Regulation No. 260/2010.

Rencana Penjaminan dan Proyek-Proyek Potensial

Beberapa proyek yang saat ini sedang dan berpotensi untuk digarap termasuk lima proyek *showcase* KPS yang didorong oleh Pemerintah dan berbagai proyek lainnya, yaitu:

- Proyek pembangkit listrik PLTU Jawa Tengah (Central Java Power Plant, "Proyek CJPP") dengan kapasitas 2 x 1000 MW, nilai proyek sekitar Rp30 triliun.
- Proyek air minum Way Sekampung, Bandar Lampung dengan nilai proyek sekitar Rp400 milyar.
- Proyek Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi, dengan nilai proyek Rp4.7 triliun.

Potential Projects & Guarantee Plan

Potential projects that are in the pipeline include five showcase projects of Public Private Partnership endorsed by the Government. They are:

- Coal-Fired Central Java Power Plant Project
Total capacity 2 x 1000 MW; estimated project value Rp30 trillion (US\$3.3 billion)
- Way Sekampung Water Supply Project, Bandar Lampung ;
estimated project value Rp400 billion (US\$44 million)
- Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi toll road project;
estimated project value Rp4.7 trillion (US\$500 million)

- Proyek Air Minum Umbulan, Jawa Timur, dengan nilai proyek sekitar Rp1,9 triliun
- Proyek Kereta Api penumpang Manggarai – Airport Soekarno Hatta. Kisaran nilai Proyek Rp10 Trilyun.
- Proyek Pelabuhan Tanah Ampo Bali, untuk peningkatan dermaga dan fasilitas pelabuhan agar dapat disinggahi kapal pesiar Internasional. Kisaran nilai proyek Rp350 Milyar.

⁽¹⁾

PII telah siap untuk melakukan transaksi penjaminan pertama pada Proyek CJPP mengingat Pemerintah telah menyetujui usulan PII untuk melakukan penjaminan bersama terhadap proyek ini.

Proyek garapan berikutnya meliputi sektor air, kereta api, jalan tol dan pengelolaan air limbah. Beberapa proyek tersebut merupakan Proyek **Showcase** KPS yang didorong Pemerintah dan direncanakan disiapkan berdasarkan standar internasional untuk membangun kredibilitas. Proyek-proyek tersebut sebagian besar saat ini dalam tahap persiapan proyek. PII akan bekerjasama dengan PJPK mulai saat persiapan proyek dengan cara membantu memberikan masukan kepada PJPK untuk dapat menyiapkan proyek agar sesuai dengan standar yang dapat diterima oleh pasar dan untuk dapat dievaluasi kelayakan memperoleh dukungan penjaminan.

Beberapa proyek yang saat ini sedang digarap, berada pada tahapan yang berbeda. Uraian secara ringkas di bawah ini, menunjukkan proses yang dilakukan untuk memperoleh penjaminan dan memberikan sinyal kepada pasar bahwa PII “terbuka untuk bisnis”.

(i) Proyek CJPP

Pembangkit berbahan bakar batu bara dengan kapasitas 2x1000 MW dan estimasi biaya sekitar Rp30 Trilyun, adalah sebuah proyek IPP yang penting bagi PLN dan Pemerintah dalam rangka memenuhi permintaan tenaga listrik dan penyediaan listrik yang memanfaatkan bahan bakar non-BBM.

Direncanakan pembangkit ini akan beroperasi komersial pada 2016/2017. Proses evaluasi kelayakan proyek telah dilakukan sebelumnya oleh Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI) dan Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pemrosesan penyediaan penjaminan dialihkan ke PII pada awal Mei 2010. Selanjutnya PII mulai menstruktur bentuk penjaminan segera setelah penetapan calon peserta lelang. Beberapa pertemuan dengan calon

- Umbulan Water Supply Project, East Java; estimated value Rp1.9 trillion (US\$211 million)
- Manggarai – Soekarno-Hatta International Airport Railroad Project; estimated value Rp10 trillion (US\$1.1 billion)
- Tanah Ampo Sea Port, Bali; estimated value Rp350 billion (US\$39 million). ⁽¹⁾

The IIGF is currently ready to seal its first deal with state-owned electricity company PLN's Central Java Power Plant because the co-guarantee approval from the government has been received.

The next IIGF projects are expected to come from water, waste management, railway and toll road sectors. Some of these projects are also included in the GOI's Showcase of PPP Projects, which is planned to be prepared according to international standards to establish credibility. The potential projects are in various stages of preparation. IIGF will engage with these CAs from the early preparatory stage in order to ensure that projects satisfy acceptable market standards, and can be evaluated for its viability for government support.

Several IIGF projects currently underway are in different stages of development, and are highlighted below, to demonstrate the required process to obtain a guarantee, and to signal to the market that IIGF is “open for business”:

(i) Central Java Power Plant

The 2x1000 MW coal-fired power plant project, with a total cost of over US\$3 billion, is a high profile project for PLN and the GOI, to meet electricity demand utilizing non oil fuel power plant.

CJPP is planned to be in commercial operation by 2016/2017. The project evaluation process was initially conducted by the Policy Committee for Infrastructure Development Acceleration and Risk Management Unit, Fiscal Policy Office, MOF. The guarantee provision process was transferred to IIGF on early May 2010. IIGF then started the guarantee structuring process shortly after potential bidders were shortlisted. Several bidders'

⁽¹⁾ Catatan: Penjaminan terhadap proyek-proyek diatas akan sangat tergantung pada (a) kelayakan dari proyek-proyek tersebut, serta (b) komitmen Pihak Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK/ Contracting Agency) terhadap skema KPS dan kebutuhan penjaminan dalam struktur transaksi KPS tersebut.

⁽¹⁾ Disclaimer: The guarantee process of the above projects depends on (a) project feasibility, and (b) Contracting Agency's commitment to the Public-Private Partnership scheme.

peserta lelang dilakukan untuk membangun pemahaman yang sama terhadap isu-isu kunci sebagai masukan dalam merumuskan Perjanjian Penjaminan. Konsep awal Perjanjian Penjaminan yang berupa Penjaminan Bersama antara PII dan Pemerintah telah berhasil dirumuskan dan disetujui oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 14 Januari 2010. Konsep akhir dari Perjanjian Penjaminan telah diserahkan kepada PLN pada tanggal 15 Maret 2011 untuk didistribusikan kepada semua peserta lelang.

(ii) Sistem Penyediaan Air Minum Bandar Lampung

Proyek potensial berikutnya adalah proyek penyediaan air minum berkapasitas 500 liter per detik, yang berlokasi di Bandar Lampung. Proyek ini merupakan proyek prioritas bagi Pemerintah kota Bandar Lampung mengingat tingkat pelayanan air minum saat ini yang masih sangat rendah. Lingkup proyek meliputi pembangunan fasilitas pengolahan air baru, jaringan pipa air utama sepanjang 21 km untuk penjualan air baku ke PDAM, dan opsi pembangunan jaringan distribusi baru untuk mencakup 6 wilayah pelayanan PDAM. Nilai indikatif proyek berkisar Rp400 milyar dengan 25 tahun masa konsesi mulai tahun 2013.

Berbeda dengan Proyek CJPP, keseluruhan proses penjaminan akan dilakukan oleh PII. Saat ini dokumentasi proyek sedang disiapkan oleh PJPK untuk kemudian akan digunakan sebagai bahan utama bagi Usulan Penjaminan (*Guarantee Application Package, GAP*) yang akan disampaikan ke PII, untuk kemudian dinilai kelayakan untuk memperoleh penjaminan oleh PII.

(iii) Proyek Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi

Proyek jalan tol ini akan menghubungkan kota Medan dengan Bandar Udara baru di Kualanamu dan akan diteruskan sampai ke kota Tebing Tinggi. Total panjang jalan tol ini adalah sekitar 60 kilometer. Proses pembangunan jalan tol ini masih memerlukan dukungan pemerintah berupa penyediaan tanah dan sebagian konstruksi agar proyek yang sangat diperlukan dan mendesak ini dapat menjadi layak untuk ditawarkan kepada pihak swasta. Diperkirakan nilai proyek ini (termasuk dukungan pemerintah) adalah sekitar 4,7 Trilyun.

Pada saat ini sedang dilaksanakan proses pembebasan tanah dan diperkirakan akan masuk kedalam proses pelelangan setelah terdapat kejelasan dari pengadaan lahan. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah bekerjasama dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk mendorong percepatan pembangunan jalan tol tersebut. Dalam waktu dekat, segera setelah dokumentasi proyek selesai, PII akan melakukan proses *appraisal* untuk menilai kelayakan proyek ini dalam mendapatkan penjaminan.

meetings were conducted by IIGF and PLN to establish common understanding on key issues and inputs in drafting the Guarantee Agreement. The first draft of the Guarantee Agreement which was a co-guarantee between IIGF and the Government was finalized and approved by the Finance Ministry on January 14, 2010. Final draft of the Guarantee Agreement has been submitted to PLN on March 15, 2011, for distribution to all bidders.

(ii) Lampung Water Supply Project

The second prospective IIGF project is a 500 liter/sec BOT plus distribution water supply project located in Bandar Lampung, Lampung Province. It has been designated a priority project in order to improve the service coverage which is currently very low. The project will cover the development of a new water treatment facility, and associated 21 km main water pipe network for the sale of bulk water to the municipal water company (PDAM) and the option to develop a new main water distribution network to cover the six PDAM's service areas. The indicative project capital cost is US\$44 million, with a 25-year concession starting 2013.

Unlike the Central Java Power Plant project, the entire guarantee processing for this project will be conducted by IIGF. Project documentation is now being prepared by the Contracting Agency, as part of the requirement of the Guarantee Application Package (GAP) to be submitted to IIGF to be appraised whether the project is worth to have IIGF guarantee.

(iii) Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Toll Road Project

This toll road project connects the city of Medan with the new airport of Kualanamu, and will be extended to the city of Tebing Tinggi. Length of this toll road is about 60 kilometers. Government support is essential in the land acquisition process and for parts of the project construction in order to increase the project's viability before it is offered to private investors. Estimated value of this project is around Rp4.7 trillion (US\$500 million).

Currently, land acquisition is underway and the bidding process is expected to start once there is clear progress on land acquisition. IIGF has been working closely with the toll road regulatory agency (BPJT) to expedite the development of the project. Once the project documentation is ready, IIGF will start the appraisal process to review the project's guarantee eligibility.

Kerjasama Internasional

International Cooperation

Sebagai perusahaan penjaminan proyek infrastruktur, PII harus menjalin hubungan kerja yang erat dengan berbagai lembaga multilateral maupun bilateral dunia.

Lembaga multilateral dan bilateral seperti Bank Dunia, bank pembangunan regional maupun lembaga pembiayaan ekspor dibutuhkan PII untuk meningkatkan kapasitas penjaminan.

Berbagai perusahaan konsultan manajemen juga telah membantu PII meletakkan dasar-dasar usaha dari segi organisasi, kebijakan perusahaan, tata kelola perusahaan, pengendalian risiko dan lain sebagainya.

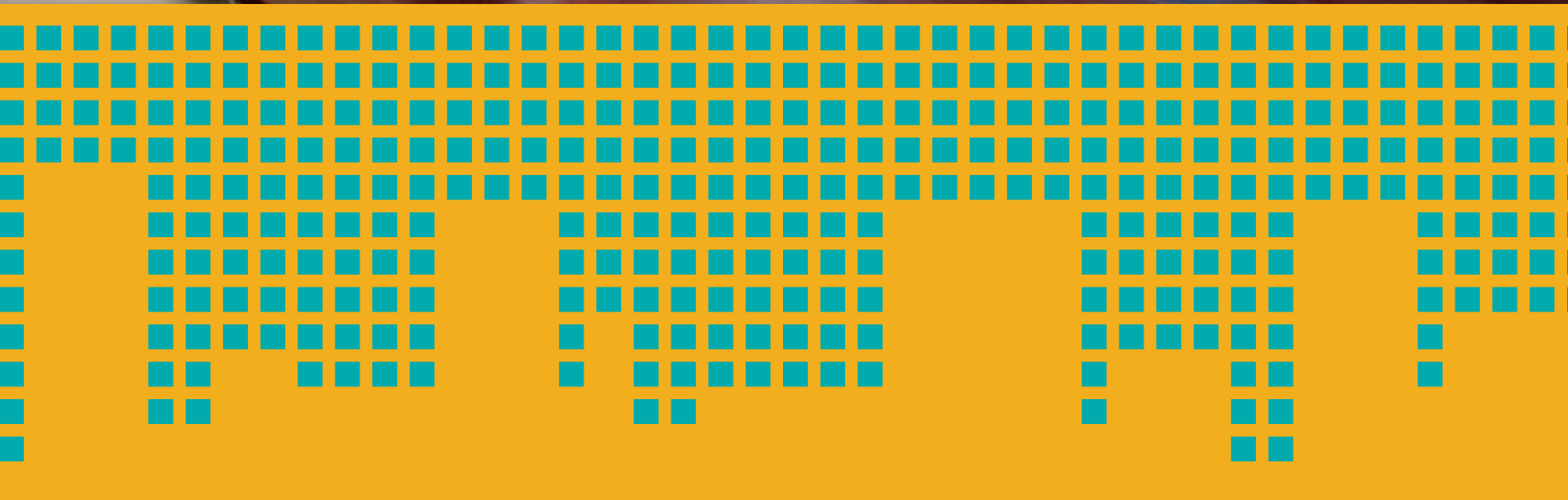
PII berkeyakinan bahwa landasan usaha yang dikembangkannya bersama mitra-mitra usaha tersebut akan membekali PII untuk merealisasikan *Road-map* Perusahaan serta sasaran usaha yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 tahun ke depan.

As a company that provides infrastructure project guarantees, IIGF must establish close working relationships with various global multilateral and bilateral agencies.

Multilateral and bilateral institutions, such as the World Bank, regional development banks and export financing agencies, are needed by IIGF to increase guarantee capacity.

Various management consulting firms have also assisted IIGF in laying the foundation of its business in the aspects of organization, corporate policy, corporate governance, risk management and so forth.

IIGF believes that the business foundation it has developed with these business partners will equip it with the means to realize its Corporate Road-map, as well as its business objectives, for the next five years.



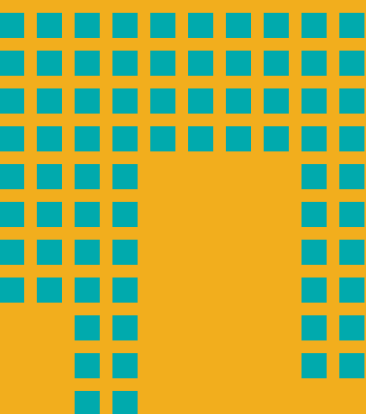


Kebijakan & Prosedur

Policies and Procedures

Panduan Tata Kelola Perusahaan telah ditetapkan oleh Perseroan dengan melibatkan bantuan konsultan berskala internasional. Selain merumuskan pokok-pokok kebijakan Tata Kelola Perusahaan, panduan tersebut memberi penekanan khusus atas upaya-upaya untuk mendeteksi, mencegah dan menindak kegiatan *fraud* dan korupsi.

The Company has developed a set of Corporate Governance Guidelines by engaging the help of an international, world-accredited consultant. In addition to formulating the key points of the Corporate Governance policy, the guidelines put special emphasis on efforts to detect, prevent and prosecute acts of fraud and corruption.



Kebijakan Perusahaan

Company Policies

Kebijakan Perusahaan

Kapasitas dan Kebijakan Penjaminan IIGF

Sampai dengan tahun 2011, kapasitas penjaminan PII sangat bergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah. Diharapkan akan ada tambahan PMN sebesar Rp1,5 triliun, sehingga sampai dengan akhir tahun 2011 jumlah total modal PII mencapai Rp3,5 triliun.

Dalam memberikan penjaminan kepada suatu proyek, Perusahaan telah membuat kebijakan dalam pemberian penjaminan, yaitu:

- Nilai penjaminan untuk satu proyek adalah maksimum 25% dari modal PII yang tersedia.
- Untuk proyek yang mempunyai nilai lebih besar dari Rp500 M, maka nilai penjaminan maksimum adalah 50% dari nilai proyek.
- Untuk proyek yang mempunyai nilai lebih kecil dari Rp500 M, maka nilai penjaminan maksimum adalah 100% dari nilai proyek.
- Saldo minimal dari modal PII dijaga sekitar Rp200 M (diluar nilai penjaminan).

Penentuan Target Jumlah Proyek Penjaminan

Penentuan target jumlah proyek yang akan menjadi prioritas sangat bergantung pada faktor-faktor berikut:

- Komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).
- Kesiapan proyek.
- Kompleksitas proyek.
- Jangka waktu proyek siap ditawarkan ke investor (*time to market*).
- Lokasi geografis dari proyek juga merupakan pertimbangan.

Kebijakan Fee Penjaminan

Pendapatan penjaminan berasal dari dua jenis *fee*, yaitu *fee* yang dibayar di muka dan *fee* yang dibayar setiap tahun. Dalam menentukan *fee* penjaminan proyek, Perusahaan menentukannya berdasarkan atas 3 pendekatan, yaitu:

- Besarnya *fee* penjaminan tersebut bisa mendukung kelangsungan hidup perusahaan, atau dengan kata lain besarnya *fee* tersebut bisa menutupi biaya operasional perusahaan dan pertumbuhan perusahaan.

Corporate Policy

Guarantee Capacity and Policy of IIGF

Through 2011, IIGF's guarantee capacity will depend greatly on Government State Capital injection. It is expected that with additional State Capital injection of Rp1.5 trillion, total IIGF's capital will reach Rp3.5 trillion by the end of 2011.

In providing guarantee for a particular project, the Company has established a policy on guarantee provision, as follows:

- The maximum value of a guarantee for a single project is 25% of IIGF's available capital.
- For projects with a value exceeding Rp500 billion, the maximum value of the guarantee is 50% of the project value.
- For projects with a value below Rp500 billion, the maximum value of the guarantee is 100% of the project value.
- IIGF's capital is maintained at a minimum balance of around Rp200 billion (excluding the value of the guarantee).

Determining a Target Number of Projects to Guarantee

Determining the target number of projects to guarantee heavily depends on the following factors:

- The commitment of the Partnership Project PIC (PJPK).
- The readiness of the project.
- The complexity of the project.
- The time required to offer the project to investors (*time to market*).
- The geographic location of the project is also a consideration.

Guarantee Fee Policy

Guarantee revenues come from two types of fees, the fee paid up front and the fee paid annually. In determining guarantee fees for projects, the Company adopts 3 approaches, namely:

- The amount of the guarantee fee can sustain the company as a going concern; or in other words the amount of these fees can cover the costs of the company's operations and growth.

- Besarnya *fee* penjaminan tersebut sesuai dengan manfaat yang akan diterima oleh investor dan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.
- Besarnya *fee* tersebut sebanding dengan *fee* yang ditawarkan oleh perusahaan penjaminan yang lain.

Dalam menentukan *fee* terhadap masing-masing proyek, perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Karakteristik dari sektor untuk masing-masing proyek.
- Cakupan risiko yang dijamin untuk masing-masing proyek.
- Besarnya nilai proyek dan kompleksitas proyek.

Strategi Pengelolaan Dana

Untuk melakukan penjaminan proyek, PII mendapatkan modal yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Perusahaan telah menerima PMN sebesar Rp1 triliun di tahun 2009 dan telah menerima Rp1 triliun lagi di tahun 2010. Untuk tahun 2011 diharapkan akan ada tambahan PMN sebesar Rp1,5 triliun yang diperkirakan akan diterima di akhir tahun 2011. Dana yang berasal dari PMN akan dikelola oleh Perusahaan secara hati-hati.

Strategi pengelolaan dana adalah dengan membagi alokasi asset (dana) ke dalam *core instrument* dan *satellite instrument*. *Core instrument* terdiri dari Deposito dengan rating AAA, AA dan minimal A. Sedangkan *satellite instrument* terdiri dari instrumen obligasi *corporate* dan reksadana. *Satellite instrument* ini ditujukan untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan Penempatan Dana

Perusahaan telah membuat kebijakan penempatan dana di deposito, termasuk didalamnya cara pemilihan dan evaluasi bank tempat dana PII diinvestasikan.

Kebijakan Pembayaran Dividen

Perusahaan mengasumsikan tidak ada pembayaran dividen kepada Pemegang Saham. Seluruh Laba Ditahan akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas penjaminan.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Perusahaan telah menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang didasarkan kepada tata kelola yang baik, transparan dan efisien.

- The amount of the guarantee fee is in accordance with the benefits forthcoming to the investor and the contracting agency.
- The amount of the fee is comparable with the fees offered by other guarantee fund companies.

The Company also considers the following factors in determining the fee of each project:

- The characteristics of the sector that each project belongs to.
- The scope of risk guaranteed for each project.
- The value and the complexity of the project.

Fund Management Strategy

IIGF receives funds from State Capital In order to IIGF to able to guarantee projects. The Company has received a total of Rp1 trillion in State Capital in 2009 and another Rp1 trillion in 2010. The Company expects to receive additional Rp1.5 trillion by the end of 2011. The funds derived from State Capital will be prudentially managed by the Company.

The strategy for fund management is to divide the asset (funds) allocation into the core instruments and satellite instruments. Core instruments consist of term deposits with a rating of AAA, AAA and at least A. Satellite instruments consist of corporate bonds and mutual funds. Satellite instruments are intended to accrue a higher rate of return, without abandoning the principle of prudence.

Fund Placement Policy

The Company has issued a policy of funds placement in time deposit that highlights process of selection and evaluation of the bank where IIGF's funds are placed.

Dividend Payment Policy

The Company assumes that there will be no dividend payment to Shareholders. The entire Retained Earnings will be utilized to increase financial capacity.

Procurement Policy

The Company has issued a procurement policy that is based on good corporate governance practices which is transparent and efficient.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran. Tata Kelola Perusahaan PII mengacu pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund is based on the basic principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. IIGF Corporate Governance refers to the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), the provisions of its Articles of Association as well as prevailing laws and regulations.

Tugas Dewan Komisaris

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan perseroan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Wewenang Dewan Komisaris

- Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

Duties of the Board of Commissioners

Oversee corporate policy, the management of the Board of Directors in general, both with regard to the Company as well the Company's business endeavors. It is also to provide advice for the Directors, including overseeing the execution of the Corporate Long-Term Plan, Corporate Work Plan and Budget and the provisions of the Articles of Association and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and also prevailing laws, in the interest of the Company and in accordance with the aims and goals of the Company.

Authority of the Board of Commissioners

- Oversee the financial records, letters and other documents, audit cash transactions for verification purposes as well as other important documents and audit the Company's assets;
- Access to the property, buildings and offices used by the Company;
- Request explanations from the Board of Directors and/or other officers regarding issues concerning the management of the Company;
- Access to all policies and actions that have been and will be implemented by the Board of Directors;

- Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
- Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
- Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
- Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
- Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
- Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

Sepanjang tahun 2010, Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 8 kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing Komisaris sebesar 100%.

Tugas Direksi

Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau pembatasan-pembatasan atau arahan-arahan lebih lanjut yang disepakati oleh Pemegang Saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Wewenang Direksi

- Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;

- Request the Board of Directors and/or other officers under the Directors, with the knowledge of the Directors, to attend Board of Commissioners Meetings;
- Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners, if considered necessary;
- Suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association;
- Establish committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the ability of the Company;
- Employ experts for certain matters and for certain periods of time at the Company's expense, if deemed necessary;
- Assume Company management roles under certain circumstances for specified periods of time in accordance with the provisions of the Articles of Incorporation;
- Attend Board of Directors meetings and provide opinions on matters being discussed;
- Exercise other aspects of its oversight authority so long as it does not contravene laws and regulations, the Articles of Incorporation, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders.

During 2010, the Board of Commissioners held meetings as many as 8 times, with an attendance rate of 100% for each commissioner.

Duties of the Board of Directors

Take all actions relating to the management of the Company in the interest of the Company and in accordance with the aims and goals of the Company, and represent the Company both inside and outside courts of law on all matters and all incidents with restrictions as provided in laws and regulations, the Articles of Incorporation and/or further restrictions or directives as agreed by the Shareholders under the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Authority of the Directors

- Establish the Company's management policies;
- Regulate the granting of power of attorney to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or the Company, in and out of the courts of law;
- Regulate the granting of power of attorney to one or several employees of the Company, either individually or collectively, or to other parties, to represent the Company in and out of the courts of law;

- Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penghasilan lain;
- Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
- Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan mengikat perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- Establish provisions pertaining to the Company's employees, including the determination of salaries, pensions or retirement benefits and other incomes of the Company's workers under prevailing laws and regulations, with regard to the determination of salary, pension or retirement benefits, with the approval of the General Meeting of Shareholders and other income;
- Appoint and dismiss the Company's workers under the Company's regulations on employment and prevailing laws and regulations;
- Appoint and dismiss the Corporate Secretary;
- Take all other actions and commit all other acts concerning the management or ownership of the Company's assets with other parties and/or other parties with the Company, and represent the company in and out of the courts of laws on all matters and all incidents, with restrictions as provided under laws and regulations, the Articles of Incorporation and/or the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.



Sepanjang tahun 2010, Direksi melakukan rapat sebanyak 8 kali.

During 2010, the Board of Directors held meetings as many as 8 times.

Pencapaian GCG

- Telah disusun berbagai Kebijakan Internal untuk operasional PII, menyangkut berbagai aspek seperti investasi, proses penyediaan penjaminan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, dan lainnya.
- Manual Operasional PII disusun bersama dengan *World Bank* yang dibantu oleh CRISIL.
- Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PII disusun bersama dengan *Singapore Cooperation Enterprise* yang dibantu oleh PwC Singapore.
- Seiring dengan pengoperasian PII dan eksekusi proyek, maka Kebijakan Internal serta Manual Operasional tersebut akan terus disempurnakan.

GCG Achievements

- Various internal policies for IIGF operations have been formulated, concerning different aspects such as investment, guarantee provision process, personnel, procurement of goods and services, and others.
- The IIGF Operations Manual was created together with the World Bank which was assisted by CRISIL.
- The IIGF Corporate Governance Policy was formulated together with Singapore Cooperation Enterprise which was assisted by PricewaterhouseCoopers (PwC) Singapore.
- Along with the operation of IIGF and execution of projects, the Internal Policy and Operations Manual will be improved from time to time.

Komite Audit

Perseroan akan membentuk Komite Audit, yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya Perseroan. Komite Audit akan mengawasi dan mengevaluasi pelaporan keuangan, implementasi manajemen risiko dan pengendalian internal, perencanaan dan pelaksanaan audit, serta penerapan *Good Corporate Governance*.

Audit Committee

The Company will establish an Audit Committee, which is tasked to assist the Board of Commissioners in overseeing the Company. The Audit Committee will monitor and evaluate financial reporting, the implementation of risk management and internal control, planning and conducting audits, as well as the implementation of Good Corporate Governance.

PENGURUS

Susunan Dewan Komisaris & Direksi PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) saat ini adalah sebagai berikut :

MANAGEMENT

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) is as follows :

Komisaris Utama	Freddy Rikson Saragih	President Commissioner
Komisaris	Ayu Sukorini	Commissioner
Direktur Utama	Sinthya Roesly	President Director
Direktur Operasi	Yadi J. Ruchandi	Director of Operations
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	Armand Hermawan	Director of Finance & Risk Management

Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola Perusahaan

Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola Perusahaan IIGF telah dirumuskan bersama firma konsultan internasional, PricewaterhouseCoopers (PwC), dan terangkum dalam dokumen terpisah "Laporan Struktur dan Tata Kelola PII".

Panduan Pencegahan Penyalahgunaan dan Korupsi

PII tidak mentoleransi kecurangan/penyalahgunaan dan tindak korupsi dan memiliki komitmen untuk mendeteksi dan mencegah tindakan tersebut dalam kegiatan operasionalnya. Di bawah ini adalah rincian panduan PII untuk mendeteksi dan mencegah tindakan penyalahgunaan dan korupsi.

Corporate Governance Policies and Procedures

IIGF's Corporate Governance policies and procedures have been formulated together with the international consulting firm, PricewaterhouseCoopers (PwC), and are encapsulated in a separate document, "IIGF Structures & Governance Review Report".

Anti-fraud and Corruption Guidelines

IIGF does not tolerate dishonest/fraudulent and corrupt behavior and is committed to deterring and preventing such behavior in the performance of its business operations. The following section details IIGF's guidelines to detect and prevent fraud and corruption.



Kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan korupsi

Kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan korupsi PII bertujuan untuk:

- Menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif dan sesuai dengan pengawasan tersebut;
- Menetapkan prosedur formal dalam melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan/ penyalahgunaan dan tindak korupsi;
- Menumbuhkan dan menjaga lingkungan kerja yang tidak mentoleransi terjadinya tindak kecurangan dan penyalahgunaan.

Kebijakan Pelaporan dan Pengungkapan Penyalahgunaan dan Korupsi

Kebijakan pelaporan penyalahgunaan dan korupsi menetapkan proses yang diperlukan untuk menunjukkan kepada seluruh karyawan maupun pihak ketiga bahwa PII tidak akan mentoleransi tindak korupsi, dan kepada individu yang melaporkan akan didukung.

PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa

- (1) Efisien: Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Efektif: Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- (3) Terbuka dan Bersaing: Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

Anti-fraud and Corruption Policy

IIGF's anti-fraud and corruption policy aims to:

- Maintain an effective system of internal controls and compliance with those controls;
- Establish formal procedures for investigation of allegations of dishonest/fraudulent and corrupt behavior;
- Cultivate and maintain an environment in which dishonest and fraudulent behavior is actively discouraged.

Policy for Fraud and Corruption Reporting and Disclosures

The corruption and fraud reporting policy puts processes in place to demonstrate to all the employees and third parties that IIGF will not tolerate corrupt conduct, and that any individual who discloses inappropriate behavior will be supported.

PRINCIPLES OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND

Basic Principles of Goods and Services Procurement

- (1) Efficient: The procurement of goods and services must be arranged with the use of limited funds and resources to achieve the determined targets in the shortest possible time, and held accountable for;
- (2) Effective: The procurement of goods and services must comply with the specified requirements and provide maximum benefits in accordance with the determined targets;
- (3) Open and Competitive: The procurement of goods and services shall be open to providers of goods and services that meet the requirements and conditions and is done through fair competition among providers of goods and services that are comparable and meet the terms / criteria under clear and transparent conditions and procedures;

- (4) **Transparan:** Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang beminat;
- (5) **Adil/Tidak Diskriminatif:** Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- (6) **Akuntabel:** Harus mencapai baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum PII sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Kebijakan Umum

- (1) Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- (2) Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab Perusahaan, Pejabat Pengadaan atau Tim Evaluasi Pengadaan, dan Penyedia Barang dan Jasa.

Etika Pengadaan

Perusahaan, Penyedia Barang dan Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- (2) Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- (4) Menerima dan bertanggungjawab atas segala keperluan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;

- (4) **Transparent:** All conditions of and information on the procurement of goods and services, including technical administrative requirements, evaluation procedures, evaluation results, determination of providers of goods and services candidates, are open to the participating providers of goods and services who are interested;
- (5) **Fair/Non-Discriminatory:** Provide equal treatment to all providers of goods and services candidates and do not accord an advantage to certain parties, by any means and or for any reason;
- (6) **Accountable:** Must achieve, either physical, financial or other benefits for the smooth implementation of IIGF's general duties in accordance with prevailing principles and provisions in the procurement of goods and services.

General Policy

- (1) Simplify conditions and methods to expedite the decision-making process in procurement of goods and services;
- (2) Increase the professionalism, independence and responsibility of the Company, the Procurement Officer or Procurement Evaluation Team and the providers of goods and services.

Procurement Ethics

The Company, providers of goods and services and other related parties in the implementation of procurement of goods and services must comply with the following ethics:

- (1) Carry out duties in an orderly manner, with a sense of responsibility to achieve the goal of smooth and accurate attainment of the procurement of goods and services objectives;
- (2) Work professionally and independently on the basis of honesty, as well as maintain the confidentiality of the Procurement Documents which must be kept confidential to prevent the occurrence of irregularities in the procurement of goods and services process;
- (3) Not influence each other either directly or indirectly to prevent and avoid unfair competition;
- (4) Accept and be responsible for all the specified requirements in accordance with the agreement between the parties;

- (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan;
 - (6) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan;
 - (7) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (5) Avoid and prevent the occurrence of conflicts of interest among the related parties in the procurement of goods and services, either directly or indirectly, which could harm the interests of the Company;
 - (6) Avoid and prevent abuse of authority and/or collusion for personal, group or other party's gains that are directly or indirectly detrimental to the Company;
 - (7) Not accept, nor offer or promise to give or accept gifts, rewards in any form to anyone who is known or reasonably expected to be related to the procurement of goods and services.

Manajemen Risiko

Risk Management

PENGELOLAAN RISIKO

Dalam menjalankan peran yang diembannya, PII menghadapi risiko yang dapat berpengaruh negatif terhadap kelancaran usaha, pendapatan usaha maupun kondisi keuangannya. Terlebih lagi bahwa PII adalah suatu entitas yang bertanggung jawab untuk menanggung risiko apabila PJPB tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya dalam suatu pelaksanaan proyek infrastruktur. Untuk itu PII menjadikan pengelolaan risiko melalui suatu *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagai salah satu fokus utama dalam operasionalisasi organisasinya.

IDENTIFIKASI RISIKO

Berikut adalah uraian mengenai risiko-risiko utama yang dihadapi PII dan upaya mitigasi yang dapat dilakukan.

Risiko Legalitas dan Regulasi

Sebagai suatu entitas milik negara, PII memiliki eksposur terhadap perubahan status legalitas dan regulasi yang menjadi dasar kegiatan operasional perusahaan. Perubahan tersebut bisa berbentuk pengurangan, perluasan, tidak berlakunya kewajiban, wewenang dan tanggung jawab PII dari apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagai suatu risiko yang pemicu dan faktor risikonya berada di luar kendali PII, upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah membangun pemahaman yang lebih baik terhadap peran yang dapat dilakukan PII dalam percepatan pembangunan infrastruktur kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Saat ini, dasar pembentukan dan operasionalisasi PII diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35/2010, Peraturan Presiden No 13/2010, Peraturan Presiden No 78/2010, Peraturan Menteri Keuangan No 260/2010 dan Peraturan Pemerintah no.88/2010. Mengacu kepada kerangka regulasi tersebut, PII merupakan BUMN yang ditugaskan sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang bertanggung jawab dalam penyediaan Penjaminan Infrastruktur kepada proyek yang dikerjasamakan antara Pemerintah dan Badan Usaha.

Risiko Keuangan Perusahaan

Risiko keuangan terutama timbul sebagai akibat ketidakmampuan PII mencapai sasaran pendapatan hasil usaha, kerugian dari penempatan dana investasi, serta ketidakmampuan PII memperoleh pendanaan baru dari pihak kreditor maupun pemegang saham. Mitigasi atas

RISK MANAGEMENT OF IIGF

In executing its role, IIGF deals with various risks that can negatively affect the continuity of the business, the business income or the financial condition. In particular, IIGF is an entity responsible for the risks, in case CA fails to perform its contractual obligations when implementing an infrastructure project. Therefore, IIGF puts risk management through Enterprise Risk Management (ERM) as one of the main focus of its organizational operations.

RISK IDENTIFICATION

The following are descriptions of the main risks faced by IIGF and mitigation efforts that can be made:

Legality and Regulation Risks

As a state-owned entity, IIGF has exposures to changes in legal status and regulations which is used as the basis of operational activities of the Company. These changes can be in the form of the reduction, expansion, invalidation of the obligations, authorities and responsibilities of IIGF from what were previously set. As a risk that both the triggers and the risk factors are beyond the IIGF's control, the possible mitigation efforts may include building better understanding to the stakeholders on the role of IIGF in accelerating the infrastructure development.

Currently, the basis for the establishment and operation of IIGF is regulated in Governmental Regulation No. 35/2010, Presidential Regulation No. 13/2010, Presidential Regulation No. 78/2010, Regulation of the Minister of Finance No. 260/2010 and Governmental Regulation no.88/2010. Referring to these regulation frameworks, IIGF is a state-owned enterprise (Badan Usaha Milik Negara - BUMN) appointed as an Infrastructure Guarantee Business Entity (Badan Usaha Infrastruktur Guarantee - BUPI) responsible for providing Infrastructure Guarantee to projects made in partnership between the government and business entities.

Corporate Financial Risk

Financial risk generally occurs due to the inability of IIGF to achieve its revenue target, losses from the placement of investment funds, and the inability of IIGF to obtain new funding, whether from creditors or from shareholders. Mitigation of these risks can be attempted

risiko tersebut diupayakan dengan (i) mengamankan serta memastikan sumber-sumber pendapatan PII, (ii) memilih investasi portfolio secara berhati-hati dengan faktor risiko yang minimal, (iii) menjalin hubungan baik dengan berbagai lembaga keuangan termasuk lembaga multilateral, baik sebagai pihak kreditur maupun sebagai mitra dalam meningkatkan kapasitas penjaminan.

Risiko Operasional Perusahaan

Risiko operasional terutama berkaitan dengan ketidakmampuan PII beroperasi secara efisien sehingga mengakibatkan kerugian operasional. Berbagai faktor risiko operasional antara lain adalah sumber daya manusia, struktur organisasi dan sistem operasional yang kurang andal; peralatan kerja yang tidak memadai; pengawasan intern yang lemah; tindakan yang melanggar hukum oleh personil PII. Upaya mitigasi dilakukan antara lain melalui perekrutan dan pelatihan personil secara profesional; penetapan organisasi, manual dan metode operasi sesuai *best practice*; penggunaan alat dan perlengkapan kantor yang memadai; serta pengembangan *checks and balances* yang memadai di setiap jenjang operasi.

Risiko Portofolio Penjaminan

Risiko portofolio penjaminan merupakan risiko yang terkait tugas PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). Risiko ini meliputi terjadinya klaim atas penjaminan yang diberikan dan tidak efektifnya mekanisme regres yang menjadi dasar ganti rugi pembayaran klaim kepada PII, serta dipicu oleh cakupan dan tingkat risiko yang melekat pada setiap proyek yang dijamin oleh PII. Risiko proyek tersebut antara lain terkait dengan perubahan lanskap politik, pergantian pemerintahan, perubahan peraturan dan perundang-undangan, wanprestasi kewajiban kontraktual PJPJK, dalam hal mana sebagian atau keseluruhan faktor-faktor risiko tersebut dapat berdampak negatif terhadap kelayakan ekonomis proyek infrastruktur yang bersangkutan.

Dalam pengelolaan risiko ini (termasuk upaya mitigasinya), PII melakukan, antara lain, analisis terhadap probabilitas dan eksposur dari setiap peristiwa risiko yang tercakup dalam perjanjian penjaminan, mengevaluasi rencana mitigasi risiko yang diusulkan PJPJK, memastikan alokasi risiko proyek yang optimal serta memberlakukan imbal jasa yang memadai untuk setiap penjaminan yang diberikan. Risiko penjaminan ini pada dasarnya merupakan bagian dari risiko proyek KPS yang dikelompokkan dalam suatu kategori risiko ("Kategori Risiko KPS"), sebagaimana diuraikan pada Box 1 berikut ini.

by: (i) securing and ensuring IIGF's sources of revenue, (ii) careful selection of investment portfolio, with minimum risk factors, (iii) maintaining good relations with various financial institutions including multilaterals, as both creditor and partner in enhancing the guarantee capacity.

Corporate Operational Risk

Operational risk is generally related to the inability of IIGF to operate efficiently, which causes operational losses. Various factors of operational risk include: human resources; an unreliable organizational structure and operational system; inadequate working equipment; weak internal monitoring or violations of the law perpetrated by IIGF personnel. Mitigation efforts that can be implemented include, among others: professional recruitment and training of personnel; best practices in determining organization, manuals and methods of operation; utilization of adequate office tools and equipments; and development of adequate checks and balances in every level of the operation.

Guarantee Portfolio Risk

Guarantee portfolio risk relates to the role of IIGF as the Business Entity for Infrastructure Guarantee (BUPI). The risk includes the occurrence of guarantee claims and the ineffectiveness of the recourse mechanism as the basis of repayment of claims to IIGF, which is triggered by the scope and level of inherent risk of each project guaranteed by IIGF. These project risks may be related to changes in the political landscape, changes in the government, changes in rules and regulations or default of the contractual obligations of CA of which the risk factors may have negative impact on the economic viability of the relevant infrastructure project, whether a whole or partially.

In managing these risks (including the mitigation efforts), IIGF performs, among other actions, analysis of the probability and exposure of each risk event covered in the Guarantee Agreement, evaluating the risk mitigation plan proposed by the CA, ensuring optimum risk allocation of the project, and applying appropriate fees to each guarantee provided. This guarantee provisioning risks are basically a subset of the PPP project risk, classified in a risk category ("PPP Risk Category"), as described in the following Box 1.

Kategori Risiko KPS

Kategori Risiko KPS dikembangkan sebagai suatu daftar kelompok risiko yang generik, yang diharapkan dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi peristiwa-peristiwa risiko spesifik kepada setiap proyek KPS.

Peristiwa-peristiwa risiko yang teridentifikasi tersebut dapat digunakan lebih jauh untuk tahapan penilaian risiko dan pengembangan matriks/strategi alokasi risiko.

Kategori risiko ini tidak bermaksud untuk menjadi suatu daftar risiko yang menyeluruh dan berlaku pada setiap proyek KPS. Perbedaan situasi dan kondisi spesifik dalam suatu proyek KPS perlu juga dipertimbangkan.

1. Risiko Lokasi adalah kelompok risiko dimana lahan proyek tidak tersedia atau tidak dapat digunakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan dalam biaya yang diperkirakan, atau bahwa lokasi dapat menimbulkan suatu beban atau kewajiban bagi pihak tertentu. Dengan demikian, risiko-risiko yang termasuk kategori ini adalah:
 - a). Risiko pembebasan lahan;
 - b). Risiko ketidaksesuaian lokasi lahan;
 - c). Risiko lingkungan.
2. Risiko Desain, Konstruksi dan Uji Operasi adalah risiko desain, konstruksi atau uji operasi suatu fasilitas proyek atau elemen dari prosesnya, dilakukan dengan cara yang menyebabkan dampak negatif terhadap biaya dan pelayanan proyek. Dengan demikian, risiko yang termasuk dalam kategori ini adalah:
 - a). Risiko perencanaan ;
 - b). Risiko desain;
 - c). Risiko penyelesaian;
 - d). Risiko kenaikan biaya;
 - e). Risiko uji operasi.
3. Risiko sponsor adalah risiko dimana BU dan/atau sub-kontraktornya tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada PJPK.
4. Risiko finansial adalah risiko-risiko terkait aspek kelayakan finansial proyek. Risiko-risiko tersebut dapat berupa:
 - a). Risiko ketidakpastian pembiayaan;
 - b). Risiko parameter finansial;
 - c). Risiko struktur finansial;
 - d). Risiko asuransi.

PPP Risk Category

The Risk Category is developed as a generic list of risk groupings which is expected to be used for generating identified risk events in each specific PPP project.

The identified risk events can be used further for risk assessment stage and developing risk allocation matrix/strategy.

This checklist is not meant to be exhaustive; particular circumstances in each specific PPP project should also be considered.

1. Site risk is the risk that the project land will be unavailable or unable to be used at the required time, in the manner or at the cost anticipated, or that the site will generate unanticipated liabilities. Thus, risks included in this category are:
 - a). Land acquisition risk;
 - b). Land site unsuitability risk;
 - c). Environmental risk.
2. Design, construction and commissioning risk is the risk that the design, construction or commissioning of the facility or certain elements of each of these processes, are carried out in a way which results in adverse cost and/or project delivery consequences. Thus, risks included in this category are:
 - a). Planning risk;
 - b). Design risk;
 - c). Completion risk;
 - d). Cost overrun risk;
 - e). Commissioning risk.
3. Sponsor risk is the risk where the Project Company (PC) and/or its sub-contractors are unable to fulfill their contractual obligations to the government.
4. Financial risk is the risk related to financial viability aspects of the project. This may refer to a number of risks, including the following:
 - a). Financial uncertainty risk;
 - b). Financial parameter risk;
 - c). Financial structure risk;
 - d). Insurance risk.

5. Risiko Operasional adalah risiko dimana proses penyediaan layanan infrastruktur sesuai kontrak - atau suatu elemen dari proses tersebut (termasuk input yang digunakan atau sebagai bagian dari proses itu) - akan terpengaruh dengan cara yang menghalangi BU dalam menyediakan layanan kontrak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan/ atau sesuai proyeksi biaya. Dengan demikian, risiko termasuk dalam kategori ini adalah:
 - a). Risiko pemeliharaan;
 - b). Risiko cacat tersembunyi (*latent defect*);
 - c). Risiko teknologi;
 - d). Risiko utilitas;
 - e). Risiko sumber daya atau input;
 - f). Risiko hubungan industri.
 6. Risiko pendapatan (*revenue*) adalah risiko bahwa pendapatan proyek tidak dapat memenuhi proyeksi tingkat kelayakan finansial, karena perubahan yang tak terduga baik permintaan proyek atau tarif yang disepakati atau kombinasi keduanya. Karenanya, risiko termasuk dalam kategori ini adalah:
 - a). Risiko permintaan; dan
 - b). Risiko tarif.
 7. Risiko konektivitas jaringan adalah risiko terjadinya dampak negatif akibat perubahan dari kondisi jaringan saat ini atau rencana masa depan. Risiko yang termasuk dalam kategori ini adalah:
 - a). Risiko konektivitas dengan jaringan eksisting;
 - b). Risiko pengembangan jaringan;
 - c). Risiko fasilitas pesaing.
 8. Risiko *interface* adalah risiko dimana metode atau standar penyediaan layanan akan menghalangi atau mengganggu penyediaan layanan yang dilakukan sektor publik atau sebaliknya. Risiko ini termasuk ketika kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai/tidak cocok dengan yang dilakukan oleh BU, atau sebaliknya.
 9. Risiko politik adalah risiko yang dipicu tindakan/ tiadanya tindakan PJPK yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang merugikan secara material dan mempengaruhi pengembalian ekuitas dan pinjaman. Risiko yang termasuk kategori ini adalah:
 - a). Risiko Mata Uang yang Tidak Dapat Dikonversi atau Ditransfer;
 - b). Risiko pengambilalihan;
 - c). Risiko perubahan regulasi dan perundangan;
5. Operating risk is the risk that the process for delivering the contracted services – or an element of that process (including the inputs used within or as part of that process) – will be affected in a way which prevents the PC from delivering the contracted services according to the agreed specifications and/ or within the projected costs. Thus, risks included in this category are:
 - a). Service availability risk;
 - b). Maintenance risk;
 - c). Latent defect risk;
 - d). Technology risk;
 - e). Utilities risk;
 - f). Resource or input risk;
 - g). Industrial relations risk.
 6. Revenue risk is the risk that the project revenue is unable to meet the projected level of financial viability, due to unexpected changes to either the project demand or the agreed tariff or combination of both. Thus, risks included in this category are:
 - a). Demand risk;
 - b). Tariff risk.
 7. Network connectivity risk is the risk that the government-controlled network(s) needed for the PC to deliver the agreed services will be removed, not adequately maintained or otherwise changed. Thus, risks included in this category are:
 - a). Connectivity with the existing network risk;
 - b). Network development risk;
 - c). Competing facility risk.
 8. Interface risk is the risk that the method or standard of delivery of the contracted services will prevent or in some way frustrate the delivery of the public sector delivered services or vice versa. The risk includes when the quality of works done by government not conform/suitable with those done by the PC, vice versa.
 9. Political Risk is the risk of unforeseeable action/ inaction by the CA or any other government authority that materially and adversely affects the expected return on equity, debt service or otherwise results in increased costs to the PC.
 - a). Currency inconvertibility and non-transfer risk;
 - b). Expropriation risk;
 - c). Change in law (legislative and government policy) risk;

- d). Risiko *sub-sovereign* atau parastatal;
- e). Risiko perijinan;
- f). Risiko perubahan tarif pajak.

10. Risiko kahar (*force majeure*) adalah risiko terjadinya kejadian kahar yang sepenuhnya di luar kendali kedua belah pihak (misalnya bencana alam atau akibat manusia) dan akan mengakibatkan penundaan atau default oleh BU dalam pelaksanaan kewajiban kontraknya.

11. Risiko kepemilikan aset adalah risiko terjadinya peristiwa seperti kejadian kehilangan (misalnya hilangnya kontrak, *force majeure*), perubahan teknologi, dan lainnya, yang menyebabkan nilai ekonomi aset menurun, baik selama atau pada akhir masa kontrak.

- d). Sub-sovereign or parastatal risk;
- e). Regulatory consent risk;
- f). Tax rate change risk.

10. Force majeure risk is the risk that a specified event entirely outside the control of either party (e.g. act of god, man-made catastrophic event) will occur and will result in a delay or default by the PC in the performance of its contractual obligations.

11. Asset ownership risk is the risk that events such as loss events (e.g. contract loss, force majeure), technological change, construction of competing facilities or premature obsolescence will occur, with the result that the economic value of the asset may vary, either during or at the end of the contract term, from the value upon which the financial structure of the project is based.

PENILAIAN RISIKO

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko oleh PII, penilaian risiko dilakukan terhadap keseluruhan risiko PII yang telah teridentifikasi sebelumnya. Khusus terhadap risiko penjaminan, PII melakukan penilaian sesuai dengan kerangka sebagai berikut:

Penilaian Risiko untuk Penjaminan Infrastruktur

Keputusan PII dalam penyediaan penjaminan risiko infrastruktur dalam suatu proyek KPS dibuat setelah mengevaluasi, antara lain, kesesuaian draft perjanjian KPS dengan prinsip alokasi risiko (lihat Box 2), seperti digambarkan dalam diagram berikut.

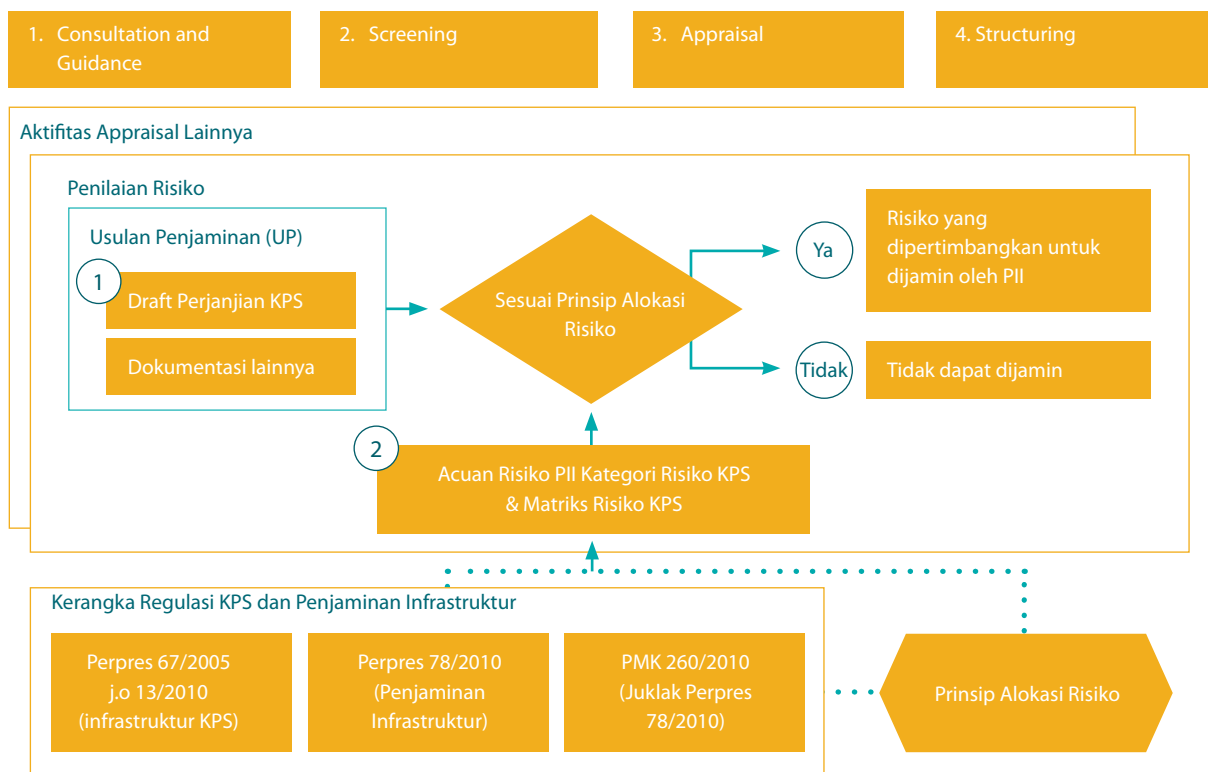
RISK ASSESSMENT

As part of risk management by IIGF, risk assessment is performed against all of the previously identified IIGF risks. Especially for the project portfolio risk, IIGF carries out an assessment in accordance with the following frameworks:

Risk Assessment for Infrastructure Guarantee

The IIGF decision in providing guarantee for risks in a PPP project is made after analyzing, among others, the conformity of the draft PPP Agreement with the risk allocation principles (reflected in the IIGF Risk Guideline), as depicted in the diagram below (see Box 2).

Proses Penyediaan Penjaminan Infrastruktur oleh PII



Pada dasarnya, penjaminan infrastruktur oleh PII menjamin kewajiban finansial PJPK dalam suatu perjanjian KPS, dimana kewajiban ini timbul akibat risiko yang disebabkan oleh peristiwa penyebab (*triggering events*) berikut:

- tindakan atau tiadanya tindakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK dalam hal-hal yang menurut hukum atau peraturan perundangan - PJPK atau Pemerintah selain PJPK memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut;
- kebijakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK;
- keputusan sepihak dari PJPK atau Pemerintah selain PJPK;
- ketidakmampuan PJPK dalam melaksanakan suatu kewajiban yang ditentukan kepadanya oleh Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Kerjasama (*breach of contract*).

Basically, Infrastructure Guarantee by IIGF guarantees the financial obligations of CA in a certain PPP agreement, wherein the obligation occurs due to the risks caused by the following triggering events:

- Action or inaction of CA or government other than CA issues related to rules or regulations – CA or government other than CA with the power or authority to do these actions;
- Policies of CA or government other than CA;
- One-sided decision from CA or government other than CA;
- Inability of CA in executing an obligation set upon it by Private Investors based on the Cooperation Agreement (*breach of contract*).

Box 2

Prinsip Alokasi Risiko

Penentuan kewajiban PJPK dalam Perjanjian Kerjasama proyek KPS perlu memenuhi prinsip Alokasi Risiko. Alokasi risiko yang optimal penting demi memaksimalkan *value for money*.

Prinsip yang lazim diterapkan untuk alokasi risiko adalah bahwa risiko sebaiknya dialokasikan kepada pihak yang relatif lebih mampu mengelolanya atau dikarenakan memiliki biaya terendah untuk menyerap risiko tersebut. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, diharapkan dapat menghasilkan premi risiko yang rendah dan biaya proyek yang lebih rendah sehingga berdampak positif bagi pemangku kepentingan proyek tersebut.

Principles of Risk Allocation

Determination of the CA's obligations in a PPP Agreement need to conform with the risk allocation principles. An optimal risk allocation is vital in maximizing the value for money.

The common principles often implemented in a successful PPP project in achieving the optimal risk allocation is that a risk should be allocated to party that is relatively able in managing the risk (or having the least cost of absorbing such risk). If this principle is implemented properly, it is expected that the risk premium and the project cost would be lower in order to have positive impact to the project stakeholders.

Cakupan Risiko Penjaminan Infrastruktur

Konsisten dengan PMK 260/2010, kategori risiko yang terkait kewajiban finansial PJPK harus mengikuti prinsip alokasi risiko (lihat Box 2). Regulasi ini juga mensyaratkan PII untuk menerbitkan suatu Acuan Alokasi Risiko dalam membantu PJPK sebagai referensi dalam melakukan identifikasi dan alokasi risiko (saat ini telah tersedia dan siap diunduh di laman PII, www.iigf.co.id) dan mencakup detail mengenai kemungkinan cakupan risiko dalam penjaminan infrastruktur.

Secara umum, berikut adalah daftar sebagian dari risiko-risiko (merupakan kewajiban finansial PJPK dalam Perjanjian KPS) yang dapat dijamin PII :

Risk Coverage of Infrastructure Guarantee

Consistent to PMK 260/2010, the category of risks relating to CA's financial obligations should follow the principle of risk allocation (see Box 2).

This regulation also requires IIGF to issue a guideline for risk allocation to assist CA in conducting risk identification and allocation (currently available and downloadable at IIGF's website, www.iigf.co.id), and contains more detail on the possible risk coverage of infrastructure guarantee.

In general, the following non-exhaustive list includes some of the risks (stemming from the CA's financial obligation in the PPP Agreement) that can be covered by IIGF:

No.	Risiko Risk	Deskripsi Description
1	Lisensi, Izin dan Persetujuan Licenses, permits, and approvals	Cakupan terhadap risiko akibat keterlambatan atau kegagalan dalam memberikan lisensi, izin atau persetujuan (keterlambatan yang berdampak negatif terhadap biaya konstruksi, biaya pendanaan dan dimulai perolehan pendapatan). Coverage for delay or failure to grant licenses, permits, and approvals (delays that would have adverse effects on construction costs, financing charges, and the commencement of revenue).
2	Keterlambatan/Kegagalan Financial Close Financial close delay/failure	Cakupan terhadap risiko keterlambatan atau kegagalan financial close yang diakibatkan tindakan/tidak bertindak PJP (selain isu lahan dan isu perijinan). Coverage for any delay/failure of financial closure due to any other action/inaction on the part of the CA (beyond land and licenses/permits/approvals).
3	Perubahan Regulasi dan Perundangan Change in law/regulations	Cakupan terhadap kerugian sebagai dampak dari perubahan regulasi/ perundangan yang berdampak negatif terhadap proyek, seperti peraturan pajak, struktur tarif, atau peraturan yang mempengaruhi spesifikasi teknis proyek dan menyebabkan perubahan biaya. Berlaku hanya jika kontrak secara eksplisit terhadap dan terikat dengan regulasi/ perundangan yang berlaku (melindungi terhadap perubahan regulasi/ perundangan), dimana lazim bagi PJP untuk menanggung risiko perubahan regulasi/ perundangan yang bersifat diskriminatif. Coverage for impact of change in law/regulation in event that change in law adversely affects project, such as tax law, law on tariff structure, or law that affects project's technical specifications and results in changes in costs. Applies only if contract is explicit in its basis on and ties with existing law (i.e., protects from changes in law), where it is common for CA to bear the risk of discriminatory change of law.
4	Wanprestasi Breach of contract	Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindak PJP yang melanggar kontrak, atau merubah kontrak secara sepihak. Coverage for CA's action/inaction in violation of contract, or CA's changing clauses of contract unilaterally.
5	Integrasi dengan Jaringan Integration with network	Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindak PJP (atau otoritas yang berwenang) yang mempengaruhi operasional/ pendapatan proyek karena kegagalan (atau tidak memadainya) integrasi dengan jaringan eksisting atau yang direncanakan. Coverage for actions/inaction that affect project operations/ revenue by failure (or inadequate) integration with existing or future networks.
6	Risiko Fasilitas Pesaing Competing facility risk	Cakupan terhadap risiko adanya fasilitas/infrastruktur sejenis yang dibangun dan akan bersaing dengan penyediaan layanan yang diperjanjikan. Coverage for the risk that other similar facility/infrastructure is built which eventually competes with the delivery of the contracted services.

No.	Risiko Risk	Deskripsi Description
7	Risiko Pendapatan Revenue Risk	Cakupan terhadap pemenuhan/penerapan kewajiban PJPk terhadap pendapatan proyek. Cakupan berlaku hanya jika PJPk secara kontraktual menyetujui pembayaran atas layanan infrastruktur/proyek (anuitas/dukungan fiskal terhadap kesenjangan kelayakan/pendapatan minimum). Coverage to fulfill/enforce CA's obligations on revenue. Coverage applies only to CA's contractually agreed payments (annuity/viability gap/minimum revenue).
8	Risiko Permintaan Demand Risk	Cakupan terhadap perubahan, yang ditanggung BU akibat tindakan CA, yang mempengaruhi permintaan layanan proyek. Coverage for change, borne of CA's actions, that have an influence on demand for the project's services.
9	Risiko Harga Pricing risk	Cakupan terhadap pemenuhan tingkat pendapatan yang tidak tercapai akibat perubahan tarif secara sepihak. Coverage to fulfill level of revenue that was not reached due to unilateral change of tariff.
10	Risiko Ekspropriasi Expropriation Risk	Cakupan terhadap tindakan pengambilalihan proyek oleh CA atau otoritas lainnya yang menyebabkan berakhirnya kontrak proyek. Coverage for takeover by CA or other public agencies causing end of project contract.
11	Risiko Tidak Dapat dilakukannya Konversi dan Transfer Mata Uang Currency inconvertibility & non-transfer Risk	Cakupan terhadap risiko pendapatan/profit dari proyek tidak dapat dikonversi ke mata uang asing dan/atau tidak dapat direpatriasi ke negara asal investor. Coverage for risk that the revenue/profit from the project could not be converted to the foreign currency and/or repatriated to the investor's home country.
12	Risiko Parastatal atau Sub-nasional Sub-sovereign or Parastatal risk	Cakupan terhadap risiko suatu entitas sub-nasional atau parastatal yang bertindak sebagai CA pada suatu proyek yang gagal memenuhi pembayaran kontraktual atau kewajiban materil lainnya (karena keputusan sepihak). Coverage for risk that the subsovereign or parastatal entity which act as the CA in the project has failed to perform its contractual payment or other material obligations (i.e. due to unilateral decision).
13	Risiko Kahar yang Mempengaruhi PJPk Force majeure risk affecting CA	Cakupan terhadap risiko bahwa suatu kejadian di luar kendali kedua belah pihak (bencana alam atau akibat tindakan manusia) yang akan terjadi dan dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan CA untuk memenuhi kinerja kewajiban kontraktual. Coverage for risk that a specified event entirely outside the control of either party (e.g. act of god, man-made catastrophic event) will occur and will result in a delay or default by CA in the performance of its contractual obligations.
14	Risiko Interface Interface risk	Cakupan terhadap risiko bahwa metode atau standar layanan sektor publik akan menghambat layanan kontraktual atau sebaliknya. Risiko ini termasuk jika kualitas pekerjaan oleh pemerintah tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan BU. Coverage for risk that the method or standard of delivery of the contracted services will prevent or in some way frustrate the delivery of the public sector delivered services or vice versa. The risk includes when the quality of works done by the government does not conform/unsuitable with those done by the PC, vice versa.

PEMANTAUAN RISIKO

Sesuai struktur organisasi PII, *Risk Assessment and Pricing* (RAP) adalah divisi yang salah satu tugasnya memonitor pelaksanaan ERM perusahaan. Sebagai pemilik kerangka pengelolaan risiko di PII, terhadap risiko penjaminan proyek, RAP akan memberikan sudut pandang yang independen terhadap risiko terkait penilaian proyek dan klaim penjaminan. Secara khusus, RAP akan melakukan tinjauan independen terhadap kepatuhan proses penilaian dan memberikan komentar independen dari perspektif risiko institusi (baik batas-batas tertentu dilampaui, atau jika ada masalah institusi yang tidak ditangani, dan sebagainya) yang berasal dari tahap evaluasi proyek (*appraisal*) sebelum dilanjutkan kepada Komite *Underwriting*.

Mekanisme pemantauan penjaminan proyek harus dijalankan untuk mengidentifikasi seluruh eksposur risiko, jika ada sebelum mereka berubah menjadi klaim. Dalam hal ini, PII melalui divisi *Project Monitoring* (PMO) akan memantau kinerja eksposur risiko terhadap proyek-proyek secara periodik. Mekanisme pemantauan akan membantu PII untuk mengambil tindakan perbaikan dan membatasi terjadinya klaim.

Terhadap risiko operasional, PII sebagai sebuah institusi perlu memantau eksposur peristiwa risiko, antara lain:

- risiko personil utama
- kecurangan internal (*internal fraud*):
- kecurangan eksternal (*external fraud*)
- praktik kerja
- kerusakan aset fisik
- gangguan usaha
- pengelolaan eksekusi, penyelesaian dan proses
- keselamatan kerja

Terhadap risiko keuangan perusahaan yang terkait dengan ketidakpastian pasar, PII melalui divisi *Treasury* (TRS) perlu menerapkan kebijakan investasi yang bijaksana untuk pengelolaan dana dan untuk mencapai hasil optimal. Investasi dana yang belum dicadangkan untuk penjaminan proyek akan mengikuti norma-norma yang diatur dalam kebijakan internal perusahaan. Norma-norma tersebut dirumuskan untuk memberikan fleksibilitas yang cukup untuk mengoptimalkan pengembalian investasi tanpa mengambil risiko yang berlebihan.

RISK MONITORING

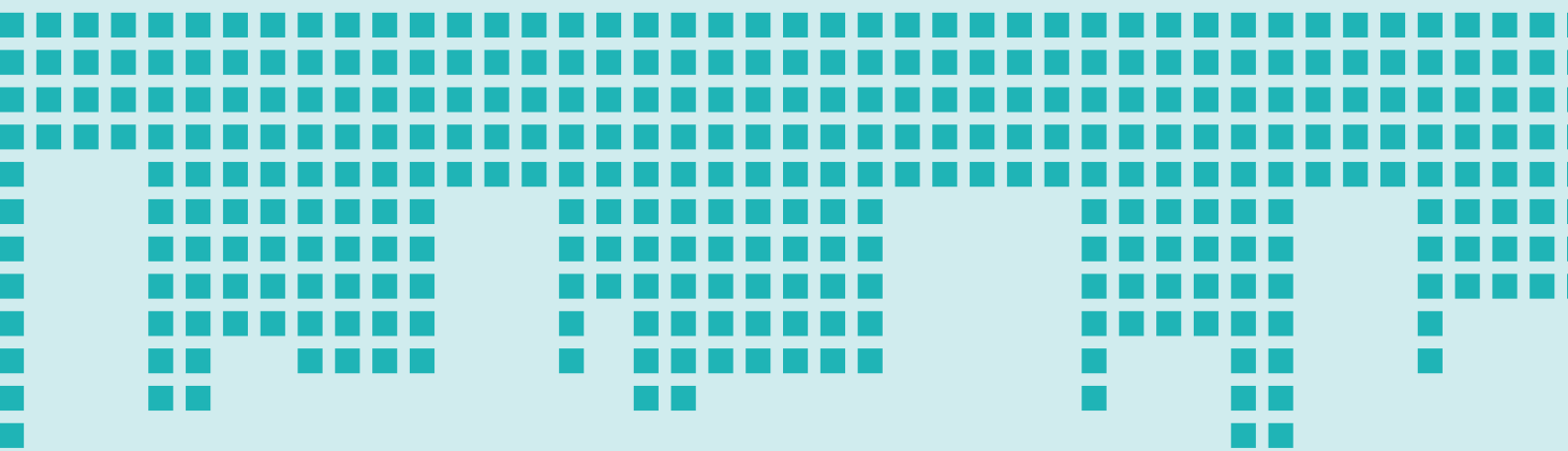
According to the organizational structure of IIGF, Risk Assessment and Pricing (RAP) is the division that performs, among others, monitoring of the execution of the Company's Enterprise Risk Management (ERM). As owner of the IIGF risk management framework, on the project portfolio risk, the RAP will provide an independent review on risks related to the project and claim assessment. Specifically, RAP will carry out independent reviews on the compliance of the assessment process, and will provide independent comments from the perspective of institutional risk (whether certain limits were exceeded, or if there are institutional problems that are not managed, etc.) raising from the project evaluation stage (*appraisal*), before proceeding to the Underwriting Committee.

The monitoring mechanism of project guarantees must be executed to identify all of the risk exposures, if any, before they are turned into claims. In this case, IIGF through the Project Monitoring (PMO) division will monitor the performance of risk exposure in projects periodically. The monitoring mechanism will help IIGF to take corrective actions and to limit the occurrence of claims.

Regarding operational risks, IIGF as an institution must monitor risk exposures, such as:

- Key personnel risk
- Internal fraud
- External fraud
- Employment practices
- Damage to physical assets
- Business disruptions
- Management of execution, delivery and process
- Work safety

On the corporate financial risks related to market uncertainty, IIGF through its Treasury Division (TRS) must apply a prudent investment policy for management of funds and to achieve optimal returns. The investment of the idle funds will be within the norms laid down in this policy. The norms have been formulated to provide sufficient flexibility to optimize returns available in the market without taking excessive risks.





Proyek Berjalan

Projects in the Pipeline

Menyusul kesiapan Penjaminan Infrastruktur Indonesia dari segi kapasitas penjaminan maupun kebijakan serta prosedur perusahaan yang telah diletakkan pada tahun 2010, PII siap melaksanakan program penjaminan pembangunan infrastruktur di tahun 2011.

Beberapa proyek infrastruktur tersebut telah melalui berbagai tahapan proses penjaminan, bahkan salah satu proyek tersebut, yaitu Proyek Pembangkit Listrik Jawa Tengah di Propinsi Jawa Tengah yang berkapasitas 2 x 1.000 MW telah mencapai tahap penerbitan Perjanjian Penjaminan final yang telah dilakukan pada tanggal 15 Maret 2011.

Proyek ini menjadi program penjaminan PII yang pertama, dan menjadi tolok ukur bagi realisasi program penjaminan serupa untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur lainnya yang berpotensi menerima penjaminan PII.

With the readiness of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund in terms of guarantee capacity, and the establishment of company policies and procedures in 2010, IIGF is ready to execute infrastructure guarantee programs in 2011.

Some of the infrastructure projects have undergone a number of guarantee process stages. One of these projects, the Central Java Power Plant Project in Central Java with capacity of 2 x 1,000 MW, has reached the issuance of the Final Guarantee Agreement on March 15, 2011.

This project is the first guarantee program executed by IIGF, and as such is likely to be the benchmark for the realization of similar guarantee programs for several other infrastructure projects with the potential to receive guarantees from IIGF.

Proyek PLTU Jawa Tengah (Proyek CJPP)

Coal-fired Central Java Power Plant Project (CJPP Project)

Pembangunan pembangkit listrik merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia mengingat kritisnya persediaan pasokan listrik nasional dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW yang telah digulirkan pemerintah menggarisbawahi *urgency ketersediaan tenaga listrik tersebut*.

Pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara PLTU Jawa Tengah berdaya 2.000MW di Pemalang, Jawa Tengah, menjawab tantangan kebutuhan percepatan pembangunan pembangkit listrik di Indonesia. PII telah melengkapi proses penjaminan proyek CJPP tersebut hingga tuntas.

Surat Pernyataan Kesediaan Penjaminan beserta Draft Final Perjanjian Penjaminan (*Guarantee Agreement*) senilai Rp300 miliar telah disampaikan kepada PLN pada tanggal 15 Maret 2011.

The construction of electricity generators is a major priority of the government of Indonesia, considering the critical need to ensure the national electricity supply over the next few years. The project for expediting the construction of the 10,000 MW electricity generators already operated by the government underlines this urgency.

The construction of the 2,000-MW Central Java Power (CJP) coal-powered electricity generator in Pemalang, Central Java, is a response to the challenge of constructing power plants in Indonesia. IIGF has fully completed the administration process of the guarantee of the CJP project.

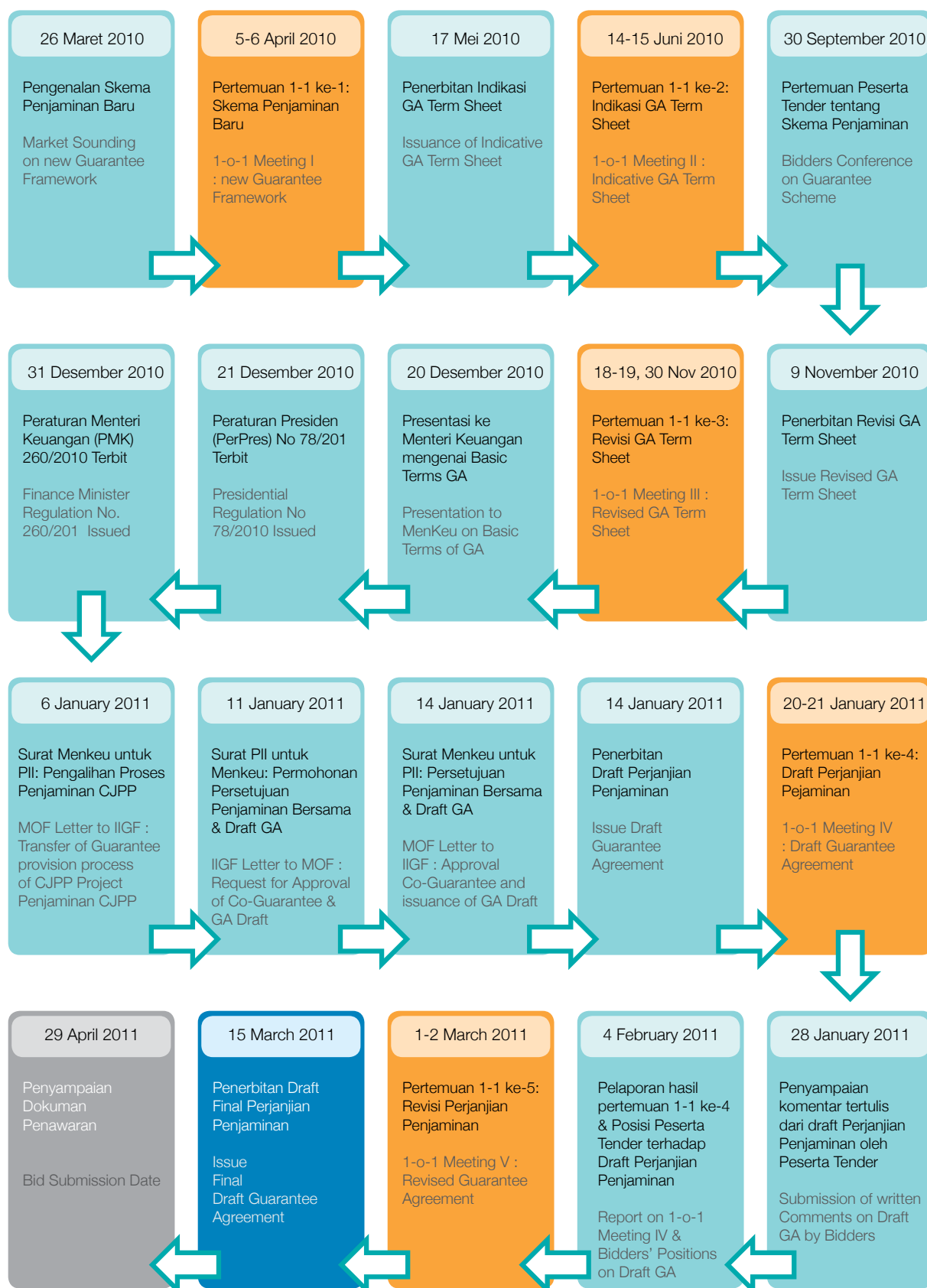
The Statement of Willingness to Guarantee and the Final Draft of Guarantee Agreement, at a value of Rp300 billion, were submitted to the State Electricity Company (PLN) on March 15, 2011.

Profil Proyek CJPP

CJPP Project Profile

Lokasi Location	Pemalang - Batang, Propinsi Jawa Tengah
Kapasitas Capacity	2 x 1000 MW (Gross), Commercial Operation Date (COD):2017
Estimasi Biaya Investasi Estimated Investment	~ US\$ 3,2 miliar
Teknologi Technology	Pulverized coal, supercritical/ultra-supercritical boiler
Skema Pengadaan Procurement Scheme	Independent Power Producer (IPP) melalui Tender Internasional
Term Power Purchase Agreement (PPA)	25 Tahun
Struktur PPP PPP Structure	Built - Operate - Transfer (BOT)
Government Guarantee	Co-Guarantee between IIGF and Government of Indonesia based on "amount sharing" concept with "first loss basis for IIGF portion

Kronologis Guarantee Agreement ('GA') CJPP Project



Proyek Lainnya yang berjalan Other Projects in the Pipeline

No	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Estimasi Nilai Proyek (RpMilyar) Estimated Project Value (Rpbillion)
1	Air Minum - Way Sekampung Drinking Water - Way Sekampung	Penyediaan air minum pada 8 kecamatan di Bandar Lampung untuk 500 l/detik. Supply of drinking water for 8 regencies in Bandar Lampung with capacity of 500 l/second.	355
2	Air Minum - Umbulan Drinking Water - Umbulan	Penyaluran air curah sebesar 4.000 l/detik dari mata air Umbulan, Kab. Pasuruan ke wilayah 3 kabupaten dan 2 kota di Jawa Timur. Water flows of 4,000 l/second from the spring well at Umbulan, Pasuruan regency, to 3 regencies and 2 cities in East Java.	1,910
3	Air Minum Jakarta - Bekasi – Karawang/Jatiluhur Drinking Water Jakarta - Bekasi – Karawang/ Jatiluhur	Sistem pengolahan dan penyaluran air minum dengan kapasitas 5000 l/detik dari Waduk Jatiluhur ke DKI Jakarta, Bekasi dan Karawang. Water plant and distribution system for drinking water with capacity of 5,000 l/second from the Jatiluhur Dam to DKI Jakarta, Bekasi and Karawang.	1.771
4	Proyek Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Toll Road Project, Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi	Pembangunan dan pengelolaan jalan tol sepanjang 60 km di Sumatera Utara dari Kota Medan – Bandara Kualanamu – Tebing Tinggi. Construction and operation of 60-km Toll Road in North Sumatra From Medan – Bandara Kualanamu – Tebing Tinggi.	4.700
5	Pelabuhan Tanah Ampo Bali Port at Tanah Ampo Bali	Peningkatan dermaga dan fasilitas pelabuhan untuk dapat disinggahi kapal pesiar internasional di Kab. Karang Asem, Bali. Upgrading of wharf and docking facilities to receive large international cruise ships in Karang Asem regency, Bali.	337
6	Air Minum - Kabupaten Maros Drinking Water - Maros Regency	Penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dengan kapasitas 250 l/detik. Supply of drinking water for Maros regency in South Sulawesi with a capacity of 250 l/second.	108
7	Air Minum - Tukad Unda Drinking Water - Tukad Unda	Sistem pengolahan dan penyaluran air minum dengan kapasitas 1000 l/detik dari Kabupaten Klungkung ke Kota Denpasar dan Kab. Badung, Propinsi Bali. Water plant and distribution system for drinking water with capacity of 1,000 l/second from Klungkung regency to Denpasar and Badung regency, Bali province.	407
8	Jakarta City - Airport Railway Jakarta City - Airport Railway	Proyek pembangunan 33 km rel kereta api ganda dari Manggarai ke Bandara Soekarno Hatta beserta penyediaan gerbong penumpang dan lokomotifnya Construction of 33-km two-track railway between Manggarai and Soekarno-Hatta International Airport, including provision of train cars and locomotive.	8,080

Status	Rencana Tindak Lanjut dari PII
Status	IIGF Follow-up
Revisi pra FS sudah dilakukan PDAM Way Rilau dan akan direview oleh PwC serta penyiapan dokumen lelang. Revised pre- FS has been completed by PDAM Way Rilau for review by PwC and preparation of tender documents.	PII telah mempersiapkan tenaga ahli untuk proses Appraisal, menunggu pemasukkan GAP dari Pemkot Bandar Lampung. PII has prepared experts for appraisal process, pending GAP response from City Hall of Bandar Lampung.
Proses PQ telah dilakukan, tanggal 2 Maret 2011 telah diiklankan pada media masa cetak dan elektronik. PQ process has been done, and advertised through print and electronic media on 2 March 2011.	Proses konsultasi telah dilakukan dan Screening form telah disampaikan dan menunggu respons dari Pemprov Jatim. Consultation process carried out and screening form submitted and awaiting response from Provincial Government of East Java.
Pre FS aspek teknis akan dilaksanakan oleh konsultan Indll untuk menentukan trase dan biaya proyek. Pre FS technical aspect to be carried out by Consultant Indll to determine project cost.	Sudah melakukan konsultasi proyek ke Dirjen Cipta Karya. Completed project consultation with the Directorate General of General Construction (Cipta Karya).
Pra Studi Kelayakan perlu di review kembali, BPJT akan menugaskan konsultan untuk mereview dokumen proyek Pre Feasibility Study needs to be reviewed, BPJT will assign consultant to review project documents	Formulir penyaringan proyek telah direspons, PII telah mempersiapkan konsultan appraisal Pre-qualifying forms have been responded to, PII has prepared appointment of appraisal consultant.
Konsultan untuk penyiapan proyek telah ditunjuk untuk mempersiapkan review pra FS dan dokumen transaksi proyek. (TA dibantu oleh IRS DP Bappenas). Consultant for project preparation appointed to review pre FS and project transaction document (TA assisted by IRS DP Bappenas).	Otorita Pelabuhan telah ditetapkan sebagai Contracting Agency. Port Authority designated as Contracting Agency.
Penyempurnaan kajian financial Pra FS telah selesai , konsultan untuk transaksi akan dimobilisasi oleh IRS DP bappenas. Improvement to the financial statements for Pre FS completed, consultant for transaction will be arranged by IRS DP Bapenas.	PII akan melakukan konsultasi kembali dengan pejabat di Kabupaten Maros, seperti Bupati dan Dirut PDAM yang baru. PII will consult again with officials of Maros regency including the regent and the new CEO of PDAM.
Korea Water mempersiapkan FS sebagai unsolicited proyek, dgn memperluas lingkup proyek ke Kab. Badung dan Kota Denpasar. Korea Water to prepare FS for unsolicited project, by extending te scope of project to Badung Regency and City of Denpasar.	Perlu melakukan konsultasi kembali terkait perubahan lingkup proyek. Need to repeat consultation due to changes in the scope of works.
Belum ada penetapan status PT Rail Link. Sedang mencari sumber dana untuk penyiapan dokumen pra FS. Pending official designation of PT Rail Link. Will raise funds to undertake pre-FS documentation.	Proses konsultasi telah dilakukan, akan meningkat ke proses screening. Consultation process completed, will proceed to screening process.

Kegiatan Lainnya di Tahun 2010

Other Activities in 2010

Selama tahun 2010, PII telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka persiapan operasional perusahaan, antara lain:

- Merumuskan Manual Operasional, kebijakan Tata Kelola Perusahaan, *Key Performance Indicators* untuk Direksi, standar Perjanjian Konsesi, matriks kewenangan, kebijakan penempatan dana, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan SDM, serta peningkatan kapasitas bagi PJPK dan staf di pemerintahan.

Selain itu, PII giat melakukan kegiatan konsultasi dengan PJPK dan Pemangku Kepentingan. PJPK adalah pihak-pihak yang secara langsung bertanggungjawab terhadap proyek yang dijamin oleh PII. Sedangkan Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi aktivitas kerja PII.

Adapun kegiatan konsultasi dengan pihak PJPK selama tahun 2010 mencakup:

- Melakukan koordinasi proyek *Waste to Energy* Gedebage, Bandung (surat kepada Walikota Bandung No. 115/DIR/07/2010, tertanggal 21 Juli 2010).
- Melakukan fasilitasi penandatanganan MOU antara Pemerintah Kota Bandar Lampung, PDAM Way Rilau, BPPSPAM dengan Bank Dunia dan *Singapore Corporation Enterprise* (SCE) di Singapura.
- Melakukan fasilitasi penyusunan *Memorandum of Understanding* tentang rencana bantuan Bank Dunia/SCE kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung/PDAM Way Rilau (Kota Bandar Lampung) terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Way Sekampung. Memberikan input dalam rangka penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) bantuan teknis dari Bank Dunia/SCE kepada Pemerintah Kota/PDAM Way Rilau Bandar Lampung.
- Membahas rencana bantuan Bank Dunia/SCE kepada PII dan proyek *pipeline* dengan para Calon PJPK, yaitu PDAM Way Rilau (Kota Bandar Lampung) terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Way Sekampung dan Pihak Direktorat Jenderal Kereta Api sebagai PJPK proyek Kereta Api Bandara

Throughout 2010, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund has executed a number of activities to prepare for the operation of the Company, including:

- Formulating the Operation Manuals, governance policies of the company, key performance indicators for the directors, standard concession agreements, authority matrices, fund allocation policies, goods and services procurement policies, HR policies, and capacity improvement for both contracting agency and government employees.

IIGF actively conducts consultation with both Contracting Agencies and Stakeholders for all of its activities. The Contracting Agencies are parties that directly execute the projects guaranteed by IIGF, while Stakeholders are parties that are directly or indirectly affected by the activities of IIGF.

Consultations with Contracting Agencies (CA) throughout 2010 include:

- Coordination of the Waste to Energy Project, Gedebage, Bandung (letter to the Mayor of Bandung No. 115/DIR/07/2010, dated July 21, 2010).
- Facilitating the signing of the MOU between the government of the municipality of Bandar Lampung, the Regional Drinking Water Company (PDAM) of Way Rilau, BPPSPAM with the World Bank and SCE in Singapore.
- Facilitating the composition of the Memorandum of Understanding concerning the planned aid from the World Bank/SCE to the government of the municipality of Bandar Lampung/PDAM Way Rilau (Municipality of Bandar Lampung), in relation to the drinking water supply system project of Way Sekampung.
- Giving input in the composition of the work reference framework for technical assistance from the World Bank/SCE to the Municipal Government/PDAM of Way Rilau, Bandar Lampung.
- Discussing planned aid from the World Bank/SCE to IIGF and the pipeline project with CA Candidates, i.e. PDAM Way Rilau (Municipality of Bandar Lampung) in relation to the drinking water supply system project of Way Sekampung, and the Directorate General of Railways as the CA for the airport train project.

- Pembahasan proyek-proyek Air Minum dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai calon PJPK proyek Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur dan pembina teknis proyek SPAM Way Sekampung, Umbulan, Maros dan Tukad Unda.
- Menjelaskan peran PII kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagai PJPK proyek SPAM Umbulan, dan kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta terkait proyek-proyek KPS infrastruktur, khususnya proyek air minum Jatiluhur.
- Melakukan diskusi intensif atas penyelesaian proyek CJPP (*Central Java Power Plant*) termasuk penerbitan *term sheet* penjaminan, pertemuan tatap muka dengan calon pemodal; pembahasan perjanjian penjaminan, perjanjian regres, dan *fee letters* dengan penasehat hukum PLN.
- Melakukan sosialisasi penjaminan, PKS dan regulasi Perpres 13/2010 ke PJPK bekerja sama dengan Bappenas.

Selain dengan para calon PJPK, PII juga aktif melakukan konsultasi dengan para Pemangku Kepentingan (PK), yaitu sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi intensif dengan BKPM dalam rangka mendorong percepatan eksekusi proyek-proyek *showcase* Pemerintah
- Memfasilitasi para PK (BPPSPAM, Cipta Karya, Balai SDA Sumatera Bagian Selatan, Pemda Kota Bandar Lampung, PPRF Kementerian Keuangan, dan PDAM Way Rilau) dalam membahas dukungan pemerintah untuk proyek SPAM Way Sekampung.
- Membahas bersama BPPSPAM mengenai kondisi hilir sebagai *off-taker* dari proyek KPS SPAM Umbulan.
- Membahas bersama IndII (*Indonesia Infrastructure Initiative*) tentang kajian minimum yang diperlukan agar PII dapat mempercepat proses pemberian penjaminan bagi proyek KPS SPAM Umbulan.
- Membahas proyek-proyek KPS dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, tentang kesiapan proyek SPAM Jatiluhur yang akan menyuplai air ke kawasan DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.
- Memberi masukan kepada *Japan International Cooperation Agency* (JICA) tentang rencana pemberian bantuan teknis kepada Direktorat Jenderal Kereta Api dalam menyusun pra Studi Kelayakan proyek KPS Kereta Api Manggarai - Soekarno-Hatta.
- Melakukan pelatihan bagi para PK dan PJPK perihal proyek-proyek yang potensial untuk menerima penjaminan dari PII, bekerjasama dengan *Singapore Cooperation Enterprise*.

- Discussing drinking water projects with the Directorate General of General Constructions (Cipta Karya) as candidate CA for the drinking water supply system (Sistem Penyediaan Air Minum – SPAM) project of Jatiluhur, and the technical guide for the SPAM project of Way Sekampung, Umbulan, Maros and Tukad Unda.
- Explaining the role of IIGF to the Government of the Province of East Java, as the CA of the Umbulan SPAM project, and to the Government of the Province of the Special Capital Region of Jakarta (DKI) in relation to PPP infrastructure projects, especially the Jatiluhur drinking water project.
- Engaging in intensive discussions concerning the completion of the Central Java power plant project, including the issuance of the guarantee term sheet; face-to-face meeting with future investors; discussion of guarantee agreement and recourse agreement; and fee letters with the PLN legal counsel.
- Familiarizing the guarantee, PPP and the content of Presidential Regulation 13/2010 to PJPK in cooperation with Bappenas.

Apart from future CAs, PPI also actively conducts consultations with stakeholders in the following:

- Intensive coordination with BKPM in order to encourage the speeding up of the execution of the government's showcase projects.
- Facilitating PKs (BPPSPAM, Cipta Karya, SDA Office of South Sumatra, Regional Government of the Municipality of Bandar Lampung, PPRF of the Ministry of Finance, and PDAM of Way Rilau) in discussing governmental support for the SPAM Project of Way Sekampung.
- Discussing with BPPSPAM the downstream condition of the PPP project of SPAM Umbulan as off-taker.
- Discussing with IndII (Indonesia Infrastructure Initiative) the minimum review required so that IIGF can speed up the process of granting the guarantee for the SPAM Umbulan PPP Project.
- Discussing PPP projects with the Regional Planning and Development Agency of the Special Capital Area of Jakarta, concerning the readiness of the SPAM Jatiluhur Project that will supply water to the Special Capital Region of DKI Jakarta, the Municipality of Bekasi, the Regency of Bekasi, and the Regency of Karawang.
- Giving input to the Japan International Cooperation Agency (JICA) concerning the plan to give technical aid to the Directorate General of Railways in creating the Pre-feasibility Studies Report of the Manggarai – Soekarno-Hatta International Airport Train PPP Project.
- Organizing training for PKs and CAs concerning projects with potential to receive guarantees from IIGF, in cooperation with the Singapore Cooperation Enterprise.

- Melakukan diskusi intensif tentang penyelesaian regulasi penjaminan termasuk Peraturan Presiden 78/2010 dan PMK 260/2010.
- Melakukan peninjauan komersial dan kerjasama penjaminan dengan MIGA, Bank Dunia.
- Melakukan diskusi intensif dengan Bank Dunia untuk persiapan proyek dan kapasitas PII.
- Menjajaki rating Perusahaan dengan perusahaan pemeringkat nasional maupun global.
- Menjajaki potensi kerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor seperti Sinosure (China), US Exim Bank dan ECA Canada.
- Melakukan sosialisasi penjaminan, KPS dan regulasi Perpres 13/2010 kepada Asosiasi Konsultan Indonesia (sektor air) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI.
- Berpartisipasi dalam acara forum bisnis Kementerian Pekerjaan Umum RI.

Pada tahun 2010 itu pula PII telah berkomunikasi dengan PJPK untuk pengisian Formulir **Screening** proyek, sebagai berikut:

- Menyampaikan formulir penyiangan proyek (*screening form*) kepada Badan Pengatur Jalan Tol untuk mulai memproses kemungkinan pemberian penjaminan untuk proyek Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi.
- Membahas dengan PDAM Way Rilau dan menyampaikan tanggapan atas formulir penyiangan proyek SPAM Way Sekampung kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Penyelesaian dan penyiapan dokumen juga tidak luput dari perhatian PII sepanjang tahun 2010, antara lain:

- Pihak JICA telah membahas pemberian *Technical Assistance* kepada Direktorat Jenderal Kereta Api untuk proyek Kereta Api Manggarai – Soekarno-Hatta, dan konsultan yang ditugaskan telah mulai menyusun **Terms of Reference** dengan masukan dari PII atas dokumen persyaratan yang diperlukan untuk kemungkinan pemberian penjaminan proyek dari PII.
- Hingga bulan November 2010, dokumen *Feasibility Study* Proyek *Waste to Energy* Gedebage belum diserahkan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai PJPK kepada PII sebagai lampiran formulir penyiangan proyek. Sehubungan dengan hal itu, PII menempatkan proyek tersebut sebagai proyek bukan prioritas.

- Holding intensive discussions concerning the resolution of guarantee regulations, including the Presidential Regulation 78/2010 and PMK.
- Making commercial tryouts and guarantee cooperation with MIGA and the World Bank.
- Holding intensive discussions with the World Bank for the preparation of IIGF projects and capacities.
- Evaluating the Company's rating with both national and global-level companies.
- Exploring the potential of cooperation with Export Funding Institutions, such as Sinosure (China), US Exim Bank, and ECA Canada.
- Familiarizing guarantees, PKS and regulation of the Presidential Regulation 13/2010 to the Indonesian Association of Consultants (the Water Sector), in cooperation with the Indonesian Minister of Public Works.
- Participating in business forums of the Ministry of Public Works of RI.

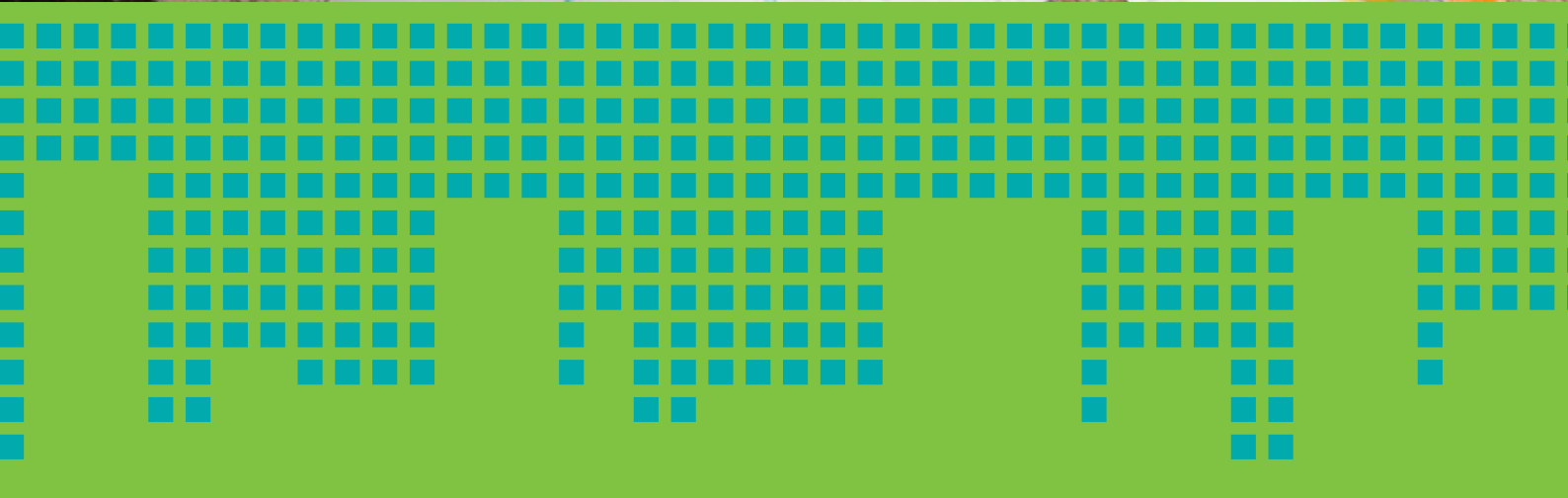
In 2010, IIGF has also communicated with contracting agencies for completion of the Screening Forms for the following projects:

- Submitting the screening form to the Regulatory Board of Toll Roads, for processing possible granting of guarantee for the Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Toll Road Project.
- Discussions with the PDAM of Way Rilau, and submitting response to the screening form for the SPAM of Way Sekampung Project to the Government of the Municipality of Bandar Lampung.

Preparation and completion of necessary documents did not escape IIGF's attention throughout 2010, especially concerning the following:

- JICA has discussed the granting of technical assistance to the Directorate General of Railways for the Manggarai – Soekarno-Hatta International Train Project. The appointed consultant has started to compose the Terms of Reference with input from IIGF concerning the required documents for the possible granting of a project guarantee from IIGF.
- Up to November 2010, feasibility study documents for the Waste to Energy Gedebage Project have not been submitted by the Government of the Municipality of Bandung as the Contracting Agency to IIGF, as an attachment to the screening form of the project. In relation to this issue, IIGF has designated the project a "Non-Priority Project".

- PII membahas bersama BPPSPAM dan IndII perihal kajian yang diperlukan oleh PII untuk melakukan proses penjaminan untuk proyek SPAM Umbulan.
- Melakukan revisi pada website resmi Perusahaan. Format dan konten sudah disusun, perlu tindak lanjut untuk *up-dating*. Beberapa informasi tentang PII sudah disiapkan, khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas penjaminan PII.
- Menyusun materi presentasi PII kepada PJPK, Pemodal, dan Lembaga Pembangunan Multilateral.
- *Capacity building* untuk PK dan PJPK di Singapura.
- Penandatanganan MOU antara Pemkot Bandar Lampung, PDAM Bandar Lampung, BPPSPAM, Bank Dunia dan *Singapore Cooperation Enterprise* di *World Bank Asia Infrastructure Summit* (Singapura).
- Melakukan assesment terhadap bank-bank dan memilih 14 bank mitra, serta melakukan penempatan dana secara optimal.
- Pembuatan manual dan kebijakan, antara lain operating manual, tata kelola perusahaan, matriks risiko, perjanjian konsesi standar, kebijakan penempatan dana di bank, kebijakan SDM dan kebijakan pengadaan.
- IIGF has discussed with BPPSPAM and IndII the reviews required by IIGF to run the guarantee process for the SPAM of Umbulan Project.
- Revising the official website of the Company. The format and content are organized, but follow up is necessary for updating. Some information concerning IIGF has been prepared, especially related to the improvement of the guarantee capacity of IIGF.
- Completing IIGF presentation materials, for presentation to the contracting agencies, investors and multilateral development institutions.
- Capacity building for the government and the contracting agencies in Singapore.
- Signing of an MOU between the Government of the Municipality of Bandar Lampung, PDAM of Bandar Lampung, BPPSPAM, World Bank and the Singapore Cooperation Enterprise at the World Bank Asia Infrastructure Summit (Singapore).
- Conducting assessment of banks, choosing 14 partner banks and allocating funds optimally.





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility*

Sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) menyadari pentingnya peran dunia usaha bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility* - CSR) sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Perseroan No.40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. Sebagai bagian dari program CSR tersebut, PII telah merumuskan kebijakan peranan sosial Perseroan dalam kerangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara.

As a responsible corporate citizen, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund realizes the important role of the business world in the improvement of community welfare, especially in the execution of the Corporate Social Responsibility (CSR) program, detailed in Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies. As part of the CSR program, IIGF has formulated policies pertaining to the social outreach role of the Company in the framework of the Partnership and Environmental Guidance Program of State-owned Enterprises.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Pada tahun 2010, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terfokus pada pelaksanaan Program Kesehatan Masyarakat Terpadu yang memberikan layanan kesehatan cuma-cuma bagi warga di Kecamatan Medan Satria Bekasi, Jawa Barat.

In 2010, CSR activities were focused on the provision of free health services to residents of Medan Satria District, Bekasi, West Java.

Pada tahun 2010, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) melaksanakan kegiatan Program Kesehatan Masyarakat Keliling (Prosmiling) Terpadu bekerja sama dengan Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU. Kegiatan ini berlangsung pada hari Minggu tanggal 27 November 2010 di HW 07 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian PII dalam membantu para mustahik mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Program terdiri dari (i) Penyuluhan Kesehatan, (ii) Pengobatan Umum dan (iii) Layanan Kesehatan Balita

Sesuai dengan sasarannya, Prosmiling berhasil menjangkau warga golongan ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, dan bahkan hampir tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar sekali pun.

Sebanyak 97 warga menerima layanan pengobatan, sementara 42 balita menerima pemeriksaan gizi dan pemberian makanan tambahan, 65 peserta mengikuti penyuluhan kesehatan, dan 37 anak-anak menerima pencerahan mengenai Praktek Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Dari data yang berhasil dihimpun, dalam Prosmiling Terpadu tersebut, kelompok terbesar penerima manfaat pengobatan cuma-cuma adalah kelompok usia dewasa dan manula, yaitu mencakup 43% dari seluruh peserta, sementara berdasarkan gender, 69% dari peserta adalah wanita.

IIGF executed the Integrated Mobile Community Health Program (Prosmiling), in cooperation with the National Humanitarian Institution (PKPU). The event was held on Sunday, November 27, 2010, in a neighborhood of Medan Satria, Bekasi, West Java. This program represents IIGF's concern in assisting the most deserving citizens to obtain adequate, quality health services. The program comprised: (i) Health Guidance, (ii) General Medication and (iii) Infant Health Services.

In successfully achieving its target, Prosmiling reached citizens from the middle to lower economic brackets, mostly with limited educational backgrounds and who lacked access to basic health services.

A total of 97 residents received medical services, 42 toddlers underwent nutrition checks and were given food supplements, 65 people participated in the health guidance session and 37 children learned about hygienic living practices.

Data collected from Prosmiling shows that the biggest beneficiaries of the free medication were adults and the elderly, i.e. 43% of all participants. Gender-wise, 69% of the participants were female.

PROGRAM KESEHATAN

Sebagai kegiatan tanggung jawab sosial yang baru pertama kalinya dilakukan oleh PII, dapat disimpulkan bahwa dari animo masyarakat yang begitu besar (97 pasien terlayani dari pukul 8.00 sampai dengan 10.30 pagi), selain feedback yang disampaikan para peserta program, program layanan kesehatan masyarakat secara cuma-cuma ini cukup dinilai bermanfaat, dan kiranya dapat dikembangkan secara lebih berkesinambungan di masa mendatang.

Young Leaders for Indonesia 2010 Program

Selain melaksanakan Program Kesehatan Masyarakat Terpadu bersama dengan PKPU, PII juga berpartisipasi dalam program *Young Leaders for Indonesia* (YLI) 2010. Program ini merupakan program intensif untuk pengembangan kepemimpinan bagi para mahasiswa unggulan di Indonesia yang digagas oleh McKinsey sejak tahun 2007. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan calon-calon pemimpin masa depan Indonesia.

Dalam YLI 2010, PII menominasikan 4 orang mahasiswa unggulan dan memberikan coaching dan pelatihan secara intensif kepada mereka tentang berbagai hal yang terkait dengan pembangunan Infrastruktur dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Selain itu mereka juga terlibat dalam melaksanakan Proyek *Stakeholders Management Plan*, yaitu sebuah proyek yang didisain untuk membantu PII dalam meningkatkan pemahaman dan keyakinan dari *stakeholders* terhadap proses penjaminan yang diberikan oleh PII untuk mempercepat pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Para mahasiswa unggulan yang dibina oleh PII dalam Program YLI 2010 adalah:

- Muchdlir Zauhariy, Universitas Indonesia (UI), Program Studi Akuntansi Tahun ke-4
- Natalia Rialucky Tampubolon, Universitas Indonesia (UI), Program Studi Hubungan Internasional Tahun ke-2
- Steffi Stephannie, Universitas Gadjah Mada (UGM), Program Studi Akuntansi Tahun ke-3
- Bintang Cesario, Prasetya Mulya Business School, Program Studi Manajemen Tahun ke-3

HEALTH PROGRAM

As the first Corporate Social Responsibility activity of IIGF, it can be concluded from the huge enthusiasm of the community (97 patients were served from 8 a.m. to 10:30 a.m.), as well as the feedback given by the participants, that the free health service program was considered beneficial. The residents hoped that it could be developed in a more continuous manner in the future.

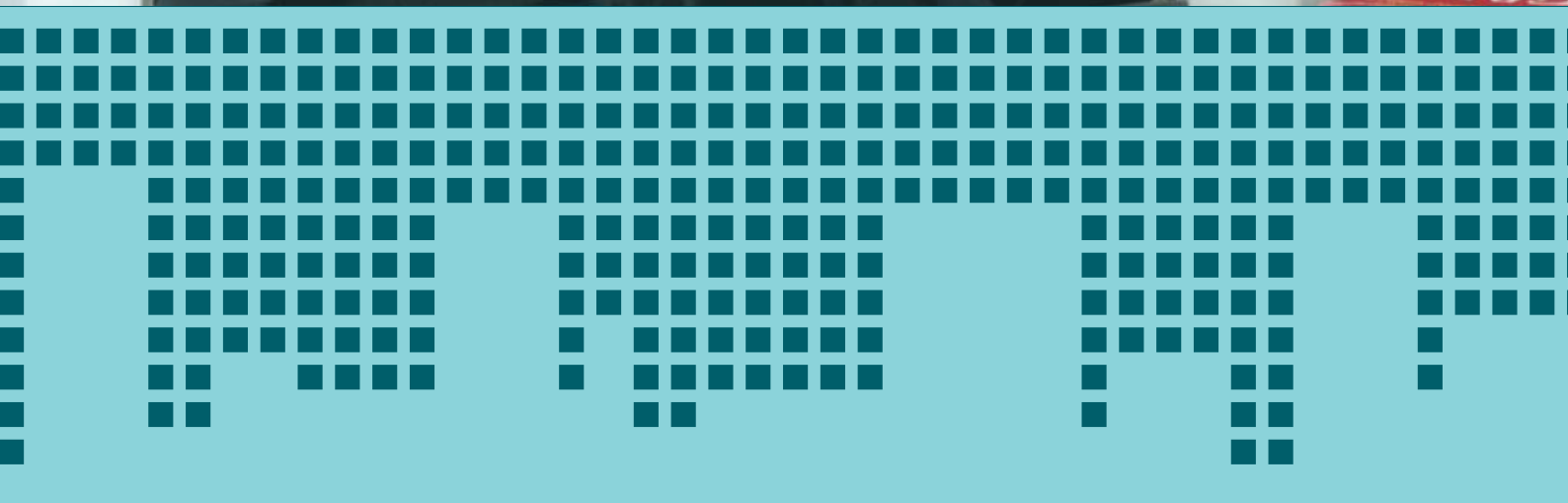
Young Leaders for Indonesia 2010 Program

Apart from executing the Integrated Community Health Program conducted in conjunction with PKPU, IIGF also participated in the Young Leaders for Indonesia (YLI) 2010 program. This is an intensive program for developing leadership among the best college students in Indonesia. The idea first came from McKinsey in 2007. The purpose of this program is to develop future leaders of Indonesia.

In YLI 2010, IIGF nominated four outstanding college students, and gave them intensive coaching and training in various issues related to Infrastructure Development in the Public-Private Partnership (PPP) scheme. They were also involved in the execution of the Stakeholders' Management Plan Project, a project designed to help IIGF in improving the understanding and faith of the stakeholders to the guarantee process given by IIGF to speed up the economic growth of Indonesia.

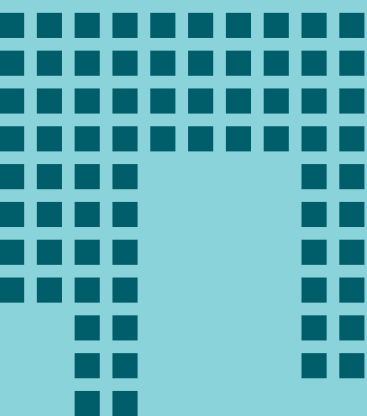
The high-achieving college students groomed by IIGF in the YLI 2010 Program are:

- Muchdlir Zauhariy, University of Indonesia (UI), 4th-year Accounting Study Program;
- Natalia Rialucky Tampubolon, University of Indonesia (UI), 2nd-year International Relations Study Program;
- Steffi Stephanie, Gadjah Mada University (UGM), 3rd-year Accounting Study Program;
- Bintang Cesario, Prasetya Mulya Business School, 3rd-year Management Study Program.



Analisa dan Pembahasan Manajemen

*Management Discussion
and Analysis*



Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Latar Belakang

Pemerintah menetapkan bahwa infrastruktur menjadi prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memerlukan partisipasi swasta untuk mengisi gap pendanaan yang tidak bisa dipenuhi melalui APBN / PHLN. Salah satu bentuk partisipasi swasta adalah melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Untuk itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 67/2005 tentang KPS dalam Penyediaan Infrastruktur, yang diubah dengan Perpres 13/2010, sebagai dasar pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Swasta / KPS (*Public Private Partnership*, PPP). Dalam kerangka KPS tersebut investor memerlukan penjaminan atas *political risk* untuk proyek infrastruktur. Untuk itu dibentuklah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) pada tanggal 30 Desember 2009 dengan tujuan untuk:

- Menyediakan penjaminan pada proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta (KPS) di bidang Infrastruktur.
- Meningkatkan *creditworthiness* atas proyek-proyek KPS Infrastruktur melalui pemberian Penjaminan atas risiko politik.
- Meningkatkan *governance* dan proses yang transparan dalam pemberian Penjaminan atas risiko proyek infrastruktur yang terkait dengan Pemerintah.
- *Ring-fencing* eksposur kewajiban kontinjensi Pemerintah.

Dengan berdirinya PII maka hal ini akan memutus interaksi langsung pihak swasta dengan Kementerian Keuangan,

- Penanganan transaksi dilakukan oleh PII.
- Pemerintah lebih berperan sebagai Regulator dan Pembuat Kebijakan.

Selain itu juga meningkatkan *bankability* proyek-proyek KPS kepada *audience* yang lebih luas dengan adanya produk penjaminan yang lebih diterima pasar, juga mendorong market discipline atas proses penjaminan melalui kebijakan *Single Window*

- Proses yang jelas, konsisten dan terstandarisasi.
- Transparan.
- Kejelasan waktu dan lebih responsif.
- Struktur penjaminan yang lebih jelas.

Background

The government has determined that infrastructure must receive top priority to support economic growth and that its development requires private participation to bridge the funding gap that cannot be met through the State Budget or foreign loans and grants. One form of such private participation is the Public-Private Partnership (PPP).

Hence the government issued Presidential Regulation No. 67/2005 regarding PPP in Infrastructure Provision, which was amended by Presidential Regulation 13/2010, as the basis for the implementation of PPP. Within the framework of the PPP, investors require a guarantee against political risks for infrastructure projects. The Indonesia Infrastructure Guarantee Fund was therefore established on December 30, 2009, with the intention of:

- Providing guarantees for Public-Private Partnership (PPP) Infrastructure projects.
- Improving creditworthiness of PPP Infrastructure projects thorough the provision of guarantees against political risks.
- Improving governance and transparency in the process of providing guarantee against government-related infrastructure project risk.
- Ring-fencing the government exposure to contingent liabilities.

The establishment of IIGF will limit direct interaction between the private sector and Ministry of Finance, due to the following:

- Transactions are handled by IIGF.
- The role of the government is more as Regulator and Policy-Maker.

Moreover, it also increases the bankability of PPP projects to an even wider audience by creating guarantee products that are more acceptable to the market, as well as encouraging market discipline on the guarantee process through its "Single Window" policy.

- Clear, consistent and standardized process.
- Transparent.
- Clear time-frame and more responsive.
- Clearer guarantee structure.

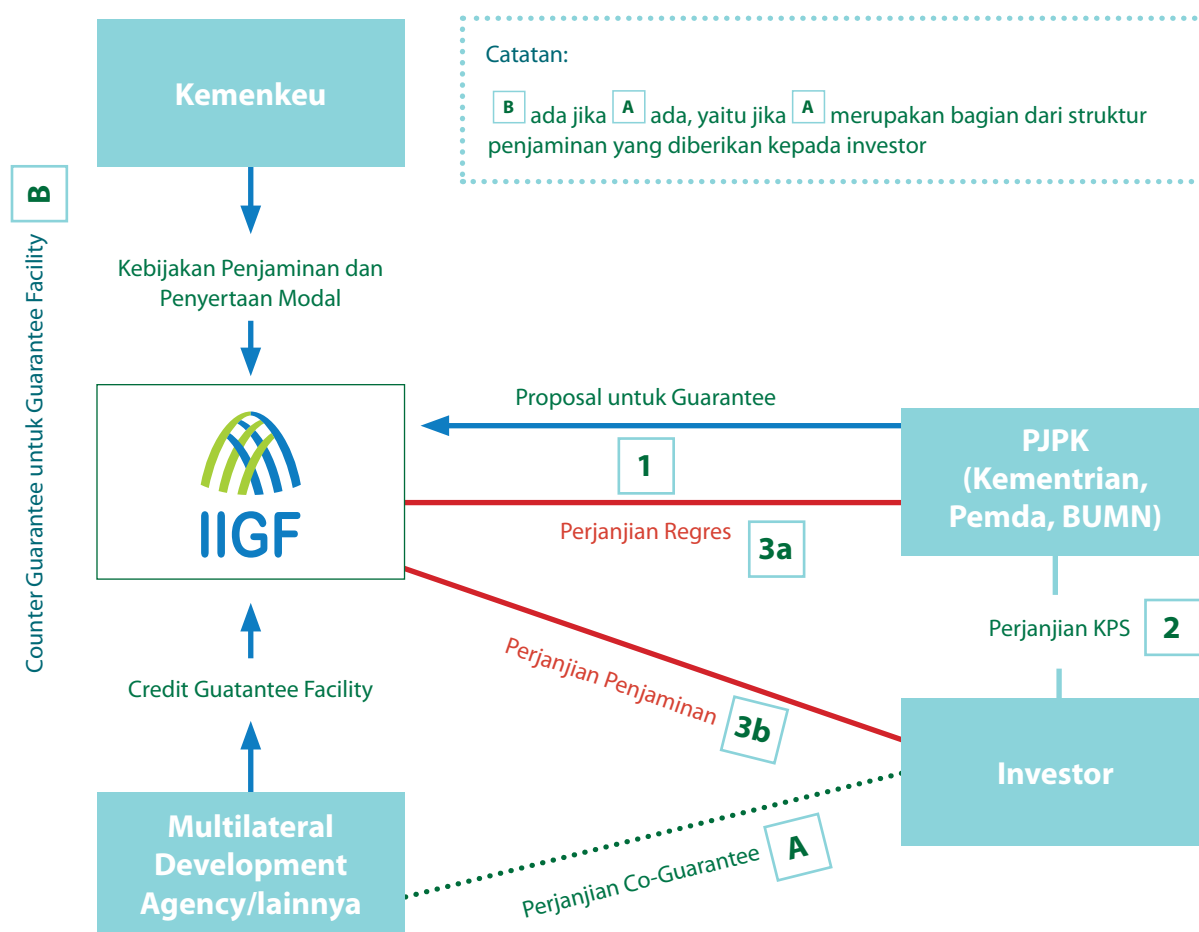
PII menyediakan jaminan hanya untuk risiko yang menjadi tanggung jawab Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), sebagaimana terdapat dalam Perjanjian KPS dan didukung oleh komitmen PJPK dalam Perjanjian Regres. Dengan model bisnis tersebut maka akan didapat manfaat bagi:

- Sektor swasta
 - Mitigasi risiko bagi sektor swasta yang tidak dapat di-cover dari pasar
 - Peningkatan transparansi, kejelasan dan kepastian akan proses evaluasi dan pemberian penjaminan bagi proyek
 - Peningkatan *bankability* dari proyek
 - Memperpanjang jangka waktu pinjaman, yang berdampak pada harga penawaran (*bid*) yang lebih kompetitif.
 - Memberikan insentif bagi PJPK untuk membuat kontrak yang memenuhi standar internasional/ yang berlaku umum dipasar dan untuk memenuhi kewajibannya berdasar perjanjian kerjasama.

IIGF provides guarantees only for risks that fall under the responsibility of the Person In Charge of the Partnership Project, as stipulated in the PPP Agreement and is supported by the PIC's commitment in a Recourse Agreement.

Following the business model will result in benefits as follows:

- For the private sector
 - Mitigates private sector risks that cannot be covered by the market.
 - Improves the transparency, clarity and certainty of the evaluation process and guarantee provision for projects.
 - Improving the bankability of projects.
 - Extends the loan term, so that equity return is more attractive.
 - Providing incentives for Partnership Project PICs to draw up contracts that meet general/international standards.



- Pemerintah
 - Menarik pihak investor swasta dan lembaga keuangan dalam berpartisipasi di proyek KPS, sehingga tingkat keberhasilan eksekusi proyek sesuai rencana dan jadwal menjadi lebih tinggi.
 - Meningkatkan kompetisi dalam proses tender sehingga diharapkan menghasilkan peningkatan kualitas proposal tender untuk mendapatkan harga yang kompetitif

Kapasitas Penjaminan

Dalam bisnis penjaminan ini besarnya kapasitas penjaminan merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan banyaknya proyek yang akan dijamin dan kredibilitas perusahaan dalam menjamin suatu proyek. Kapasitas penjaminan perusahaan tersebut dilakukan melalui modal yang disetorkan oleh Negara (Penyertaan Modal Negara/PMN). Sampai dengan 31 Desember 2010 perusahaan telah menerima PMN sebesar Rp2 triliun, masing-masing sebesar Rp1 triliun di akhir tahun 2009 dan di akhir tahun 2010.

Selain Penyertaan Modal Negara, untuk meningkatkan kapasitas penjaminan, PII bersama dengan Bank Dunia sedang menyusun suatu fasilitas penjaminan dengan peringkat AAA sebesar US\$ 480 juta. Penjajakan juga dilakukan dengan badan MDA (*Multilateral Development Agency*) seperti MIGA dan ADB.

Pengelolaan Dana

PMN yang telah diterima perusahaan tersebut dikelola perusahaan dengan menempatkannya pada instrumen investasi yang ada di pasar keuangan. Jumlah dana yang dikelola per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.031,9 milyar. Jumlah dana tersebut berasal dari modal perusahaan dan Laba Bersih perusahaan. Portofolio pengelolaan dana perusahaan sebagian besar ditempatkan pada instrumen pasar uang dan sisanya pada obligasi perusahaan.

Dalam pengelolaan dana ini perusahaan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Untuk itu strategi pengelolaan dana adalah dengan membagi alokasi asset (dana) ke dalam *core instrument* dan *satellite instrument*. *Core instrument* terdiri dari Deposito dengan rating AAA, AA dan minimal A. Sedangkan *satellite instrument* terdiri dari instrumen obligasi *corporate* dan reksadana. *Satellite instrument* ini ditujukan untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian. Mengingat tujuan pembentukan perusahaan adalah bisnis penjaminan.

- Government
 - Attracting the participation of private investors in projects as the risk of non-performance by the government can be reduced.
 - Improving the certainty of achieving project completion schedules.
 - Increasing competition in the tender process in order to improve the quality of the tender proposals and acquire competitive prices.

Guarantee Capacity

In the guarantee provision business, the size of financial capacity is a very important factor in determining the number of projects that will be guaranteed and the credibility of the Company in guaranteeing a project. The financial capacity of the Company may be strengthened through a capital injection by the State (State Capital Investment). As of December 31, 2010, the Company has received State Capital Investment totaling Rp2 trillion, consisting of Rp1 trillion received at the end of 2009 and another Rp1 trillion at the end of 2010.

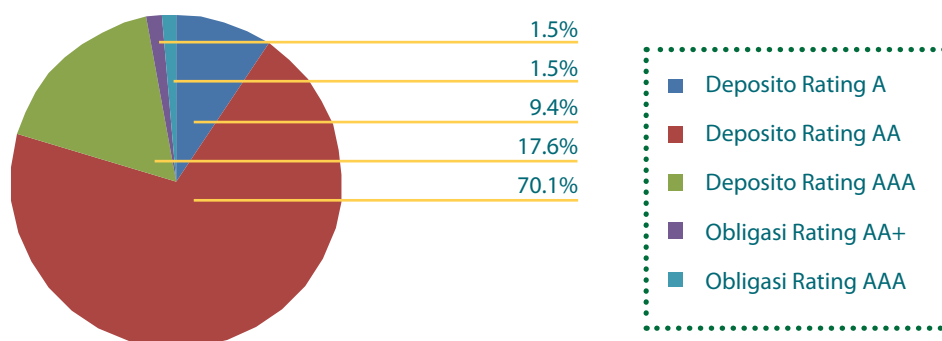
Besides State Capital injection, the Company also receives assistance from the World Bank in the form of a backstop facility to increase its financial capacity, in the amount of US\$478 million. Approaches to other Multilateral Development Agencies (MDAs), including MIGA and ADB, have also been made.

Fund Management

The State Capital injection is managed by the Company through the placement in financial instruments available in the financial market. The total funds managed by the Company as of December 31, 2010, amounted to Rp1,031.9 billion. The funds were attributed to the Company's capital and net income. A major portion of the Company's fund management portfolio is placed in financial market instruments and the rest in corporate bonds.

In managing this fund the company adheres to the principle of prudence. Hence the fund management strategy is to divide the asset (fund) allocation into the core instruments and satellite instruments. Core instruments consist of deposits with a rating of AAA, AAA and at least A. Satellite instruments consist of corporate bonds and mutual funds. Satellite instruments are intended to accrue a higher rate of return, without abandoning the principle of prudence. Realizing the fact that the Company's main business is to provide guarantees.

Portofolio Pengelolaan Dana



Kinerja Perusahaan

Performansi perusahaan di tahun 2010 masih mencerminkan kegiatan pra-operasi. Pendapatan perusahaan hanya berasal dari Pendapatan Pengelolaan Dana. Belum ada proyek yang siap dijamin. Kegiatan penjaminan lebih banyak dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas, komunikasi dan konsultasi dengan *contracting agency* dan *stakeholder* lainnya.

Sampai dengan akhir tahun 2010, Laba Bersih Perusahaan mencapai Rp45,9 milyar. Laba Bersih tersebut berasal dari:

- Pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp61,7 milyar, yang berasal dari penempatan dana yang ada di Bank dan Obligasi. Tingkat pengembalian dari penempatan dana ini berkisar antara 7%-10% p.a.
- Beban Operasi sebesar Rp16,8 milyar. Beban operasi ini sebagian besar digunakan untuk Beban Karyawan, Beban Umum dan Administrasi dan Beban Komunikasi. Sebagian besar Beban Umum dan Administrasi digunakan untuk Beban Jasa Profesional, Beban Sewa dan Beban Perjalanan Dinas.
- Pendapatan Lain-lain -Net sebesar Rp1 milyar, terutama berasal dari pendapatan bunga pada giro bank.
- Perusahaan mencatatkan Manfaat Pajak Tangguhan sebesar Rp86,2 juta. Perusahaan belum membayar pajak badan sehubungan perusahaan telah membayar pajak final atas Pendapatan Pengelolaan Dana.

Company Performance

The Company's performance in 2010 still reflects pre-operating activities. Company revenues were attributed only to Fund Management Revenue. There were no projects requiring guarantees yet. Guaranteeing activities were mostly carried out in the form of capacity building, communication and consultation with the contracting agency and other stakeholders.

As of the end of 2010, the Company's Net Income reached Rp45.9 billion

- Revenue from guarantees totaling Rp61.7 billion was attributed to fund placements in banks and bonds. The rate of return from the fund placement ranged between 7% and 10% p.a.
- Operating expenses amounted to Rp16.8 billion. Operating expenses were largely attributed to Personnel Expenses, General and Administrative Expenses and Communication Expenses. General and Administrative Expenses were largely attributed to Professional Services Fee, Rental and Travel Expenses.
- Other net income, amounting to Rp1 billion, was primarily attributed to interest from current accounts.
- The Company recorded a deferred tax asset amounting to Rp86.2 million. The Company has not paid its corporate income tax as it had paid a final tax on its Revenue from Guarantee.

Sebagian besar Aset Perusahaan berupa Investasi Pengelolaan Dana dalam deposito dan obligasi perusahaan. Investasi Pengelolaan Dana tersebut berasal dari setoran Modal Negara dan hasil dari Laba Bersih operasi. Kewajiban perusahaan sebagian besar merupakan Hutang Usaha, terutama terkait dengan Jasa Profesional. Pendapatan dari penjaminan terdiri dari pendapatan premi, dan pendapatan provisi dan komisi. Pendapatan premi terdiri dari *guarantee fee* dan *processing fee*. Pendapatan dari *guarantee fee* diakui berdasarkan jangka waktu dari periode penjaminan tergantung dari pengaturan dalam kontrak. Pendapatan dari *processing fee* diakui pada saat pendapatan diperoleh.

i) *Guarantee fee* dibebankan karena jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan jaminan exposure oleh perusahaan.

ii) *Processing fee* dibebankan karena adanya aktivitas pemrosesan yang dilakukan jika klaim disampaikan kepada pihak penjamin

Pendapatan provisi dan komisi terdiri dari *arranging fee*, *ceded commission*, dan pendapatan provisi atau komisi lainnya. *Arranging fee* terdiri dari bagian yang dapat dikembalikan dan bagian yang tidak dapat dikembalikan. *Ceded commission* adalah pendapatan dari peningkatan struktur penjaminan yang dilakukan dengan pihak penjamin lain. Pendapatan dari bagian yang tidak dapat dikembalikan dari *arranging fee* diakui pada saat kontrak penjaminan ditandatangani; sementara pendapatan dari bagian yang dapat dikembalikan dari *arranging fee* diakui pada saat proyek dimulai (*Financial Close*); terlepas dari kelangsungan penjaminan proyek itu sendiri di masa yang akan datang. Pendapatan dari *ceded commission* dan *fees* dan pendapatan komisi lainnya diakui pada saat diperoleh.

Pendapatan dari pendapatan bunga dan investasi pendapatan tetap diakui pada saat diperoleh.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi terutama berasal dari Laba Bersih perusahaan, yaitu yang berasal dari Pendapatan Pengelolaan Dana setelah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan.

Most of the Company's assets are Fund Management Investments in the form of term deposits and corporate bonds. The Fund Management Investments are attributed to capital injection by the State and Net Income from operations. The Company's liabilities are largely in the form of Accounts Payable, particularly related to Professional Services. Revenue from guarantee consists of premium income; and fees and commissions. Premium income consists of guarantee fee and processing fee. Revenue from guarantee fee is recognized based on the duration of guarantee period, depending on the arrangement in the contract. Revenue from processing fee is recognized when earned.

i) Guarantee fee is charged due to the guarantee provided to the beneficiaries on the basis of guarantee exposure of the Company.

ii) Processing fee is charged due to process activity if the claim is delivered to the guarantor.

Fees and commissions consist of arranging fee, ceded commission, and other fees or commissions. Arranging fee consists of a refundable and nonrefundable fee portion. Ceded commission is revenue from the enhancement of guarantee structure with other guarantee/insurance parties. Revenue from a nonrefundable portion of the arranging fee is recognized upon signing of the guarantee contracts; while revenue from a refundable portion of the arranging fee is recognized upon the commencement of the project (*Financial Close*); regardless the continuance of the guarantee project itself in the future. Revenue from ceded commission and other fees and commissions is recognized when earned.

Revenue from interest income of time deposits and investment in fixed income is recognized when earned.

Cash flows from Operating Activities were mainly attributed to the Company's Net Income, which was derived from its income from investment after deducting the company's operational expenses.

Laba Rugi			Rp000
No	Laporan Laba Rugi	Statement of Income Balance Sheet	2010
1	Pendapatan	Operating Revenue	61,685,663
2	Beban	Expenses	16,220,265
3	Laba Usaha	Operating Income	45,465,399
4	Laba Bersih	Net Income	46,597,011

Neraca 2010			Rp000
No	Neraca	Balance Sheet	2010
1	Aset	Assets	2,052,921,455
2	Kewajiban	Liabilities	6,324,444
3	Ekuitas	Equity	2,046,597,011

Arus Kas dari Aktivitas Investasi terutama digunakan untuk Investasi Pengelolaan Dana pada instrumen Deposito dan Obligasi Perusahaan dan sebagian untuk renovasi kantor.

Cash flows from Investing Activities were mainly used for Fund Management Investment in Term Deposit and Bond instruments, and partly to renovate the office.

Arus Kas 2010			Rp000
No	Laporan Arus Kas	Cash Flow Statement	2010
1	Arus Kas Operasi	Cash Flow from Operation	38,707,348
2	Arus Kas Investasi	Cash Flow from Investment	1,034,564,063
3	Arus Kas Pembiayaan	Cash Flow from Financing	2,000,000,000

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan berasal dari Penyertaan Modal Negara sebanyak Rp2 triliun.

Cash flows from Financing Activities were attributed to the State Capital amounting to Rp2 trillion.

Rasio Keuangan			Rp000
No	Ratio	Ratio	2010
1	Margin Laba Usaha	Operating Profit Margin	73.7%
2	Margin Laba Bersih	Net Profit Margin	75.5%
3	ROE	ROE	4.2%

Perusahaan mencatat Margin Laba Usaha dan Margin Laba Bersih masing-masing sebesar 73,7% dan 75,5%. Tingginya margin tersebut disebabkan oleh aktivitas operasional perusahaan mulai banyak dilakukan di semester II tahun 2010

The Company recorded Operating Profit Margin and Net Profit Margin amounting to 73.7% and 75.5%, respectively. The high margins were due to the fact that most of the Company's operational activities occurred in the second half of 2010

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi *BOC and BOD Letter of Statement*

Laporan tahunan berikut laporan keuangan dan informasi lain yang terkait merupakan tanggung jawab manajemen PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan dijamin kebenarannya oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan membubuhkan tandatangannya masing-masing dibawah ini.

Annual report and the accompanying financial statements and related financial information, are the responsibility of the management of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund and have been approved by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners whose signatures appear bellow.

Dewan Komisaris Board of Commissioners



Freddy Rikson Saragih

President Commissioner | Komisaris Utama



Ayu Sukorini

Commissioner | Komisaris

Direksi Board of Directors



Sinthya Roesly

President Director | Direktur Utama



Yadi J. Ruchandi

Director of Operations | Direktur Operasi

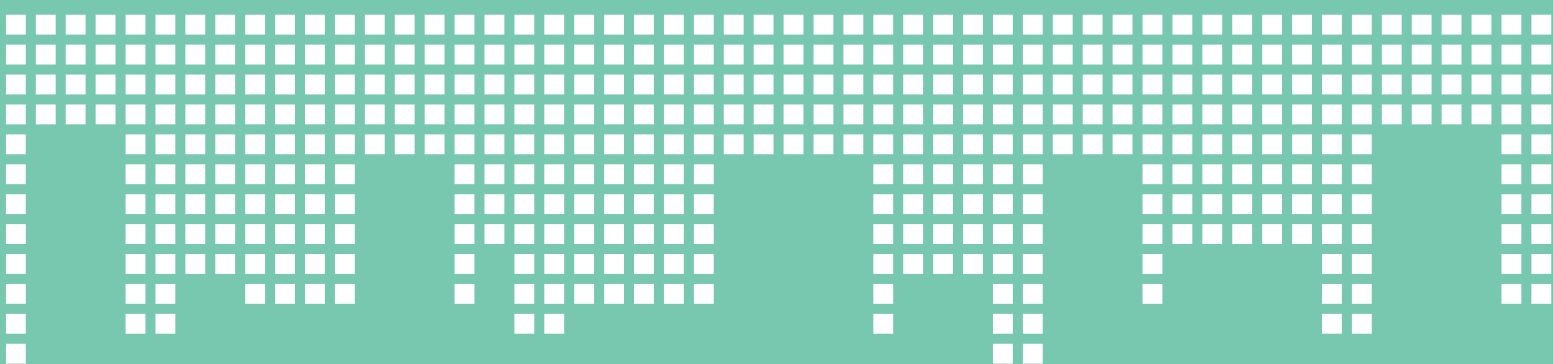


Armand Hermawan

Director of Finance | Direktur Keuangan

Laporan Keuangan

Financial Report



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

**LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DESEMBER 2010/
31 DECEMBER 2010**



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Kami telah mengaudit neraca PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") tanggal 31 Desember 2010, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti bukti yang mendukung jumlah jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2010, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

We have audited the accompanying balance sheet of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") as of 31 December 2010, and the related statement of income, change in equity and cash flow for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) as of 31 December 2010, and the results of its operation, and its cash flow for the year then ended, in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia.

JAKARTA
14 Maret / March 2011

Drs. Haryanto Saharj, CPA

Surat Izin Praktek Akuntan Publik/Licence of Public Accountant No. 98.1.02

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations, and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilised in Indonesia to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying financial statements and the auditor's report thereon are not intended for those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards, and their application in practice.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan

Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (Persero)
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010**

PERNYATAAN DIREKSI

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (Persero)
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010**

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT

Sesuai dengan keputusan rapat Dewan Direksi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan"), dengan ini kami menyatakan bahwa:

In accordance with a resolution of the Board of Directors of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company"), in the opinion of the Directors:

- a) Laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) menyajikan secara wajar posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2010, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; dan
- b) Laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- a) *the financial statements of the Company are drawn up so as to present fairly the financial position of the Company as 31 December 2010, and the operating results, and cash flows of the Company for the year then ended; and*
- b) *the financial statements referred to above have been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia.*

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/ *For and on behalf of the Board of Directors,*



Sinthya Roesly
Presiden Direktur/ *President Director*



Armand Hermawan
Direktur/ *Director*

JAKARTA
14 Maret/March 2011

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 1 Schedule

NERACA

31 DESEMBER 2010

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

BALANCE SHEET

AS AT 31 DECEMBER 2010

(Expressed in thousand Rupiah)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 2010</u>	
ASET			ASSETS
Kas dan setara kas	2c,3	1,004,143,285	Cash and cash equivalents
Investasi	2d,4	1,031,853,846	Investments
Piutang		8,373,260	Receivables
Biaya dibayar di muka dan uang muka		735,656	Prepaid expenses and advances
Aset tetap	2e,5	2,026,592	Fixed assets
Beban tangguhan	6	5,403,819	Deferred expenses
Aset pajak tangguhan	2f,8c	86,194	Deferred tax asset
Uang Jaminan		<u>298,803</u>	Refundable deposits
JUMLAH ASET		<u>2,052,921,455</u>	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN			LIABILITIES
Hutang usaha	7	1,448,044	Account payables
Hutang pajak	2f,8a	76,006	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar dan hutang lain-lain	9	4,573,354	Accrued expenses and other payables
Kewajiban imbalan pasca kerja	2g,10	<u>227,040</u>	Employee benefit obligation
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>6,324,444</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham – Modal dasar 4.000.000 lembar. ditempatkan dan disetor penuh 2.000.000 lembar. dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (jumlah penuh) per saham	11	2,000,000,000	Share capital – authorised 4,000,000 shares, issued and fully paid 2,000,000 shares, with par value of Rp 1,000,000 (full amount) per share
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya		<u>46,597,011</u>	Unappropriated retained earnings
JUMLAH EKUITAS		<u>2,046,597,011</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>2,052,921,455</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 2 Schedule

LAPORAN LABA RUGI
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

STATEMENT OF INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010
(Expressed in thousand Rupiah)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 2010</u>	
Pendapatan	2h		Revenue
Pendapatan penjaminan			<i>Revenue from guarantee</i>
- Pendapatan premi			- <i>Premium income</i>
- Pendapatan provisi dan komisi		-	- <i>Fees and commission</i>
		-	
Pendapatan pengelolaan dana	12	61,685,663	<i>Income from investment</i>
		61,685,663	
Beban usaha			Operating expenses
Beban umum dan administrasi	13	(16,220,264)	<i>General and administrative expense</i>
		(16,220,264)	
Laba usaha		45,465,399	Operating income
Penghasilan/(beban) lain-lain –bersih			Other incomes/ (expenses) -net
Pendapatan bunga		1,059,366	<i>Interest income</i>
Laba selisih kurs	2b	82	<i>Gain on foreign exchange</i>
Beban lain-lain		(14,030)	<i>Miscellaneous expense</i>
		1,045,418	
Laba sebelum pajak penghasilan		46,510,817	Profit before income tax
Manfaat pajak tangguhan	8b	86,194	Income tax benefit
Laba bersih		46,597,011	Net income

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 3 Schedule

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
 (Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010
 (Expressed in thousand Rupiah)

	Catatan Notes	Modal saham/ Share capital	Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah/ Total	
			Ditentukan penggunanya/ Appropriated	Belum Ditentukan penggunanya/ Unappropriated		
Saldo per						Balance at
1 Januari 2010		-	-	-	-	1 January 2010
Modal saham	11	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000	Share Capital
Laba bersih tahun berjalan		-	-	46,597,011	46,597,011	Net income for the year
Saldo per						Balance at
31 Desember 2010		<u>2,000,000,000</u>	<u>-</u>	<u>46,597,011</u>	<u>2,046,597,011</u>	31 December 2010

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

**STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010**

(Expressed in thousand Rupiah)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 2010</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Laba sebelum pajak penghasilan		46,510,817	Profit before income tax
Ditambah/(dikurangi) unsur yang tidak mempengaruhi arus kas:			Add items not affecting cash flows:
- Beban penyusutan		384,822	- Depreciation
- Beban penyisihan imbalan pasca kerja		227,040	- Provision for employee benefits
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja		47,122,679	Operating cash flows before changes in working capital
Perubahan modal kerja:			Changes in working capital:
- Piutang		(8,373,260)	- Other receivables
- Biaya dibayar di muka - dan uang muka		(735,656)	- Prepaid expenses and advances
- Beban tangguhan		(5,403,819)	- Deferred expenses
- Hutang usaha		1,448,044	- Account payables
- Hutang pajak		76,006	Taxes payable
- Biaya masih harus dibayar dan hutang lain-lain		4,573,354	- Accrued expenses and other payables
		(8,415,331)	
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		38,707,348	Net cash flows provided from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembayaran penempatan investasi		(1,031,853,846)	Cash paid for investment
Pembelian aset tetap		(2,411,414)	Acquisition of fixed assets
Penempatan uang muka yang dapat dikembalikan		(298,803)	Refundable deposit
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(1,034,564,063)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan modal saham		2,000,000,000	Share capital received
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		2,000,000,000	Net cash flows used in financing activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas		1,004,143,285	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun			Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	3	1,004,143,285	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010**

(Expressed in thousand Rupiah)

1. UMUM

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No 29 tanggal 30 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-04444.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak dalam hal memberikan penjaminan pada proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta ("KPS") di bidang infrastruktur.

Perusahaan beroperasi sebagai suatu "single window" sebagai Badan Usaha Penjamin Infrastruktur (BUPI) dalam melakukan proses, penilaian (appraisal) dan penyusunan struktur (structuring) untuk semua penjaminan yang diberikan pemerintah pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Perusahaan dapat menerapkan berbagai jenis dan struktur penjaminan – yang disokong (backstop) oleh, bila diperlukan, neraca Perusahaan, neraca lembaga penjaminan multilateral, neraca Pemerintah RI, atau kombinasinya – untuk mewujudkan fleksibilitas operasional yang lebih baik dalam penyediaan penjaminan infrastruktur.

Tujuan utama dari Perusahaan adalah untuk:

- a) Sebagai katalisator investasi non-publik dalam bidang infrastruktur di Indonesia dengan memitigasi risiko besar dalam PPPs yang terstruktur dengan baik, terkait atas kepentingan investor;
- b) Meningkatkan kualitas dari PPPs dengan menyediakan sebuah kerangka penilaian yang jelas untuk penjaminan; dan
- c) Melindungi Kewajiban kontijensi Pemerintah Republik Indonesia melalui penjaminan.

1. GENERAL

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed of Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 dated 30 December 2009. The articles of association were approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in his decree No.AHU-04444.AH.01.01. Tahun 2010, dated 27 January 2010.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the Company is engaged to provide the guarantees for the Public Private Partnership (PPP) projects in infrastructure sector.

The Company operates as a "single window" for the processing, appraisal and structuring of all guarantees provided to infrastructure projects proposed by government's Contracting Agencies (CA). The Company employs various types and structures of guarantees – back-stopped, as necessary, by the Company balance sheet, the GOI balance sheet, the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD/World Bank) Guarantee and Credit Facilities, or a combination thereof – for greater operational flexibility in providing guarantees for infrastructure projects.

The primary objective of the Company is to:

- a) Help catalyze private investments in infrastructure in Indonesia by mitigating critical risks in well-structured PPPs constraining investors' interest;*
- b) Improve the quality of PPPs by establishing a clear appraisal framework for guarantees; and*
- c) Ring-fence GOI liability vis-à-vis guarantees*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010**

(Expressed in thousand Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Indonesia, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 2010.

Pada 31 Desember 2010, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

The Company domiciled in Indonesia, located at Sampoerna Strategic Square, North Tower, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta. The Company started its commercial operations in 2010.

As at 31 December 2010, the members of the Company's Commissioner and Board of Directors were as follows:

2010

Komisaris Utama	:	Freddy Rikson Saragih	:	<i>President Commissioner</i>
Komisaris	:	Ayu Sukorini	:	<i>Commissioner</i>
Direktur Utama	:	Sinthya Roesly	:	<i>President Director</i>
Direktur	:	Armand Hermawan Yadi Jaya Ruchandi	:	<i>Directors</i>

Pada 31 Desember 2010, Perusahaan memiliki 12 karyawan tetap dan 1 pegawai yang ditempatkan dari Kementerian Keuangan.

As at 31 December 2010, the Company had 12 permanent employees and 1 secondment from Ministry of Finance.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Perusahaan disusun oleh Direksi dan diselesaikan pada tanggal 14 Maret 2011.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas untuk operasional, investasi dan pendanaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

These financial statements of Company were prepared by the Directors and completed on 14 March 2011.

Presented below are the summary of significant accounting policies adopted in preparing the financial statements, which are in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared on the basis of historical costs. The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statements of cash flows.

The statement of cash flows is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/3 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010

(Expressed in thousand Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)

Penyusunan dari laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Meskipun estimasi ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen terhadap peristiwa dan aktivitas yang sedang terjadi, hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Angka angka dalam laporan keuangan ini dinyatakan dalam ribuan rupiah ("Rp") kecuali dinyatakan lain.

Standar akuntansi baru

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Ketentuan-ketentuan pada Standar tersebut diterapkan secara prospektif dan tidak memiliki dampak material pada laporan keuangan. Secara umum, dampak yang terjadi terutama pada persyaratan untuk mengungkapkan sifat dan tingkat risiko yang dapat mempengaruhi Perusahaan dan kebijakan manajemen risiko terkait (lihat Catatan 16).

b. Penjabaran transaksi dalam valuta asing

Mata uang fungsional yang digunakan oleh Perusahaan adalah Rupiah Indonesia dan pembukuan perusahaan disiapkan dalam mata uang Rupiah Indonesia.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)

The preparation of financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Although these estimates are based on management's best knowledge of current event and activities, actual results could differ from those estimates.

Figures in the financial statements are presented in thousand Indonesian Rupiah ("Rp") unless otherwise stated.

New accounting standard

Effective on 1 January 2010, the Company adopted PSAK 50 (Revised 2006) "Financial Instruments: Presentation and Disclosures" and PSAK 55 (Revised 2006) "Financial Instruments: Recognition and Measurement". The provisions of these standards were applied prospectively upon adoption and did not have a material impact on these financial statements. Mainly, the impact was on the requirements to disclose the nature and extent of the risks arising from the financial instruments to which the Company are exposed, and their related risk management policies (see Note 16).

b. Foreign currency translation

The functional currency of the Company is the Indonesian Rupiah and the books of accounts of the Company are maintained in the Indonesian Rupiah.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010**

(Expressed in thousand Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

b. Penjabaran transaksi dalam valuta asing (lanjutan)

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul pada transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi.

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito dan investasi jangka pendek dengan likuiditas tinggi dengan masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

d. Aset keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori sebagai berikut: pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, atau yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan ini pada saat awal pengakuannya:

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Foreign currency translation (continued)

Transactions denominated in a foreign currency are converted into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transaction. At the balance sheet date, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at that date.

Exchange gains and losses arising on transactions in foreign currency and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the income statement.

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents includes cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less.

d. Financial assets

The Company classifies its financial assets in the following categories: at fair value through profit or loss, loans and receivable, held-to-maturity investments, or available-for sale, as appropriate. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading which is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term. The Company has no financial assets that are classified as held for trading.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/5 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010

(Expressed in thousand Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan (lanjutan)

d. Financial assets (continued)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

(ii) Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivative dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset lancar kecuali dengan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Keuntungan dan kerugian diakui di laporan keuangan ketika aset keuangan ini dihentikan pengakuannya atau terdapat penurunan nilai, juga melalui proses amortisasi. Kas dan setara kas, investasi dalam deposito berjangka dan *security deposit* diklasifikasikan dalam kategori ini.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. They are classified as current assets except for maturities greater than 12 months after the balance sheet date. These are classified as non-current assets. Gains and losses are recognized in the consolidated statement of income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process. The Company's cash and cash equivalents, investment in time deposit and security deposits are classified in this category.

(iii) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

(iii) Held-to-Maturity ("HTM") investments

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta management mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Investasi pada obligasi di klasifikasikan dalam kategori ini.

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Management has the positive intention and ability to hold them to maturity. These are initially recognized at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method. The Company's investment in bonds is classified in this category.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010**

(Expressed in thousand Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

d. Aset keuangan (lanjutan)

d. Financial assets (continued)

(iv) Aset keuangan tersedia untuk dijual

(iv) Available-for-Sale ("AFS") financial assets

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing, atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, dan tidak diklasifikasikan dalam tiga kelompok sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada nilai wajar dan keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan perubahan ekuitas hingga dihentikan pengakuannya. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori ini.

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are intended to be held for indefinite period time, which may be sold in responds to needs for liquidity or changes in interest rate, exchange rate or are not classified in any of the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in stockholders' equity until the financial assets are derecognized. The Company has no financial assets that are classified as AFS.

e. Aset tetap dan penyusutan

e. Fixed assets and depreciation

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method over the following estimated useful lives:

	<u>Tahun/Years</u>	
Prasarana kantor	3	<i>Leasehold improvement</i>
Peralatan komputer	3	<i>Computer equipments</i>
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	3	<i>Office equipments, furnitures and fixtures</i>

Nilai residu dan umur manfaat aset tetap ditelaah, dan disesuaikan bila perlu, pada setiap tanggal neraca.

The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each balance sheet date.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010**

(Expressed in thousand Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

e. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Perusahaan melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset pada akhir tahun. Jika indikasi tersebut terjadi, perusahaan memperkirakan kembali nilai perolehan aset tersebut dan mengakui penurunan nilai aset sebagai beban dalam laporan laba rugi.

Jika aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan aset tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

f. Perpajakan

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode kewajiban, untuk semua akibat perbedaan temporer yang ada antara aset dan kewajiban atas dasar pajak dengan nilai tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan Undang-Undang) yang telah diberlakukan pada tanggal neraca dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau kewajiban pajak tangguhan diselesaikan.

**e. Fixed assets and depreciation
(continued)**

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the income statement during the financial period in which they are incurred.

The Company conducts a review to determine whether there is any indication of asset value impairment at the end of the year. If any such indications exist, the company estimates the recoverable amount of their assets and recognises the impairment in asset values as an expense in the statement of income.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the statements of income.

f. Taxation

Deferred income tax is provided in full using the balance sheet liability method, for all temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the balance sheet date and are expected to apply when the related deferred income tax is realised or the deferred income tax liability is settled.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010**

(Expressed in thousand Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

f. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat ketika surat ketetapan pajak diterima atau, jika mengajukan keberatan/banding, ketika hasil keberatan/banding diputuskan.

g. Kewajiban imbalan kerja

Imbalan pensiun

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan kewajiban imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari kewajiban imbalan pension.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal neraca dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program pensiun yang ada dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada tanggal neraca dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan kewajiban imbalan pensiun yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

f. Taxation (continued)

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

g. Employee benefits obligation

Pension benefits

The Company is required to provide a minimum pension benefit as stipulated in the Law No.13/2003, which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

The liability recognised in the balance sheet in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past services cost. The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/9 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010

(Expressed in thousand Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Kewajiban imbalan kerja (lanjutan)

g. Employee benefits obligation
(continued)

Imbalan pension (lanjutan)

Pension benefits (continued)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial yang jumlahnya lebih besar dari 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti, dibebankan atau dikreditkan ke laporan laba rugi selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan tersebut.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions when exceeding 10% of defined benefit or 10% of fair value of the program's asset are charged or credited to income over the average remaining service lives of the relevant employees.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mensyaratkan karyawan tersebut untuk bekerja selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini, biaya jasa lalu akan diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode tersebut.

Past-service costs are recognised immediately in the statements of income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees' vesting period. In this case, the past-service costs are amortised on a straight-line basis over the vesting period.

h. Pendapatan dan beban

h. Revenue and expenses

Pendapatan dari penjaminan terdiri dari pendapatan premi, dan pendapatan provisi dan komisi.

Revenue from guarantee consists of premium income; and fees and commissions.

Pendapatan premi terdiri dari guarantee fee dan processing fee. Pendapatan dari guarantee fee diakui berdasarkan jangka waktu dari periode penjaminan tergantung dari pengaturan dalam kontrak. Pendapatan dari processing fee diakui pada saat pendapatan diperoleh.

Premium income consists of guarantee fee and processing fee. Revenue from guarantee fee is recognised based on the duration of guarantee period depending on the arrangement in the contract. Revenue from processing fee is recognised when earned.

(i) Guarantee fee dibebankan karena jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan jaminan exposure oleh perusahaan.

(i) Guarantee fee is charged due to the guarantee provided to the beneficiaries on the basis of guarantee exposure of the company.

(ii) Processing fee dibebankan karena adanya aktivitas pemrosesan yang dilakukan jika klaim disampaikan kepada pihak penjamin.

(ii) Processing fee is charged due to process activity if the claim delivered to the guarantor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010**

(Expressed in thousand Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

h. Pendapatan dan beban (lanjutan)

h. Revenue and expenses (continued)

Pendapatan Provisi dan komisi terdiri dari arranging fee, ceded commission, dan pendapatan provisi dan komisi lainnya. Arranging fee terdiri dari bagian yang dapat dikembalikan dan bagian yang tidak dapat dikembalikan. Ceded commission adalah pendapatan dari peningkatan struktur penjaminan yang dilakukan dengan pihak penjamin lain. Pendapatan dari bagian yang tidak dapat dikembalikan dari arranging fee diakui pada saat kontrak penjaminan ditandatangani; sementara pendapatan dari bagian yang dapat dikembalikan dari arranging fee diakui pada saat proyek dimulai (Financial Close); terlepas dari kelangsungan penjaminan proyek itu sendiri di masa yang akan datang. Pendapatan dari ceded commission dan fees dan pendapatan komisi lainnya diakui pada saat diperoleh.

Fees and commissions consist of arranging fee, ceded commission, and other fees and commissions. Arranging fee consists of a refundable and non refundable fee portion. Ceded commission is revenue from the enhancement of guarantee structure with other guarantee/insurance parties. Revenue from a non refundable portion of arranging fee is recognised upon signing of the guarantee contracts; while revenue from a refundable portion of arranging fee is recognised upon the commencement of the project (Financial Close); regardless the continuance of the guarantee projects itself in the future. Revenue from ceded commission and other fees and commissions is recognised when earned.

Pendapatan dari pendapatan bunga dan investasi pendapatan tetap diakui pada saat diperoleh.

Revenue from interest income of time deposit and investment in fixed income are recognised when earned.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

Expenses are recognised on an accrual basis.

i. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

i. Transactions with related parties

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7, tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 7, "Related Party Disclosures".

Semua transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diungkapkan dalam catatan pada laporan keuangan.

All significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/11 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010

(Expressed in thousand Rupiah)

3. KAS DAN SETARA KAS**3. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	<u>31 Desember/ December 2010</u>	
Kas	173,720	Cash on hand
Bank	<u>1,003,969,565</u>	Cash in banks
	<u><u>1,004,143,285</u></u>	

4. INVESTASI**4. INVESTMENTS**

	<u>31 Desember/ December 2010</u>	
Deposito	1,001,853,846	Time deposits
Investasi dengan pendapatan tetap	<u>30,000,000</u>	Fixed Income
	<u><u>1,031,853,846</u></u>	

a) Deposito

Deposito dengan periode jatuh tempo 1– 6 bulan dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 7.00% - 10.00% per tahun di 2010.

a) Time deposits

Time deposits with 1 month – 6 months maturities period and earned interest rates ranging between 7.00% - 10.00% per annum in 2010.

b) Inventasi dengan pendapatan tetap

Investasi pada obligasi dengan periode jatuh tempo 5 tahun dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 9.60% - 9.70% per tahun.

b) Fixed Income

Investment in bond with 5 years maturities and earned interest rates ranging between 9.60% - 9.70% per annum.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/12 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010

(Expressed in thousand Rupiah)

5. ASET TETAP

5. FIXED ASSETS

2011						
Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi <i>Reclassification</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>		
Harga Perolehan :					Acquisition cost:	
Prasarana kantor	-	1,370,668	-	-	1,370,668	<i>Leasehold improvement</i>
Peralatan komputer	-	14,108	-	-	14,108	<i>Computer equipments</i>
Peralatan kantor furnitur dan perlengkapan	-	1,026,638	-	-	1,026,638	<i>Office equipments, furnitures and fixtures</i>
	-	2,411,414	-	-	2,411,414	
Akumulasi Penyusutan:					Accumulated depreciation:	
Prasarana kantor	-	(190,371)	-	-	(190,371)	<i>Leasehold improvement</i>
Peralatan komputer	-	(588)	-	-	(588)	<i>Computer equipments</i>
Peralatan kantor, furnitur dan perlengkapan	-	(193,863)	-	-	(193,863)	<i>Office equipments, furnitures and fixtures</i>
	-	(384,822)	-	-	(384,822)	
Nilai Buku Bersih	-				2,026,592	Net book value

6. BEBAN TANGGUHAN

6. DEFERRED EXPENSES

Beban tangguhan merupakan biaya *advisory* yang berhubungan dengan kegiatan pemrosesan dan pengaturan penjaminan jangka panjang dan akan dibebankan pada saat pendapatan dari penjaminan tersebut diakui.

Deferred expenses represent advisory cost related to the processing and arranging activities in obtaining long-term guarantees and will be expensed upon the recognition of such fees.

7. HUTANG USAHA

7. ACCOUNT PAYABLES

Hutang usaha merupakan pembayaran yang belum dilakukan untuk jasa konsultasi terkait dengan provisi penjaminan.

Account payables mainly represent payable for advisory related to the guarantee provision.

8. PERPAJAKAN

8. TAXATION

a. Hutang pajak

a. Taxes payable

	31 Desember/ <i>December 2010</i>	
Pajak Penghasilan Pasal 21	1,527	<i>Income tax art 21</i>
Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 4 (2)	74,479	<i>Income tax art 23 and 4 (2)</i>
	<u>76,006</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/13 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010

(Expressed in thousand Rupiah)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

b. Penghasilan (beban) pajak

b. Income tax expense

	<u>31 Desember/ December 2010</u>	
Pajak tangguhan	<u>86,194</u>	Deferred

Perhitungan penghasilan (beban) pajak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

The Company's current income tax expenses for the period ended 31 December 2010 is calculated as follows:

	<u>31 Desember/ December 2010</u>	
Laba sebelum pajak Penghasilan	<u>46,510,817</u>	Profit before income tax
Perbedaan temporer:		Temporary differences:
- Beban penyisihan imbalan pasca kerja	227,040	- Provision for employee benefits
- Perbedaan antara penyusutan komersial dengan fiskal	117,737	- Differences between commercial and fiscal depreciation
Perbedaan permanen:		Permanent differences:
- Benefits-in-kind	607,259	- Interest income
- Pendapatan bunga	<u>(62,745,029)</u>	- Benefits-in-kind
Rugi pajak	<u>(15,282,176)</u>	Taxable loss
Rugi pajak yang dapat dikompensasi	<u>(3,820,544)</u>	Tax loss carry forward

c. Kewajiban pajak tangguhan

c. Deferred tax liabilities

	<u>1 Januari/ January 2010</u>	<u>Dikreditkan kelaporan Laba rugi/ Credited to Statement of income</u>	<u>31 Desember/ December 2010</u>	
Perbedaan antara accounting dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	-	29,434	29,434	Differences between accounting and tax fixed assets net book value
Beban penyisihan imbalan pasca kerja	-	56,760	56,760	Provision for employee benefits
Aset pajak tangguhan	-	<u>86,194</u>	<u>86,194</u>	Deferred tax assets

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010**

(Expressed in thousand Rupiah)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak.

Pada tanggal 2 September 2008, Pemerintah telah mengesahkan amendemen Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009, yang menetapkan tarif pajak penghasilan perusahaan menjadi tarif tunggal sebesar 28% pada tahun 2009 dan diturunkan lagi menjadi 25% pada tahun 2010. Perubahan tariff pajak ini telah diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan Perusahaan dan aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2010.

8. TAXATION (continued)

d. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax (DGT) may assess or amend taxes within ten years of the time the tax becomes due, or until the end of 2013, whichever is earlier. There are new rules applicable to fiscal year 2008 and subsequent years stipulating that the DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

In September 2008, the Indonesian House of Representatives approved a proposal to amend the Income Tax Law, which became effective as of 1 January 2009. Under this amended law, the corporate income tax rate is reduced to a fixed rate of 28% for the fiscal year 2009 and to 25% for the fiscal year 2010 and subsequent years. This change in tax rates is reflected in the Company's computation of income tax expense and deferred tax liabilities as at 31 December 2010.

9. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

9. ACCRUED EXPENSES AND OTHER PAYABLES

	<u>31 Desember/ December 2010</u>	
Beban <i>advisory</i>	3,459,291	<i>Advisory fees</i>
Bonus dan gaji	823,460	<i>Bonus and salary</i>
Lainnya	290,603	<i>Others</i>
	<u><u>4,573,354</u></u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/15 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010

(Expressed in thousand Rupiah)

10. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA**10. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION**

Kewajiban imbalan pasca kerja diakui dalam neraca sebagai berikut:

Employee benefit obligations recognised in the balance sheets are as follows:

**31 Desember/
December 2010**

Nilai saat ini dari kewajiban imbalan pasca kerja

227,040

Present value of defined benefit obligations

Beban bersih yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebesar Rp 227,040.

Net expense recognised in the statements of income is amounting to Rp 227,040.

Kewajiban Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2010 dihitung oleh PT Towers Watson Purbajaga, Aktuaris independen pada Laporan bertanggal 22 Pebruari 2011 menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Employee benefits obligation as of 31 December 2010 is computed by PT Towers Watson Purbajaga, an Independent Actuary whose report dated 22 February 2011 using the "Projected Unit Credit" method using the following assumptions:

**31 Desember/
December 2010**

Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji
Tingkat mortalita
Usia pensiun normal

9,25%
8. %
TMI '99
55

*Discount rate
Salary increment rate
Mortality rate
Retirement age*

Pergerakan pada kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The movement in the employee benefits obligation is as follows:

**31 Desember/
December 2010**

Saldo awal tahun

- *Balance at the beginning of the year*

Provisi pada tahun berjalan

227,040

Provision in the current year

Pembayaran selama tahun berjalan

-

Payment during the year

Saldo akhir tahun

227,040

Balance at the end of the year

11. MODAL SAHAM**11. SHARE CAPITAL**

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

The composition of shareholder of the Company as at 31 December 2010 is as follows:

	Jumlah saham/ Number of shares	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai/ Value	
Pemerintah Republik Indonesia	<u>2,000,000</u>	<u>100</u>	<u>2,000,000,000</u>	<i>Government of Republic of Indonesia</i>

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010**

(Expressed in thousand Rupiah)

11. MODAL SAHAM (lanjutan)

Modal saham telah disetorkan dalam dua tahap, Pertama pada 31 DESEMBER 2009 sebesar Rp. 1 triliun, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Dan yang kedua pada 31 DESEMBER 2010 sebesar Rp. 1 Triliun, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

11. SHARE CAPITAL (continued)

The share capital have been paid-in in two stages, firstly in 31 December 2009 amounted Rp. 1 trillion, based on the Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Secondly in 31 December 2010 amounted Rp. 1 Trillion, based on Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

12. PENDAPATAN DARI INVESTASI

12. INCOME FROM INVESTMENT

	<u>31 Desember/ December 2010</u>	
Deposito	60,524,541	<i>Time deposit</i>
Investasi dengan pendapatan tetap	<u>1,161,122</u>	<i>Fixed income</i>
	<u>61,685,663</u>	

13. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

13. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>31 Desember/ December 2010</u>	
Karyawan:		<i>Personnel:</i>
- Gaji dan upah	5,430,081	<i>- Salaries and wages</i>
- Tunjangan pajak	1,679,617	<i>- Tax allowances</i>
- Tunjangan hari raya	611,250	<i>- Religious holiday allowances</i>
- Bonus	823,460	<i>- Bonus</i>
- Tunjangan pensiun	404,083	<i>- Retirement allowances</i>
- Tunjangan kesehatan	273,346	<i>- Medical allowances</i>
- Imbalan pasca kerja	227,040	<i>- Employee benefit expenses</i>
- Lainnya	<u>378,847</u>	<i>- Others</i>
	<u>9,827,724</u>	
Komunikasi:		<i>Communication:</i>
- Edukasi untuk <i>Stakeholder</i>	1,353,076	<i>- Stakeholders education</i>
- Informasi dan komunikasi	<u>413,619</u>	<i>- Information and communication</i>
	<u>1,766,695</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/17 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010

(Expressed in thousand Rupiah)

13. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 13. GENERAL AND ADMINISTRATIVE
(lanjutan) EXPENSES (continued)

	31 Desember/ December 2010	
Umum dan administrasi :		General and administrative:
- Beban <i>advisory</i>	2,613,557	- Advisory fees
- Sewa	911,101	- Rents
- Beban penyusutan	384,822	- Depreciation
- Lainnya	716,365	- Others
	<u>4,625,845</u>	
Amortisasi untuk beban proyek	-	Amortization for project cost
	<u>16,220,264</u>	

14. PERJANJIAN PENTING

14. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Perjanjian sewa kantor dengan PT Buana Sakti.

Rent office agreement with PT Buana Sakti.

Pada tanggal 20 April 2010 Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Buana Sakti. Periode sewa adalah untuk tiga (3) tahun dimulai dari 12 April 2010 dan berakhir pada 11 April 2013. Perjanjian sewa ini meliputi area yang digunakan untuk ruangan kantor. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sewa, jasa pemeliharaan dan biaya lainnya terkait sewa ke PT Buana Sakti. Pembayaran untuk seluruh jumlah sewa dan jasa pemeliharaan dilakukan di muka. Sebagai tambahan, Perusahaan juga membayar dimuka atas deposit sekuriti dan saluran telepon yang ditahan oleh PT Buana Sakti tanpa kewajiban untuk membayar bunga kepada perusahaan. Seluruh deposit tersebut akan dikembalikan pada waktu berakhirnya perjanjian sewa ini, jika Perusahaan tidak berniat untuk melanjutkan sewa.

On April 20, 2010, the Company entered into a lease agreement with PT Buana Sakti. The Lease period is for three (3) years starting from 12 April 2010 and expire on 11 April 2013. This Lease agreements covers an area that is used for office space. Based on this agreement, the Company has an obligation to pay rent, service charges and other charges to PT Buana Sakti. Payment for full amount of rent and service charges was made in advance. In addition, the Company paid in advance as well for security and telephone line deposit, which is held by the PT Buana Sakti without liability to the Company for interest. All, security and telephone line deposit will be refunded on the expiration of this lease, if the Company does not intend to continue the lease.

15. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN 15. CONTINGENT LIABILITIES AND CAPITAL
KOMITMEN COMMITMENTS

Perusahaan tidak memiliki kewajiban kontinjensi dan komitmen per 31 Desember 2010.

The Company has no contingent liabilities and capital commitment as at 31 December 2010.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010**

(Expressed in thousand Rupiah)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a) Faktor-faktor Risiko keuangan

Aktivitas perusahaan terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, manajemen risiko keuangan perusahaan dirancang untuk meminimalisir potensi kerugian pada risiko keuangan perusahaan.

Manajemen risiko dilakukan dibawah arahan dari Dewan Direksi. Manajemen mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan lalu melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko.

i) Risiko Pasar

a) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perusahaan tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena kebanyakan transaksi perusahaan dilakukan menggunakan mata uang fungsional.

b) Risiko Tingkat Suku Bunga

Perusahaan tidak mempunyai risiko tingkat suku bunga.

ii) Risiko Kredit

Perusahaan tidak mempunyai risiko kredit yang signifikan karena dalam tahun berjalan pendapatan perusahaan dominan berasal dari pendapatan bunga dari penempatan deposito.

iii) Risiko Likuiditas

Perusahaan tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan.

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a) Financial risk factors

The Company's activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. In overall, the Company's financial risk management are designed to minimise potential adverse effects on the Company's financial risk.

Risk management is carried out under the direction of the Board of Directors. The management identifies and evaluates financial risks and perform necessary action to mitigate the risks.

i) Market risk

a) Foreign exchange risk

The Company has no significant foreign exchange risk since most of Company's transactions are performed using the Company's functional currency.

b) Interest rate risk

The Company has no interest rate risk.

ii) Credit risk

The Company has no significant credit risk because in the current year Company's revenues predominantly arise from interest income from placement of time deposit.

iii) Liquidity risk

The Company has no significant interest rate risk.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Lampiran 5/19 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010

(Expressed in thousand Rupiah)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b) Nilai wajar dari instrumen keuangan

b) Fair values of financial instruments

Aset keuangan perusahaan sebagian besar terdiri dari kas dan setara kas, dan investasi dengan waktu jatuh tempo kurang dari satu tahun. Nilai wajar dari aset keuangan tersebut mendekati nilai yang tercatat, dampak dari diskonto tidak signifikan.

The Company's financial assets are mostly comprised of cash and cash equivalents, and investments with maturity less than one year. The fair values of those financial assets approximates their carrying amounts, as the impact of the discounting is not significant.

Kewajiban keuangan perusahaan sebagian besar terdiri dari kewajiban jangka pendek tertentu, seperti hutang usaha, kewajiban lain, dan biaya masih harus dibayar dengan waktu jatuh tempo kurang dari satu tahun. Nilai Wajar dari kewajiban jangka pendek tersebut mendekati nilai yang tercatat, dampak dari diskonto tidak signifikan.

The Company's financial liabilities are mostly comprised of certain short-term liabilities, such as account payables, other liabilities, and accrued expenses with maturity less than one year. The fair values of the short-term liabilities approximates their carrying amounts, as the impact of the discounting is not significant.

17. STANDAR AKUNTANSI BARU

17. PROSPECTIVE
PRONOUNCEMENT

ACCOUNTING

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi revisi yang mungkin relevan untuk laporan keuangan Perusahaan sebagai berikut:

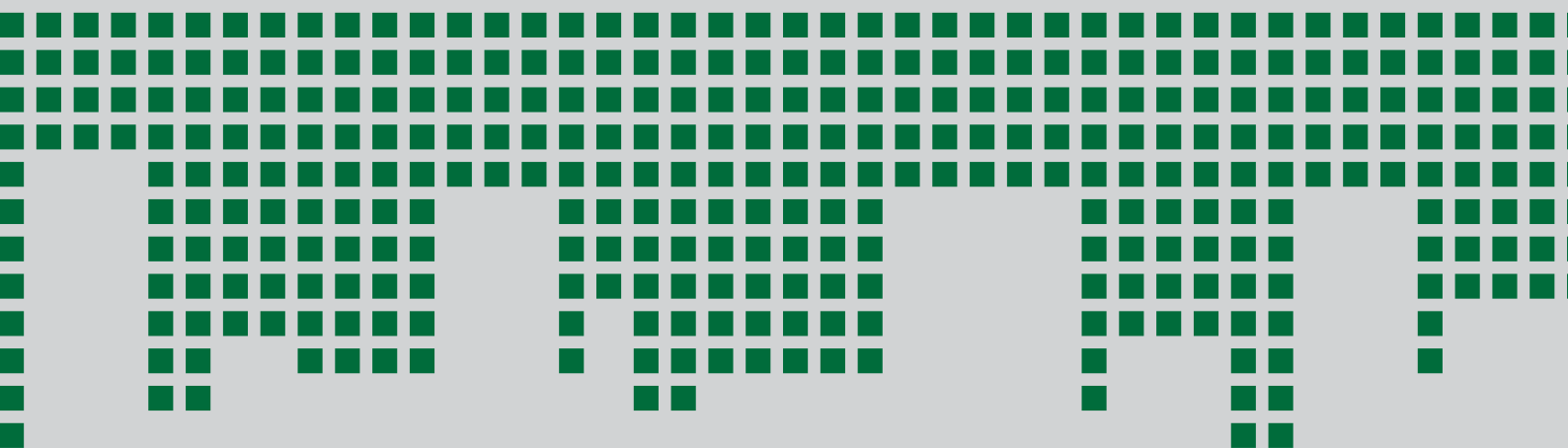
The Indonesian Institute of Accountants has issued the following revised accounting standards which may be relevant to the Company's financial statements as follows:

- PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan/ *Presentation of Financial Statements*
- PSAK 2 : Laporan Arus Kas/ *Statement of cash flows*
- PSAK 7 : Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa/
Related party disclosure
- PSAK 23 : Pendapatan/ *Revenue*
- PSAK 25 : Kebijakan Akuntansi, perubahan estimasi dan kesalahan/
Accounting policies, changes in estimate and errors
- PSAK 57 : Kewajiban diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi/
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Standar di atas berlaku untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar tersebut terhadap laporan keuangan.

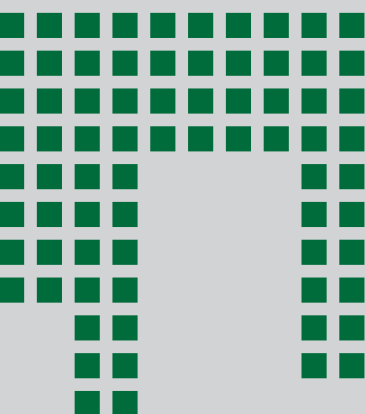
The above standards are applicable for the financial statements covering period beginning on or after 1 January 2011. The Company is still evaluating the possible impact of these standards on its financial statements.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



Profil Manajemen

Management Profile



Dewan Komisaris

Board of Commissioners



Freddy Rikson Saragih

President Commissioner | Komisaris Utama

Freddy Rikson Saragih adalah Komisaris Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya, selama hampir 25 tahun beliau telah mengabdikan diri dan bekerja di bidang pasar modal. Setelah menduduki berbagai jabatan, terakhir beliau menjabat Direktur Riset dan Manajemen Investasi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Beliau merupakan figur yang cukup dikenal di kalangan industri pasar modal Indonesia dan sering diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai konferensi dan seminar bergengsi. Beliau memiliki gelar Master dalam bidang Profesional Accounting (MPAcc) dari Universitas Austin, Texas, Amerika Serikat. Beliau juga telah mengikuti berbagai pendidikan lanjutan dalam bidang Akuntansi dan Pasar Modal di berbagai institusi yang berbasis di Tokyo, Stockholm, Manila dan Washington DC.

Freddy Rikson Saragih is the President Commissioner of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He is currently the Head of the Center for Fiscal Risk Management at the Fiscal Policy Office, Ministry of Finance, Republic of Indonesia. He spent most of his professional life in the capital market industry for almost 25 years in various positions. His most recent position was the Director of the Investment Management and Research Bureau of the Indonesia Capital Market & Financial Institution Supervisory Board (BAPEPAM-LK). Mr. Saragih is a well-known figure in capital market in the industry in Indonesia and is a frequent speaker in many high-profile conferences and seminars. He has a Master's Degree in Professional Accounting (MPAcc.) from the University of Austin, Texas, USA. Mr. Saragih has also participated in many advanced professional trainings and courses in accounting and the capital market from various institutions based in Tokyo, Stockholm, Manila and Washington DC.



Ayu Sukorini

Commissioner | Komisaris

Selain menjabat Komisaris pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Ayu Sukorini adalah Direktur Strategi dan Portofolio Utang di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau telah bertugas selama hampir 20 tahun di Kementerian Keuangan dan ditugaskan di berbagai posisi di area Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Pengelolaan Obligasi serta Pengelolaan Utang terutama pada bidang Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan. Beliau terlibat secara langsung dalam eksekusi penerbitan Obligasi Negara sejak tahun 2003 sampai 2007 baik di pasar domestik dan internasional. Beliau memiliki gelar Master of Arts (MA) dalam bidang ekonomi dari Universitas Colorado, Denver, Amerika Serikat, dan gelar sarjana dalam bidang ekonomi dari Universitas Satya Wacana, Salatiga. Beliau juga telah mengikuti berbagai pendidikan profesional lanjutan yang diselenggarakan beberapa institusi di Singapura, Washington DC, Sydney dan Tokyo dalam area Kebijakan Fiskal, Manajemen Risiko dan Pasar Keuangan. Beliau juga berpartisipasi aktif sebagai penyaji dalam berbagai forum pertemuan pengelola utang di London, Washington, Tokyo dan kawasan regional.

In addition to her role as the Commissioner of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, Ayu Sukorini is also the Director of Strategy and Debt Portfolio of the Debt Management Office, Ministry of Finance, Republic of Indonesia. For almost 20 years, Ms. Sukorini has been assigned to many important duties in the Ministry of Finance, including in the areas of Fiscal Policy, Government Bond Policy Management and Debt Management, mainly for policy planning and development. She was also actively involved in the execution of the government's bond issuance in the domestic and international markets from 2003 to 2007. Ms. Sukorini has a Master of Arts degree in Economics from the University of Colorado at Denver, and a degree in Economics from Satya Wacana University, Salatiga, Central Java. She has participated in many advanced professional education courses in Fiscal Policy, Risk Management and Interest Rate Market at institutes in Singapore, Washington DC, Sydney and Tokyo. She is also active as a speaker in many international meetings on Debt Management including in London, Washington DC, Tokyo and in South East Asia region.

Direksi

Board of Directors



Sinthya Roesly

President Director | Direktur Utama

Sinthya Roesly adalah Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Sebelumnya, beliau bekerja di PT PLN (Persero) selama lebih dari 16 tahun dengan berbagai penugasan mulai dari keuangan korporat, pendanaan, perencanaan korporat dan strategi, komersial, operasi sistem tenaga listrik dan transmisi, serta konstruksi proyek. Selama di PLN, beliau terlibat secara penuh dalam mendapatkan pembiayaan untuk proyek-proyek PLN baik dari lembaga multilateral dan bilateral, termasuk program percepatan pembangkit 10,000 MW, serta pembiayaan dari perbankan domestik dan internasional. Beliau juga terlibat secara aktif dalam pengembangan electricity trading mechanism untuk sistem Jawa-Bali, penyiapan sistem operasi untuk IPP generasi pertama di Indonesia pada akhir tahun 1990, selain keterlibatannya dalam berbagai proses restrukturisasi korporasi dan sektor ketenagalistrikan di Indonesia pada akhir 1990an sampai awal 2000an. Sinthya Roesly pernah menjadi Ketua Kelompok Kerja untuk Energy Market Reform - World Energy Council, Indonesia National Committee dari tahun 2005 – 2006. Sinthya Roesly memiliki gelar Master of Management dari IPMI Business School dan MBA dari Monash University, Australia; gelar MEngSc dalam Power Systems dari University of New South Wales, Australia; dan gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia.

Sinthya Roesly is the President Director of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Prior to her current position, Ms. Roesly worked with PT PLN (Persero), the state-owned electricity corporation for more than 16 years. Her various positions ranged from corporate finance, funding, corporate planning and strategy, commerce, transmission and power system operations, as well as project construction. In PLN, Ms. Roesly was involved in securing the financing from multilateral and bilateral agencies for PLN projects, as well as for the 10,000 MW Fast Track Program, and bank loans involving domestic and international banks. She was also actively involved in the development of the electricity trading mechanism in the Java-Bali system, setting up system for operations of the first generation of IPP in Indonesia in the late 1990s, in addition to overseeing corporate and power sector restructuring in Indonesia in the late 1990s and early 2000s. Ms. Roesly was formerly the Head of the Energy Market Reform Working Group, Indonesia National Committee - World Energy Council, 2005-2006. She holds a Master of Management degree from IPMI Business School and an MBA from Monash University, Australia; an MEngSc in Power Systems from the University of New South Wales, Australia, and a Bachelor's degree in Electrical Engineering from the University of Indonesia.



Yadi J. Ruchandi

Director of Operations | Direktur Operasi

Yadi J. Ruchandi adalah Direktur Operasi dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Sebelumnya, beliau adalah Wakil Presiden Eksekutif dari sebuah integrated logistics and aviation group dan Direktur Keuangan dari sebuah Perusahaan Penerbangan Swasta. Beliau memiliki pengalaman yang luas di bidang keuangan dan investasi perbankan, serta bekerja diberbagai perusahaan dan organisasi terkemuka termasuk Bank American-Express dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Bank Indonesia. Beliau telah memiliki berbagai pengalaman mulai dari Merger and Acquisition, negosiasi dan restrukturisasi hutang korporat, business turnaround dan pengembangan proyek. Yadi J. Ruchandi adalah seorang Chartered Financial Analyst (CFA) dan memiliki gelar dalam bidang teknik mesin dan MBA dari Thunderbird-American Graduate School of International Management, USA.

Yadi J. Ruchandi is the Director of Operations of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Prior to his current position, he was executive vice president of an integrated logistics and aviation group and CFO of a private airline. He brings broad experience in the financial sector and investment banking from working in high-profile companies and organizations, including American-Express Bank as well as the Indonesian Bank Restructuring Agency. He has considerable deal experiences ranging from merger and acquisition, debt and corporate restructuring and negotiation, business turnaround and project development. He is a CFA holder and has a Bachelor's degree in mechanical engineering from the University of Indonesia and an MBA from Thunderbird- American Graduate School of International Management, USA.



Armand Hermawan

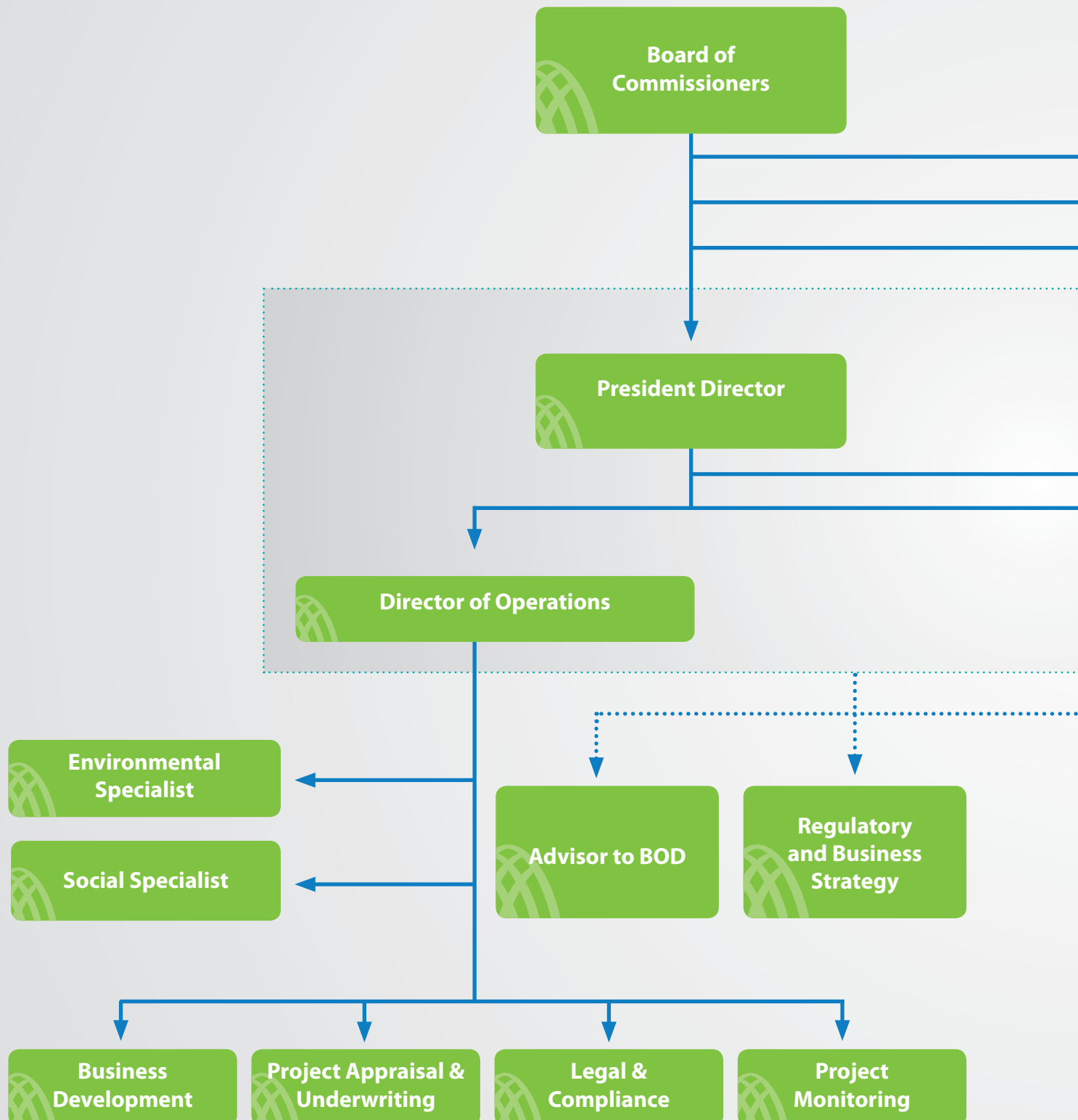
Director of Finance & Risk Management |
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko

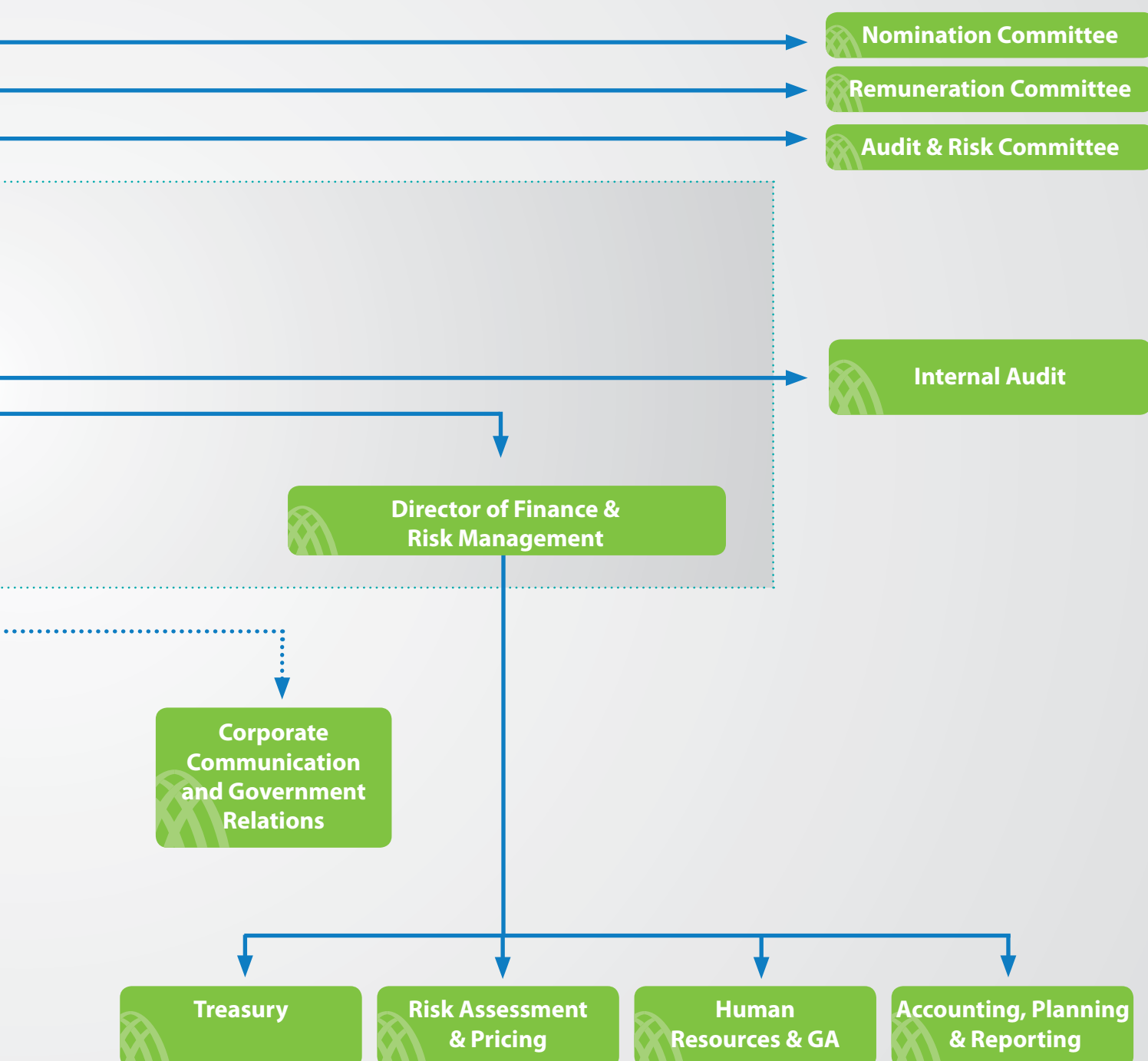
Armand Hermawan adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Sebelumnya, beliau menghabiskan kehidupan profesional di perusahaan telekomunikasi raksasa Indonesia, Indosat. Jabatan terakhir beliau di Indosat adalah Senior Vice President (SVP) dan Chief of Group Controlling Office. Selama di Indosat, beliau dipercaya untuk berperan penting dalam transaksi Merger and Acquisition dan aksi korporat lainnya seperti IPO dan penerbitan obligasi syariah. Pada saat beliau di divisi corporate strategy, Indosat mendapatkan award sebagai perusahaan dengan the best strategy dari Asia Money pada tahun 2005. Beliau adalah seorang akuntan terdaftar, memperoleh gelar Master of Commerce and Management (MCM) dari University of Lincoln, NZ dan PhD di bidang keuangan dari University of Newcastle, NSW, Australia.

Armand Hermawan is the Director of Finance and Risk Management of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Previously, he spent his professional life in Indonesia's major telecommunications company PT Indosat, Tbk. His final position in Indosat was Senior Vice President (SVP) and Chief of Group Controlling Office. During his tenure in Indosat, he was entrusted to lead M&A transaction and other corporate actions including IPO and Islamic Bond Issuance. During his period in the corporate strategy division, Indosat was selected as the company with the best business strategy by Asia Money in 2005. A registered accountant, Mr. Hermawan obtained a Master's Degree in Financial Econometrics from the University of Lincoln, New Zealand, and a PhD Degree in Finance from University of Newcastle, NSW, Australia.

Struktur Organisasi

Organization Structure





Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



IIIGF | PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

Sampoerna Strategic Square, North Tower 14th floor

Jl Jenderal Sudirman Kav. 45-46

Jakarta 12930 Indonesia

Telp: +62 21 5795 0550 | Fax: +62 21 5795 0040
info@iigf.co.id | www.iigf.co.id